

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

KOMINFO 5 DALAM TAHUN

Rencana Strategis
Kementerian Kominfo
2020 - 2024

Edisi 30
Juni 2021



9772655-993006



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.
Walbertus Natalius W.
Primus A Latu B.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmi Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat No.
9, Jakarta Pusat

Menghubungkan yang Tidak Terhubung

Selamat berjumpa kembali, Pembaca Majalah Kominfo Next. Pada edisi ke-30 kali ini, kita giat literasi seputar isu komunikasi dan informatika, yang lebih spesifik mengulas tentang apa saja rencana strategis dalam mewujudkan transformasi digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Senin, 7 Juni 2021 memenuhi undangan Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI. Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I, Menteri Johnny menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kominfo. Terselip harapan, pembahasan RKA dan RKP sebagai titik nadir untuk menghubungkan yang tidak terhubung, *connecting the unconnected*, kemandirian dan kedaulatan digital.

Berbicara mengenai hal ini, Menteri Johnny menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kominfo tahun 2020-2024 yang dibagi ke dalam tiga sektor penting, yakni infrastruktur digital, transformasi digital di pemerintahan dan masyarakat, dan transformasi ekonomi masyarakat.

Pertama, Infrastruktur Digital. Pembangunan infrastruktur digital merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses internet di seluruh tanah air. Sektor ini mencakup beberapa langkah, yakni menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T), Satelit Multifungsi SATRIA I yang ditargetkan beroperasi di tahun 2023, menata penggunaan spektrum frekuensi melalui program *farming* dan *refarming* untuk memenuhi kebutuhan akses jaringan 4G, digitalisasi penyiaran, serta menyiapkan ekosistem teknologi 5G.

Kedua, Transformasi Digital di pemerintahan dan masyarakat. Menyambut era digitalisasi, pemanfaatan ekosistem teknologi di pemerintahan dan menyiapkan SDM Indonesia

untuk menjadi 'manusia digital' adalah pilihan yang tidak bisa ditawar. Untuk itu, pada sektor ini Kementerian Kominfo memiliki beberapa program seperti pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) atau Government Cloud. Program ini ditujukan untuk integrasi data pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam suatu sistem.

Sedangkan, untuk mendorong masyarakat dalam melakukan percepatan transformasi digital, Kementerian Kominfo menghadirkan program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.

Ketiga, Transformasi Ekonomi Digital. Khusus di sektor ini, Kementerian Kominfo mendorong ekosistem startup digital dan masyarakat secara umum agar saling berkolaborasi memanfaatkan teknologi digital. Guna mendorong masyarakat bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital, Kementerian Kominfo menghadirkan program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan Startup Studio Indonesia.

Secara singkat, tiga sektor ini merepresentasikan langkah-langkah, program, dan kebijakan Kementerian Kominfo dari hulu hingga hilir. Dari menyiapkan infrastruktur telekomunikasi hingga melatih kecakapan digital masyarakat. Dengan demikian, kita telah siap menyambut era baru, era transformasi digital untuk menghubungkan yang tidak terhubung. Untuk Indonesia semakin terkoneksi, semakin digital, semakin maju.

Selamat membaca!

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

 @FSetu
  @FSetu
  FSetu TV



Daftar

Isi

2 Surat dari MMB 9

4 Rak Buku

10 Teknologi & Gadget

14 KominfoPedia

16 Menkominfo Bicara

24 Kabar Istana

28 Liputan Utama

52 Dukungan Mitra Kerja

68 Gagasan

72 Liputan Khusus

80 Portal Kominfo

88 Kominfo Daerah

98 OpiNext

100 Foto Esai

106 Q&A

112 Lintas Kominfo

118 Top 10 Hoaks



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



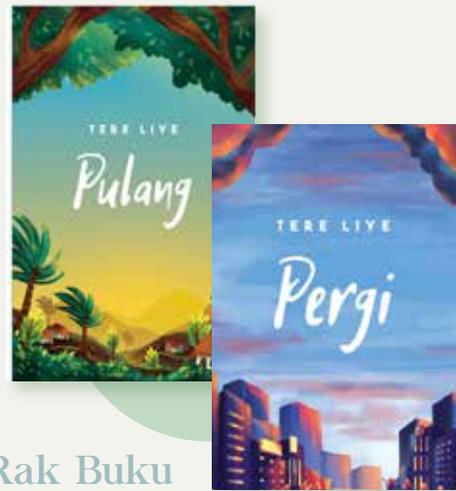
Rak Buku

Penulis :
Alois Wisnuhardana

Cerita dari Sudut Istana

Kisah Tentang Peristiwa dan Berita yang
Menghiasi Panggung Media

Topik yang diangkat oleh penulis dalam buku ini sangat beragam, mulai dari masalah tenaga kerja asing, utang luar negeri, Asian Games, imunisasi, pencegahan stunting, sampai dengan ancaman krisis ekonomi. Buku ini dapat menjadi bahan pelajaran cara mengemas sebuah topik atau peristiwa menjadi kekuatan yang positif bagi pembaca, agar mendapat informasi yang tepat serta mengurangi penyesatan informasi. Tak hanya itu, lewat buku ini pembaca bisa membaca dengan membangun persepsi sebagaimana diharapkan dari sebuah peristiwa, program atau, kebijakan.



Rak Buku

Penulis :
Tere Liye

Pulang-Pergi

Ada jodoh yang ditemukan lewat tatapan pertama. Ada persahabatan yang diawali lewat sapa hangat. Bagaimana jika takdir bersama ternyata, diawali dengan pertarungan mematikan? Lantas semua cerita berkelindan dengan pengejaran demi pengejaran mencari jawaban?



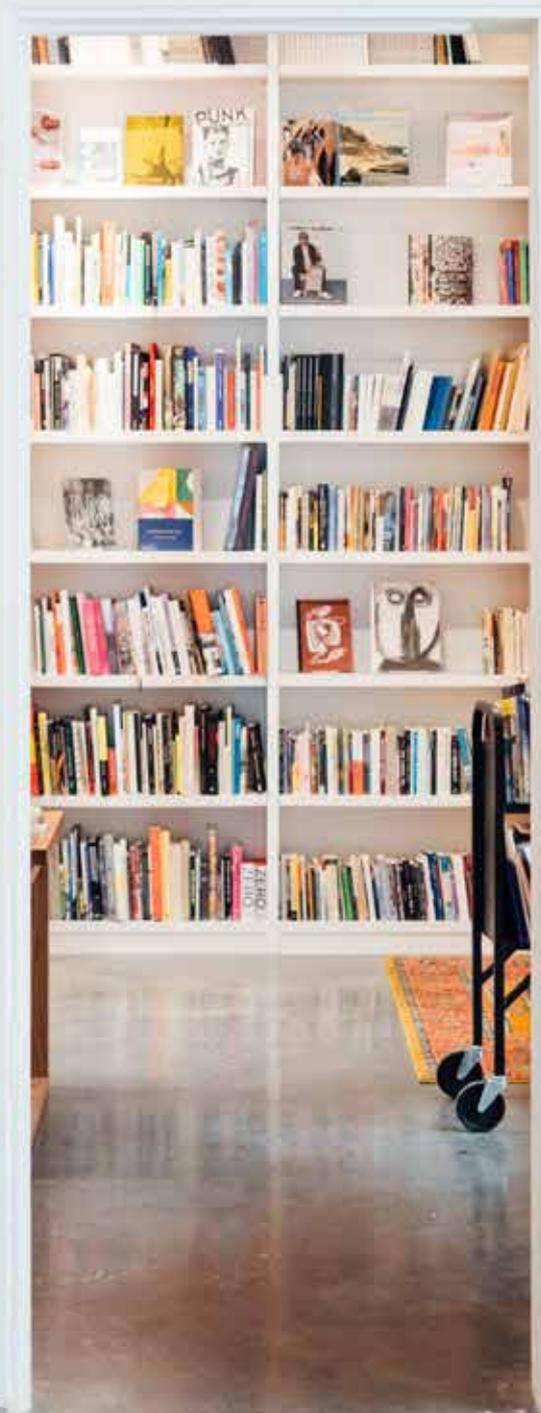
Penulis :
Jung Eun-Gwol

The Moon That Embraces The Sun 1

Bagi Lee Hwon, Putra Mahkota Dinasti Joseon, hanya ada satu wanita dalam hidupnya, yaitu Yeon Woo, putri bangsawan yang anggun, menawan, yang selalu membawa harum bunga anggrek. Namun, bagai matahari dan bulan, Hwon dan Yeon Woo tak bisa saling merengkuh di langit yang sama. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Yeon Woo meninggal karena penyakit mematikan, dan Hwo pun terpaksa menyunting wanita lain untuk dijadikan Permaisuri.

Sumber Foto :

Unsplash



Komunikasi

Bebas Konflik

Lida Noor Meitania,
Pranata Humas Ahli Muda

Subkoordinator Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Sosial, Ditjen IKP

Buku ini menarik dibaca karena Hiromi Yamasaki, penulisnya, tidak menggurui mana yang benar dan salah, karena pola komunikasi setiap orang berbeda. Pola komunikasi setiap orang berbeda dalam hal tindakan, pemikiran, dan emosinya. Pola komunikasi tidak dibedakan superior dan inferior. Jika kita tidak memahami pola yang berbeda, maka kita memaksakan pola diri kita kepada orang lain dan akhirnya menimbulkan konflik dengan orang lain.

Menurut Yamasaki, jika dalam satu kelompok orang terdiri dari 10 orang, tidak mungkin kita bisa cocok dengan kesepuluh orang tersebut. Umumnya, hanya 20% saja yang dirasa cocok, biasa saja 60%, dan tidak cocok sebanyak 20%. Jadi, pasti di mana pun kita berada, pasti akan menemukan orang yang dirasa sulit untuk dihadapi atau dirasa tidak cocok. Sama seperti apa yang dialami sehari-hari di tempat kerja? Buku ini memang mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh penulis selama menjadi *coach* komunikasi.

Selama kita bekerja tentu saja tidak bisa memilih atasan, rekan sejawat, atau bawahan. Jadi, apa yang bisa dilakukan dalam berkomunikasi bebas konflik? Langkah pertama dalam komunikasi bebas konflik dengan orang lain, bukan dengan mengubah orang lain melainkan mengenal diri sendiri. Dengan mengetahui pola diri sendiri, maka dapat memilih pola yang berbeda dari biasanya.

Setelah mengenal diri sendiri, selanjutnya Yamasaki menyampaikan hal-hal penting yang berguna untuk membuat pekerjaan dalam tim yang beranggotakan beberapa orang agar lebih baik dan lancar. Manusia memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya. Mengakui eksistensi lawan merupakan hal penting dalam hubungan dengan orang lain. Caranya bisa dengan hal sederhana seperti mulai menyapa dan menyebutkan nama orang. Yang penting adalah bagaimana lawan bicara merasa tenang ketika berhubungan dengan anda.





Book Review



Komunikasi Bebas Konflik

(Nigatena Hitoga Kini Naranakunaru Hon)

Penulis :

Hiromi Yamasaki

Penerbit :

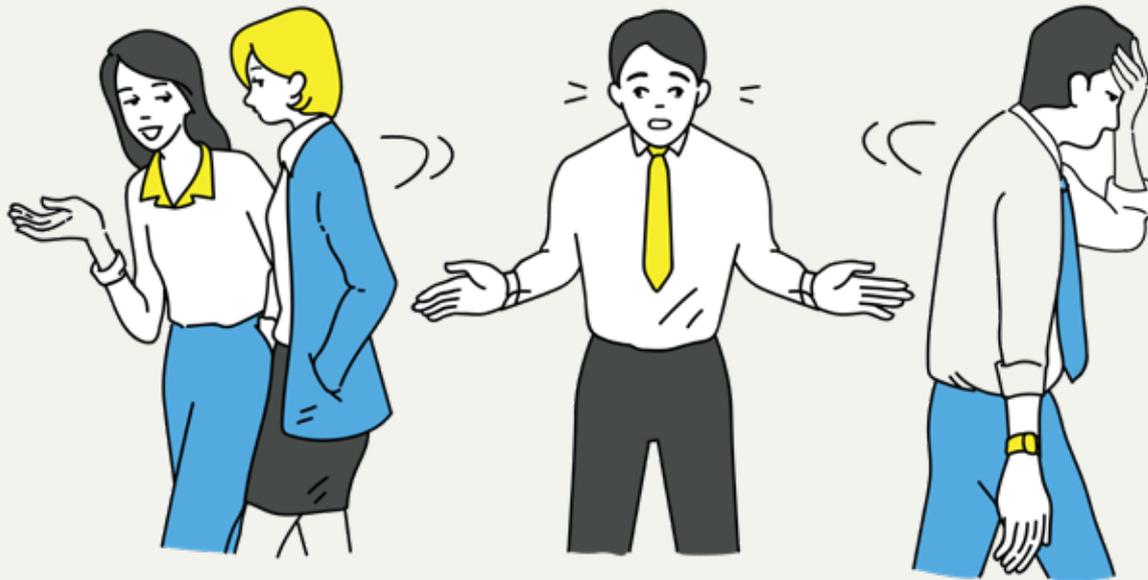
Gramedia

Saat pekerjaan berjalan lancar, kita juga akan mendapat perhatian dan penghargaan dari orang-orang sekitar, sehingga secara psikologis kita jadi bersemangat dan bisa berusaha sesuai kemampuan. Tapi di saat pekerjaan tidak berjalan lancar, adanya pengakuan eksistensi menjadi penting.

Meskipun orang tidak berhasil mencapai angka capaian kinerja, tanpa melalaikan tugas dan terus berusaha maka perlu diperhatikan usahanya daripada hasilnya. Setiap orang pasti punya sesuatu yang cemerlang. Orang yang bisa menemukan dan memunculkannya akan bisa menjadi pemimpin yang baik.

Lalu ucapkan terima kasih, karena ucapan terima kasih membawa pengaruh. Meskipun ucapan terima kasih memang hal yang lazim, tapi tidak banyak orang yang bisa mengucapkannya dan menyampaikannya dengan baik. Contohnya, ucapan "berkat materi buatanmu yang mudah dipahami, presentasi jadi berjalan lancar" akan mudah membuat lawan bicara merasa dirinya berguna dibandingkan ucapan "terima kasih sudah menyiapkan materinya". Pada

Bab ketiga, Yamasaki memperkenalkan satu kasus kesuksesan dengan saling memanfaatkan kelebihan masing-masing orang dalam satu tim. Seorang karyawan laki-laki yang lebih muda bekerja dengan sangat unggul, ingin melakukan perubahan di tempatnya bekerja. Namun, karena kantornya kuat kecenderungannya untuk melakukan pekerjaan seperti sebelum-sebelumnya, ia selalu melawan dengan bicara blak-blakan, "Kenapa cara kerjanya seperti itu? Kalian kerja lihat ke mana sih?" Akibatnya, atasannya menganggap ia kurang ajar yang kemudian menjadi siklus perselisihan dengan orang-orang di sekitarnya.



Saat karyawan laki-laki itu bekerja sama dalam satu tim dengan karyawan perempuan yang tugasnya melakukan perencanaan dan mengelola acara, karyawan perempuan tersebut mulai mengakui dan mengatakan "luar biasa" dan "kau punya bakat". Begitu juga dengan karyawan laki-laki tersebut, sedikit demi sedikit jadi berbalik mengutarakan kelebihan karyawan perempuan tadi dengan mengatakan "senior berbakat untuk ini". Mereka berdua saling memahami kelebihan masing-masing dan dampak dari saling memperkuat ini jadi memberikan lebih banyak hasil. Mereka berdua satu tim dan bisa membuat beberapa rencana baru yang belum pernah ada sebelumnya.



Selain mengakui kelebihan orang, mengakui kelemahan diri sendiri dan menerima bantuan dari orang lain akan mengurangi konflik. Bagaimana langkah lainnya untuk berhubungan dengan orang lain tanpa menggunakan energi konfrontasi? Buku setebal 145 halaman ini dibagi ke dalam enam bab yang enak dibaca.

Bahkan, penulis buku ini juga memberikan contoh konflik komunikasi di tempat kerja dengan ilustrasi komik yang menarik seperti sedang membaca komik Jepang, menghibur dan tidak kaku. Meskipun buku ini membahas hal yang serius, penting, dan terjadi sehari-hari di kehidupan pekerjaan, Yamasaki mengemas dan menyampaikannya secara luwes dan tidak kaku. Di akhir

setiap bab buku ini ada semacam kertas kerja untuk membantu pembaca mempraktikkannya di lingkungan kerjanya.

Buku ini cocok untuk kita yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memudahkan berhubungan dengan orang-orang baik internal sivitas maupun ketika berhubungan dengan mitra kerja bahkan dengan masyarakat. Tidak hanya cocok dibaca oleh para pegawai, buku dengan rating buku 15+ ini juga cocok dibaca pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga.

Saat ini, baca buku itu mudah. Saya pinjam secara daring melalui aplikasi Ruang Buku Kominfo dari Perpustakaan Kominfo. Buku setebal 150 halaman ini jika diunduh ada sebesar 36,8 MB. Sama dengan peminjaman buku langsung ke perpustakaan Kominfo, buku ini hanya ada dua eksemplar. Pinjam bukunya pun terbatas waktunya selama 14 hari. Jika sudah sampai batas waktu peminjaman buku, secara otomatis akan hilang dari aplikasi di perangkat kita. Jika ingin punya buku terbitan Gramedia Pustaka Utama ini secara fisik bisa diperoleh di toko buku kesayangan dengan harga sekitar Rp71.500,00 sampai dengan Rp78.000,00.



TEKNO LOGI & GAD GET

Nenek moyangku seorang pelaut
Gemar mengarung luas samudera
Menerjang ombak, tiada takut
Menempuh badai sudah biasa

Peralatan Terkini Para Pelaut

Penggalan lagu tersebut terdengar sangat familiar bagi kita. Lagu ini sudah menjadi semacam lagu wajib di masa kecil yang sering diperdengarkan orang tua dan guru kita. Inspirasi lagu ini berasal dari tradisi bangsa Indonesia di jaman dahulu sebagai negara maritim, di mana masyarakatnya berprofesi sebagai pelaut. Saat ini, lagu ini masih terasa relevan dengan kondisi geografis negara kita yang terdiri dari wilayah kepulauan, yang membutuhkan peran 'pelaut' dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.

Apresiasi terhadap para pelaut disajikan dengan diperingatinya Hari Pelaut Sedunia setiap tanggal 25 Juni. Dilansir dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Hari Pelaut Sedunia pertama kali diperkenalkan pada Amandemen Manila di bulan Juni 2010 oleh konvensi STCW, di mana tepat pada tanggal 25 Juni 2010, amandemen tersebut secara resmi diadopsi. Konvensi STCW sendiri merupakan konvensi internasional tentang standar latihan, sertifikasi, dan dinas jaga untuk pelaut yang menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira, dan petugas penjaga di atas kapal niaga yang berlayar.

Para pelaut, salah satunya terkenal dengan peralatan-peralatannya selama melaut yang juga diadaptasi profesi lainnya, seperti kompas, teropong sampai dengan cara membaca bintang untuk bisa menentukan arah berlayar. Perkembangan teknologi, tentunya mengubah peran peralatan berlayar ini untuk bisa lebih membantu para pelaut dalam melaksanakan tugasnya mengarungi lautan luas. Apa saja *gadget* terkini para pelaut, yuk kita simak bersama Sobatkom!



Sumber Foto : Unsplash

EPIRBs

Emergency Position-Indicating Radio Beacons (EPIRBs) merupakan perangkat yang membuat para pelaut merasa lebih aman ketika sedang berlayar. EPIRBs merupakan *transmitter* yang digunakan untuk melacak dengan berkomunikasi dengan layanan Cospas-Sarsat. Cospas-sarsat sendiri merupakan satelit internasional yang digunakan untuk operasi *Search and Rescue* (SAR).

Pada dasarnya, EPIRBs bisa dioperasikan secara manual. Namun, *transmitter* ini juga bisa aktif secara otomatis pada keadaan darurat, seperti misalnya ketika pada kondisi kapal tenggelam/terbalik. *Beacon* pada EPIRBs akan mengirimkan sinyal yang dimonitor oleh sistem satelit dunia, untuk membantu dalam proses pencarian para pelaut.

Sejak Cospas-Sarsat dioperasikan tahun 1979, **sistem ini telah menyelamatkan 10.000-an lebih para pelaut yang mengalami kondisi kedaruratan selama berlayar.**



Garmin MARQ Captain

Smartwatch tidak lepas untuk menjadi aksesoris sekaligus peralatan multifungsi bagi pelaut. Tak terkecuali *smartwatch* besutan Garmin, yaitu Garmin MARQ Captain. Jam yang khusus dibuat untuk mengarungi lautan ini, memiliki fitur-fitur yang bisa membantu para pelaut dalam melakukan pelayarannya. Dalam mode *smartwatch*, baterai jam ini bertahan hingga 12 hari. Adapun dalam mode GPS, jam ini terhitung awet, dengan daya baterai mencapai 28 jam.

Fitur utama dari jam ini yaitu *Boating Features* yang sangat efektif digunakan dalam lomba layer. Jam ini bisa membantu pelaut untuk bisa memilih jalur dan posisi yang paling efektif berdasarkan parameter-parameter waktu dikombinasikan dengan *enhanced GPS*

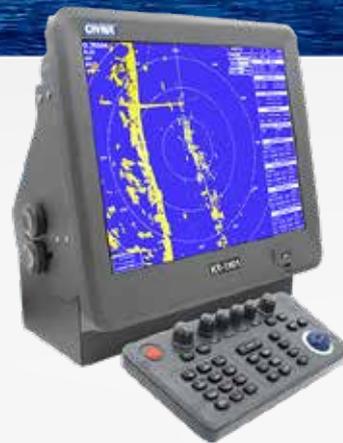


Selain itu juga, jam ini juga **bisa membaca arah angin** untuk bisa memberikan informasi kepada pelaut apakah pada posisi ini pelaut melawan ataupun mengikuti arah angin.

ARPA

Automatic Radar Plotting Aid merupakan alat untuk menampilkan posisi kapal dan kapal-kapal lain di sekitarnya. Ketika posisi kapal serta kapal lain disekitarnya sudah tercatat, ARPA bisa menentukan jalur pelayaran untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan kapal lain. Alat yang merupakan salah satu teknik navigasi dalam dunia pelayaran.

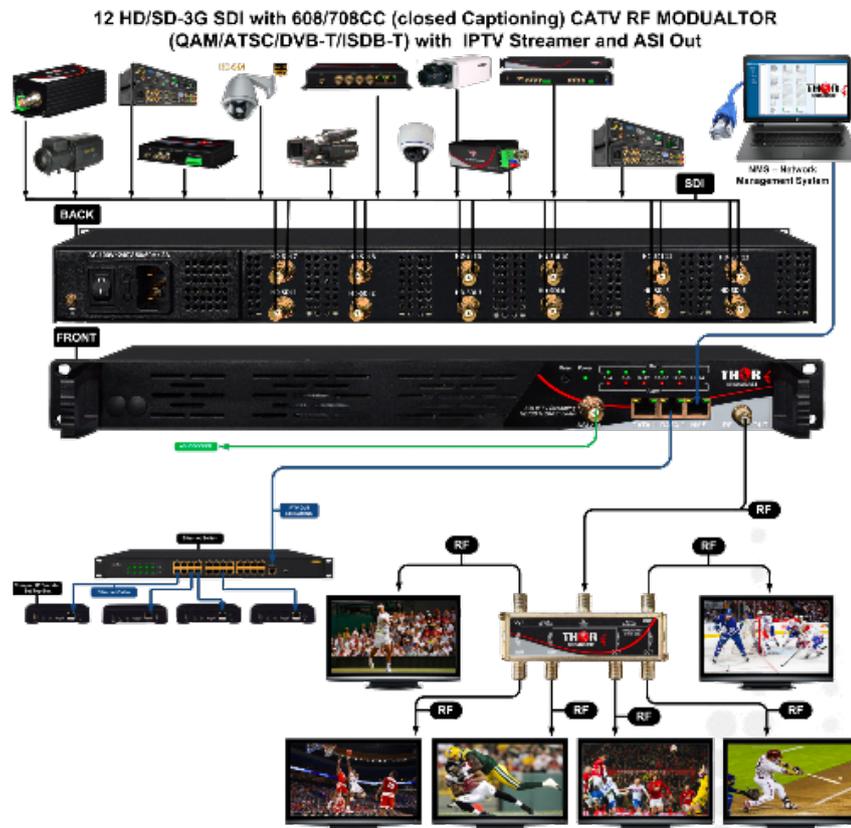
Selain itu juga, ARPA juga berguna untuk memonitor suatu area dari suatu mercusuar ataupun jembatan. Secara konstan, ARPA memonitor kapal, objek statis ataupun objek-objek terapung lainnya dan memberikan panduan kecepatan terhadap kapal-kapal yang akan melewati jembatan tersebut.



Parameter-parameter yang terdapat pada ARPA dinilai efektif untuk bisa mengurangi terjadinya kecelakaan di perairan.

Sumber Foto : Unsplash

Multipleksing



Halo SobatKom! Setelah beberapa edisi lalu kita membahas seputar perbedaan siaran televisi (TV) digital dengan TV analog, edisi kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu hal penting dalam proses perpindahan siaran analog ke digital, yaitu multipleksing (MUX).

Istilah multipleksing merujuk pada piranti, sebuah alat teknis yang memiliki fungsi untuk mengemas pancaran beberapa konten siaran menjadi satu buah pancaran frekuensi. Pada teknologi multipleksing, sebagian pancaran frekuensi analog atau digital digabung menjadi satu pancaran frekuensi saja, dari banyak input menjadi satu *output*.

Alat yang menerapkan multipleksing disebut multiplekser (MUX), yang mampu mengolah input konten siaran dengan jumlah bisa mencapai sepuluh buah menjadi hanya satu buah saja. Sementara alat yang menerapkan proses yang berlawanan disebut demultiplekser, (DEMUX).



Saluran multipleksing merujuk pada kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran. Sementara yang dimaksud dengan penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi dua program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan.

Nah, tahukah Sobatkom, program-program stasiun TV yang SobatKom tonton di rumah saat ini bersiaran secara *simulcast*, yaitu pemancaran siaran TV analog dan TV digital pada saat yang bersamaan, dengan menggunakan teknologi multipleksing.

Multipleksing umumnya digunakan untuk berbagi sumber daya yang mahal atau terbatas, contohnya frekuensi. Pada sistem penyiaran analog yang sekarang masih berjalan, setiap stasiun televisi menyalurkan siarannya dalam satu frekuensi. Satu frekuensi berisi satu buah konten yaitu suara, gambar, dan data, yang membutuhkan ruangan misalnya sebesar 8 MHz.

Sementara di penyiaran digital, MUX dapat mengemas yang semula membutuhkan 8 MHz menjadi jauh lebih kecil. Artinya

dengan MUX, tempat yang tadinya diisi satu konten penyiaran dari stasiun televisi, bisa diisi setidaknya 5 konten siaran dengan kualitas *high definition* (HD), atau 13 konten siaran dengan kualitas *standard definition* (SD). Itulah transformasi yang terjadi dalam sistem TV Digital.

Lalu, bagaimana cara kerja MUX sehingga bisa melakukan pengemasan sinyal penyiaran menjadi ringkas, mengatur sepuluh konten siaran dengan rapi?

Setidaknya ada dua cara pengaturan. Pertama pengaturan berdasarkan waktu, contohnya seperti anak-anak berbaris satu persatu masuk ke kelas. Dalam dunia digital, pengaturan waktu tidak membuat siaran terputus karena jeda hanya seper mili detik. Artinya sangat cepat hingga tidak terasa. Dalam sistem analog, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Karena kontennya sebesar gajah. Sedangkan konten di dalam digital sudah diubah menjadi seper seribu kali semut.

Cara kedua yang dipakai oleh MUX adalah pengaturan "gelombang". Waktu pemancarannya bersamaan, tetapi tidak terjadi

tabrakan satu dengan lain karena "gelombang"-nya dibedakan. Hal ini mungkin dilakukan karena teknologi digital beroperasi pada gelombang yang sangat kecil.

Penyelenggaraan multipleksing menjadi infrastruktur penting dalam ekosistem televisi digital terestrial. Dalam siaran televisi analog yang selama ini digunakan, Lembaga Penyiaran harus membangun dan mengoperasikan infrastruktur pemancar secara sendiri-sendiri. Setiap pemancarnya pun menggunakan kanal frekuensi radio masing-masing yang menyebabkan inefisiensi ganda, baik dari segi investasi infrastruktur yang besar, dan penggunaan spektrum frekuensinya boros.

Dengan migrasi ke televisi digital, ketidakefisienan akan teratasi melalui *infrastructure sharing* dalam multipleksing. Dengan berbagi infrastruktur, satu kanal frekuensi dalam pengoperasian multipleksing dapat menyiarkan hingga sepuluh program secara bersamaan. Hal ini akan berimplikasi pada biaya infrastruktur yang lebih efisien, serta penghematan spektrum frekuensi untuk keperluan seperti pemanfaatan pita lebar jaringan telekomunikasi seluler.





Kominfo Siapkan 5 Program Prioritas Tahun 2022

untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan lima program prioritas pada tahun 2022 mendatang untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital.

"Tema tersebut dipilih dengan tujuan agar pembangunan di tahun 2022 dapat menjadi landasan transformasi ekonomi Indonesia," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI dengan tajuk "RKA dan RKP Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2022", di Ruang Rapat Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/06/2021).

Dalam pelaksanaan RKP tahun 2022, Kementerian Kominfo mengimplementasikan pengembangan

sumber daya manusia, infrastruktur TIK, ekonomi, serta pelayanan publik. "Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* yang berhubungan dengan isu transformasi digital melaksanakan implementasi *major project* transformasi digital untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital di Indonesia," tutur Menteri Johnny.

Menteri Johnny mengatakan fokus pelaksanaan akselerasi transformasi digital tersebut menjadi dasar perancangan program kerja Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022. "Program kami di tahun 2022 nanti merupakan keberlanjutan program tahun 2020 dan tahun 2021 sebagai pelaksanaan dari arahan Presiden yang berhubungan dengan transformasi digital, di antaranya; percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan



komunikasi publik termasuk melalui platform digital." paparnya.

Upaya-upaya tersebut diturunkan ke dalam lima program strategis, di antaranya; program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, program pengelolaan spektrum frekuensi, perangkat dan layanan publik, program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, program komunikasi publik, serta program dukungan manajemen.

Program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan implementasi prioritas nasional yang meliputi upaya percepatan pembangunan *Base Transceiver Station (BTS) last mile* infrastruktur. Kedua, integrasi Palapa Ring. Ketiga, penyediaan akses internet. Keempat, penyediaan kapasitas

satelit. Kelima, penggelaran Internet 4G. Keenam, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi dan penyiaran, serta yang ketujuh adalah upaya digitalisasi penyiaran.

Bangun Infrastruktur Digital

Menkominfo menyatakan percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Untuk itu, beberapa inisiatif baru Kementerian Kominfo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, antara lain diwujudkan dengan penyediaan Base Transceiver Station yang saat ini telah beroperasi sebanyak 1.682 BTS aktif. "Di tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS, saat ini sedang dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, penyelesaian pembangunan BTS hingga tahun 2024 nanti diharapkan total keseluruhan sebanyak 9.586 BTS telah terbangun dan beroperasi penuh. "Selain BTS, Palapa Ring pada tahun 2021 memiliki total jaringan sepanjang 12.229 km," ungkapnya.

Mengenai penyediaan akses internet, Menkominfo menjelaskan penyediaan akses internet baru saat ini berjumlah 4.574 titik pada tahun 2021. Data tersebut melengkapi 11.817 titik akses internet yang telah tersedia sebelumnya.

"Di Tahun 2022 akan dilakukan penggelaran akses 22.000 titik secara masif dan terus meningkat tiap tahunnya hingga tersedia 78.391 titik akses internet pada akhir tahun 2024 nanti," tandasnya.

Berkaitan dengan optimasi pemanfaatan Palapa Ring tahun 2022 juga akan dilakukan integrasi Palapa Ring Integrasi dengan usulan total jaringan sepanjang 12.083 km atau sekitar 40%. Adapun masing-masing terdiri dari 8.203 km kabel darat dan kabel laut sepanjang 3.880 KM.

"Konstruksi dan penggelaran yang akan dilakukan dari tahun 2021 dan 2022 sampai dengan tahun 2023 meliputi nilai total *capital expenditure* sekitar Rp8,6 triliun dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk tahun 2022 dan Rp5,1 triliun di tahun 2023," jelas Menteri Johnny. Sedangkan untuk penyediaan kapasitas satelit, Menkominfo menyebutkan saat ini telah tersedia dan beroperasi satelit berkapasitas 21 *gigabyte per second* (Gbps). "Di tahun 2021, Kominfo akan menambahkan kapasitas sebesar 9 Gbps, tahun 2022 dilakukan penambahan 7 Gbps. Dan sampai tahun 2024 nanti akan tersedia kapasitas satelit sekitar 117 *gigabyte per second*," ujarnya.

Selanjutnya, program Pusat Monitoring Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Menurut Menteri Johnny, pada tahun 2021 pengukuran *quality of service* layanan telekomunikasi akan menjangkau 514 kabupaten dan kota. Sedangkan di tahun 2022 akan dilakukan penambahan *dashboard* yang menyediakan data pos dan penyiaran. "Sehingga di tahun 2024 diharapkan pusat monitoring pos, telekomunikasi, dan penyiaran beroperasi maksimal, jelasnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah menargetkan *Analog Switch Off* (ASO) dalam program digitalisasi penyiaran pada 2 November 2022 nanti. Salah satu yang disiapkan dengan mendorong digitalisasi penyiaran melalui penyediaan peralatan di 15 wilayah yang belum melakukan penyelenggaraan penyiaran multipleksing. "Selain itu juga melakukan revitalisasi di 206 lokasi pemancar TVRI, dan memberikan *set top box* untuk beberapa rumah tangga yang membutuhkan," paparnya.





5G dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi



Untuk prioritas kedua, Menteri Johnny mengatakan pihaknya berfokus pada program pengelolaan spektrum frekuensi, perangkat dan layanan publik yang mencakup pengelolaan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi, sistem monitoring frekuensi radio, serta pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Menteri Johnny menyatakan guna mendukung dan menyambut era baru yaitu teknologi 5G, Kementerian Kominfo melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio. Menurut Menkominfo, spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai oksigen dalam implementasi 5G. Tahun ini upaya *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio untuk mendorong percepatan pemerataan jaringan 5G dan 4G.

Pada tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pembebasan frekuensi baru untuk *mobile broadband* sebanyak 90 Mhz, sehingga total tambahan

spektrum frekuensi mencapai 120 Mhz. Pada tahun 2022, lanjutnya, Kominfo berencana menambah frekuensi *mobile broadband* sebanyak 1.000 Mhz, sehingga total *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi mencapai 1.120 Mhz. Sedangkan untuk tahun 2024 tambahan 190 Mhz, maka total *farming* dan *refarming* mencapai 1.310 Mhz. "Tambahan spektrum



frekuensi akan mempercepat pemerataan jaringan 5G di Indonesia," ujarnya.

Sementara program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ungkap Menkominfo, sebagai bentuk

implementasi prioritas nasional nomor tiga yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem serta ruang digital yang aman dan produktif.

Pelaksanaan program ini berupa upaya percepatan pembangunan pusat data nasional, penyelenggaraan aplikasi *cloud* untuk *electronic government*, upaya pengembangan Digital Talent Scholarship, pengembangan startup digital, pelaksanaan inisiatif adopsi teknologi digital di sektor strategis, pengembangan *smart city*, penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi, dan rebranding Sekolah Tinggi Multimedia (MMTC) Yogyakarta Kominfo menjadi institut digital nasional atau pengembangan STMM menjadi institute digital nasional.

Untuk mewujudkan Pemerintahan digital atau e-government, Menkominfo menyatakan telah menyiapkan pembangunan pusat-pusat data yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda, pusat data besar yang akan menggunakan *cloud technology* untuk server dan pelayanan Pemerintahan digital.

"PDN akan dimulai pembangunan di lokasi pertama di Jabodetabek pada tahun 2021. Tahun 2022 direncanakan akan dilakukan penambahan satu lokasi baru, sehingga tahun 2024 akan beroperasi dua pusat data nasional yang mampu melayani 75% instansi kementerian, lembaga dan daerah," imbuhnya.

Untuk lokasi kedua, Kementerian Kominfo sedang melakukan pemeriksaan di wilayah Batam. Ketiga, di lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di Balikpapan untuk Wilayah Indonesia Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur. "Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan," ungkap Menteri Johnny.

Optimasi Ekonomi Digital

Menurut Menkominfo, pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

"Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangsa Buatan Indonesia. "Di samping itu, kita tentu berharap bahwa selain dari UMKM ada sektor-sektor yang lain yang harus masuk untuk mendukung itu. Seperti misalnya industri dan pariwisata, sektor perdagangan digital e-commerce kita harus dorong besar-besaran," paparnya.

Menkominfo menyatakan, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dapat menghasilkan unicorn dan startup digital di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi

perindustrian, media hiburan (digital broadcasting), pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta real-estate atau perkotaan digital.

"Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan berulang kali kepada kita bahwa digital space kita di sisi digital economy harus dimanfaatkan terutama untuk digital economy nasional kita yang saat ini sekitar USD44 miliar dan diproyeksikan di tahun 2025 lebih dari USD124 miliar atau setara dengan 40% dari nilai digital economy ASEAN," tegas Menkominfo.

Kembangkan Talenta Digital

Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri. "Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk global technology companies, e-commerce atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar," paparnya.

Untuk menyiapkan masyarakat digital, Kementerian Kominfo telah melaksanakan program Gerakan Nasional Literasi Digital, yang ditargetkan dapat meliterasi 12,5 juta masyarakat agar memiliki kecakapan digital di tahun 2021. "Pengembangan SDM digital nasional terdiri dari tiga layer yakni tingkat *basic*, *intermediate*, hingga tingkat *advance*. Pekerjaan yang tiada akhir dan terus-menerus. Di tingkat *basic*, terdapat program gerakan literasi digital Siberkreasi



Kementerian Kominfo," papar Menkominfo.

Lebih lanjut, pada tahun 2022 juga direncanakan 12,4 juta lokal champion, sehingga sampai dengan tahun 2024 diharapkan terdapat 50 lokal champion literasi digital. Di tingkat intermediate atau tingkat menengah, Kementerian Kominfo melaksanakan Digital Talent Scholarship (DTS) yang pada tahun ini targetnya sebesar 100.000 peserta dan di tahun 2022 hingga 2024 ditargetkan 200.000 per tahunnya yang tersertifikasi.

Upaya peningkatan target ini dibicarakan secara trilateral bersama Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo. "Ini bagi para sarjana atau yang berijazah sarjana dan yang berijazah Sekolah Menengah Atas, kelompok atau milenial grup Indonesia," jelasnya. Bahkan, di tingkat lanjutan atau advance, Kominfo menyelenggarakan Digital Leadership Academy (DLA). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecakapan di tingkat C-Level atau pimpinan baik di sektor privat maupun pemerintahan. Pelatihan ini akan dilakukan dengan mitra penyedia program executive yang berasal dari instansi pendidikan bertaraf Internasional, seperti National University Singapore, Harvard University, Tsinghua University. Setiap tahun sekitar 300 peserta ditargetkan mengikuti pelatihan ini yang terdiri dari 150 peserta dari sektor Pemerintah dan 150 peserta dari sektor privat.



Pendampingan Startup

Lebih jauh, Menteri Johnny menjelaskan fasilitas adopsi teknologi digital yang dilakukan Kominfo ditujukan sebagai upaya pemanfaatan untuk sektor-sektor strategis dan salah satunya startup-startup digital. "Pada tahun 2021, Kementerian Kominfo melakukan pendampingan startup di bidang *e-commerce*, *financial technology*, kesehatan, pertanian dan beberapa lainnya," jelasnya.

Target dari kegiatan tersebut adalah tercapainya total 35 startup digital aktif baru dan terfasilitasinya 50 startup digital dalam kegiatan *Business Matchmaking* dengan investor dan korporasi BUMN untuk meningkatkan akses-akses pendanaan.

Menkominfo menambahkan, di tahun 2022, Kominfo juga menargetkan 70 startup digital aktif, sehingga sampai dengan tahun 2024 diharapkan bersama-sama 150 startup digital aktif dan terdapat 200 *startup* dipertemukan dengan investor melalui mekanisme *Business Matchmaking*.

Pengendalian Tata Kelola PSE dan Rebranding STMM

Menyoal peningkatan pengendalian dan tata kelola PSE, telah dilakukan melalui sistem pengadaan system pengendalian tata kelola konten dan aplikasi di 6 ISP sebesar 4,3 Tbps. Di Tahun 2022 juga akan dilakukan kembali sistem pengadaan dan pengendalian tata kelola konten dan aplikasi di 10 ISP dengan trafik akumulatif 7,3 Tbps.

"Dengan demikian, pada tahun 2024 Kementerian Kominfo akan memiliki sistem pengendalian dan tata kelola PSE yang mampu melakukan pengendalian terhadap *traffic* 7,3 Tbps tersebut," tutur Menkominfo.

Inisiatif Kementerian Kominfo lainnya di tahun 2022 yaitu pengembangan Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta menjadi institut digital nasional yang bertujuan untuk mengisi kebutuhan talenta digital di level hilir dengan penguatan kurikulum, antara lain; teknologi digital, komunikasi dan media digital, ekonomi digital, serta tata kelola dan kebijakan-kebijakan digital.

"Ini bekerja sama dengan ekosistem, di Kementerian Pendidikan, perusahaan teknologi yang menjadi mitra kementerian-kementerian teknis lain. Tentu kerja sama untuk membangun basis dari keahlian-keahlian digital kita dan Kominfo tengah menyiapkan metamorfosa lembaga pendidikan melalui Sekolah Tinggi Multi Media yang diharapkan nanti menjadi Institut Digital Nasional dengan prodi-prodi baru," tegas Menteri Johnny. Dengan demikian, Kominfo berharap STMM tidak hanya terkait dengan kurikulum multimedia namun juga sebagai pusat riset unggulan.

Komunikasi Publik

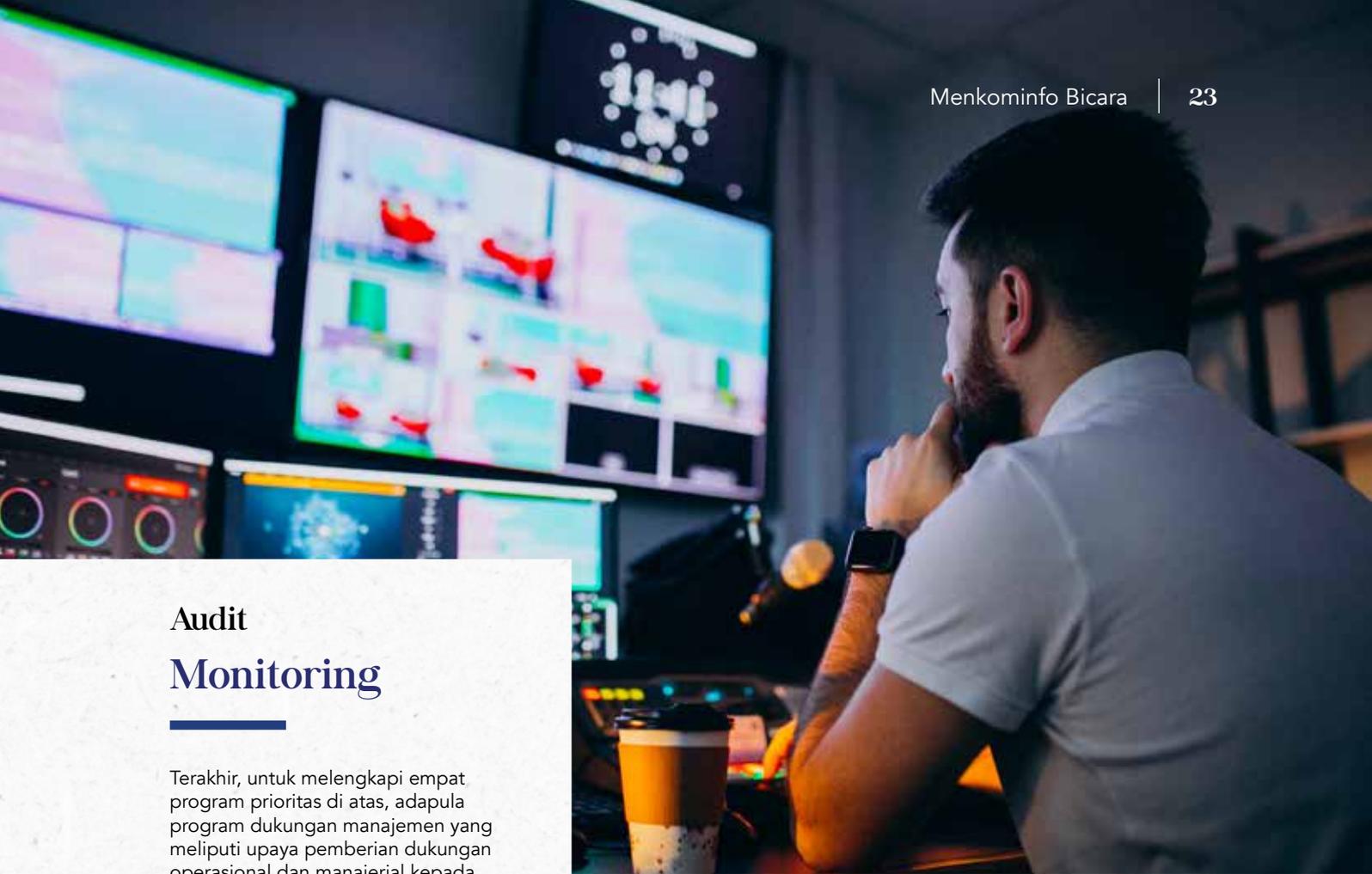
Untuk fokus prioritas keempat, Kominfo menitikberatkan pada pelaksanaan program komunikasi publik. Menurut Menteri Johnny hal ini bertujuan sebagai langkah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPC-PEN) sejak tahun 2020 secara berkelanjutan.

Di samping itu, adapula pemberian dukungan sosialisasi kegiatan-kegiatan internasional termasuk KTT G-20 di mana Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Penyelenggara Presidensi di Indonesia Tahun 2022.

Menteri Johnny juga menyampaikan langkah Kementerian Kominfo dalam menyiapkan komunikasi publik untuk Pertemuan G-20 tahun depan. Berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2021, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk bidang komunikasi dan media dalam Gelaran G-20 Summit ke-15 di Riyadh tahun 2022 mendatang.

"Sejauh ini Kementerian Kominfo Kominfo tentu siap membangun persiapan kerjasama bersama-sama untuk komunikasi publik G-20 dengan lembaga lembaga penyiaran pers, baik cetak maupun online di dalam negeri, regional, dan di tingkat internasional secara khusus dengan negara-negara anggota G-20," ungkapnya.

Lebih dari itu, Menteri Johnny menyatakan kementerian yang dipimpinnya turut memberi dukungan sosialisasi digitalisasi dan promosi penyiaran atau *Analog Switch Off* (ASO), diseminasi informasi bidang polhukam, perekonomian dan maritim serta pembangunan manusia dan kebudayaan.



Audit Monitoring

Terakhir, untuk melengkapi empat program prioritas di atas, adapula program dukungan manajemen yang meliputi upaya pemberian dukungan operasional dan manajerial kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, koordinasi pengembangan Kementerian Kominfo sebagai leading sektor transformasi digital, pengawasan intensif dan berkelanjutan melalui program prioritas (*continuous audit continuous monitoring*) oleh aparat pengawasan internal, pengawasan percepatan digitalisasi nasional, serta pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan publik.

Tambahan Anggaran

Menutup pemaparannya, dalam rapat itu Menteri Johnny meminta tambahan anggaran sebesar Rp20,3 Triliun di 2022. Anggaran tersebut, sambungnya, dibutuhkan untuk percepatan akselerasi transformasi digital.

Menteri Johnny memaparkan, untuk tahun anggaran 2022, Kominfo mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 21,758 T. Alokasi ini, lanjut Menkominfo, sesuai surat bersama pagu

indikatif kementerian lembaga (K/L) dalam tahun anggaran 2022 dari Kemenkeu dan Kementerian BPN/Bappenas tanggal 29 April 2021. Namun, anggaran itu belum memenuhi kebutuhan anggaran di Kominfo. "Namun, penghitungan kami menunjukkan bahwa 2022 nanti kebutuhan anggaran sekitar Rp 42 triliun. Dengan demikian, kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun," paparnya.

Orang nomor satu di Medan Merdeka Barat 9 itu menjelaskan, kebutuhan anggaran Kominfo merupakan hasil konsolidasi lintas unit di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terbagi ke dalam 5 program utama. "Di antaranya, 2 dari 5 program tersebut sudah terpenuhi pada pagu indikatif. Program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan pelayanan publik di Ditjen SDPPI, Ditjen PPI dan Aptika," urainya.

Oleh karena itu, kata Menteri Johnny, untuk menjalankan agenda transformasi digital di tahun 2022, yang programnya telah diketahui secara luas oleh masyarakat, maka Kominfo memerlukan dukungan anggaran negara sebesar Rp 42,1 triliun dan yang baru masuk pagu indikatif sebesar Rp 21,758 triliun. "Sehingga dicarikan jalan keluar untuk kebutuhan anggaran tersebut sebesar Rp 20,348 triliun," ucapnya.

Oleh karena itu, Menkominfo meminta dukungan dari Komisi I DPR untuk bisa memenuhi dukungan anggaran Kominfo untuk bisa mengagendakan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) nasional. "Mohon dukungan Komisi I DPR dalam penyediaan pendanaan secara lengkap untuk menjalankan agenda pembangunan TIK nasional kita khususnya mendukung transformasi digital yang menjadi arahan presiden," tandasnya.



menggunakan momentum pandemi ini untuk menyiapkan UMKM bisa naik kelas,” imbuhnya.

Presiden mengungkapkan, terdapat peningkatan transaksi penjualan berbasis daring di kisaran 10-15 persen. Hal ini memperkuat kampanye nasional untuk membeli produk-produk UMKM yang terwadahi dalam e-commerce.

“Kita sudah memiliki delapan juta dari 60 juta unit UMKM yang sudah terhubung dengan wadah digital. Kita harus terus mendorong setidaknya jumlah itu selalu bertambah lagi, bisa menjadi 10 juta, bisa 15 juta dan naik lagi 20 juta dan seterusnya,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden menekankan agar pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital untuk pelaku UMKM harus terus diperbanyak. Pemerintah, imbuhnya, sudah mengimplementasikan pelatihan daring melalui program Kartu Prakerja. Program serupa juga bisa dilakukan oleh kementerian/ lembaga (K/L) lainnya bekerja sama dengan komunitas digital.

Partisipasi aktif dari seluruh komunitas digital, imbuhnya, juga sangat dibutuhkan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia, baik melalui investasi pembangunan pusat data, mempercepat program literasi digital, maupun pengembangan talenta digital secara masif.

“Saya yakin dengan kolaborasi yang melibatkan komunitas digital Indonesia, termasuk Microsoft, kekuatan kita akan semakin berlipat ganda. Kekuatan kita akan semakin besar untuk mempercepat proses transformasi digital yang sedang kita lakukan,” ujar Presiden menutup sambutannya. (DND/UN)

Presiden Jokowi:

Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke Rantai Pasok Global

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa transformasi digital harus mampu menjangkau sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga dapat memperluas pangsa pasar dari sektor tersebut. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Microsoft Developer Conference 2021 bertema “Accelerating Indonesia’s Digital Economy” secara virtual, Kamis (25/02/2021).

“Kita juga ingin transformasi digital bisa menjangkau jutaan UMKM di negara kita, Indonesia.

Transformasi digital adalah pintu, pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global,” ujarnya.

Presiden menyampaikan, transformasi digital adalah kunci untuk bertahan di masa pandemi COVID-19. Momentum pandemi ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia, baik pemerintahan digital, ekonomi digital, sampai komunitas hingga infrastruktur digital. “Kita harus mampu

Presiden Jokowi:

Perdagangan Digital Harus Dorong Pengembangan UMKM

Presiden Jokowi membuka Rakernas Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021) pagi. (Foto: Humas Setkab/Teguh)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perdagangan digital harus diarahkan untuk dapat memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (04/03/2021).

“Perdagangan digital harus mendorong pengembangan UMKM kita. Ini manfaatnya sudah kita lihat, kekuatan digital harus dimanfaatkan untuk merangkai antara suplai dari UMKM di seluruh Indonesia dengan pasar nasional dan pasar global. Perdagangan digital harus memberdayakan UMKM kita,” ujarnya.

Presiden menilai terdapat banyak potensi UMKM yang dapat diangkat dan diberikan peluang bahkan hingga mampu mengekspor produknya. Yang kecil-kecil ini kalau diangkat, kalau diberikan peluang, saya melihat banyak sekali. Ada keripik sekarang

bisa, usahanya rumah tangga, bisa ekspor ke Korea, bisa ekspor ke Jepang. Kecil-kecil tapi ini kalau kita detail dan bekerja keras untuk mereka, ini juga bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Namun, untuk mengembangkan UMKM tersebut, imbuh Presiden, diperlukan upaya untuk memperbaiki produk dari sisi kemasan dan merek, mendorong untuk berorientasi ekspor, hingga meningkatkan kapasitas UMKM tersebut.

“Biasanya nanti mulai kacaunya itu kalau sudah menyangkut kapasitas. Ini tugas kita juga untuk mendorong perbankan untuk mau menyuntikkan kepada UMKM kita agar kapasitasnya bisa naik,” ujarnya.

Lebih jauh Presiden mengingatkan, jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM harus segera diatur dan diselesaikan. “Sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, “membunuh” UMKM, diperingatkan. Karena kita harus membela, melindungi dan memberdayakan UMKM kita agar naik kelas. Ini salah satu tugas terpenting Kementerian Perdagangan,” tegasnya.

“

Transformasi digital adalah pintu, pintu masuk agar UMKM bisa masuk dalam marketplace digital dan bisa menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global

”

Kelola Perdagangan Digital dengan Baik



Di hadapan seluruh peserta Rakernas yang hadir secara tatap muka dan juga virtual, Presiden juga meminta agar perdagangan digital dikembangkan dan dikelola dengan baik. "Perdagangan digital adalah sebuah keharusan dan harus dikembangkan, harus dikelola sebaik-baiknya," tegasnya.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, ujar Presiden, harus menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan bermanfaat. Transformasi digital yang dilakukan harus tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. "Indonesia, tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil," tegasnya.

Perdagangan digital yang dilakukan, imbuh Presiden, juga harus dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong produksi dalam negeri sehingga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak terutama UMKM dan para konsumen rumah tangga.

"Saya senang impor turun. Tetapi jangan sampai yang turun itu di barang modal atau bahan baku, yang turun itu di barang-barang konsumsi. Selalu saya lihat detail di Bea Cukai angka-angkanya setiap hari," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia juga tidak menyukai kebijakan proteksionisme karena hal tersebut justru merugikan. "Sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak," tandasnya.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 ini mengambil tema "Perdagangan sebagai Sektor Penggerak Utama Pemulihan Ekonomi Nasional". Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar WTO, Atase Perdagangan/Perwakilan Perdagangan di luar negeri, dinas perdagangan provinsi dan kota/kabupaten, hingga asosiasi pelaku usaha yang hadir secara virtual.

Turut hadir secara langsung mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi:

Arahkan Potensi Ekonomi Digital Indonesia bagi Kesejahteraan Masyarakat

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar akan pemanfaatan dan perkembangan ekonomi digital di masa mendatang. Berdasarkan laporan Temasek, pada tahun 2025 mendatang, ekonomi digital Indonesia diprediksi menyentuh angka 130 miliar dolar Amerika.

Potensi besar tersebut turut diungkap oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato utama dalam acara Indonesia Digital Economy Summit 2020 yang digelar di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020. "Sampai saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN. Dengan pertumbuhan yang paling cepat," ungkap Presiden.

Di tahun 2019 kemarin saja, angka pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. "Indonesia juga tercatat memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara. Nomor lima di dunia setelah Amerika, India, Inggris, dan Kanada. Kita memiliki 2.193 startup. Ada 1 decacorn dan 4 unicorn," imbuhnya.

Hal itu ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa dan tingkat penetrasi internetnya yang mencapai 65 persen di tahun 2019. Belum

lagi dengan selesainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Palapa Ring yang menghubungkan lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang akan meningkatkan potensi tersebut.

Namun, besarnya potensi itu tak lantas membuat kita berpuas diri. Indonesia, menurut Presiden Joko Widodo, harus memanfaatkan betul hal tersebut dengan tidak membiarkan negara kita hanya menjadi pasar digital. Sebaliknya, pelaku usaha Indonesia lah yang harus menjadi produsen dan raja di pasar sendiri. "Kita harus bekerja keras untuk menjadi produsen sehingga memberikan dampak yang luas dan positif kepada masyarakat kita," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa perkembangan ekonomi digital haruslah memicu pemasaran terhadap produk-produk dalam negeri, utamanya produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan mampu bersaing. Ke depan, ekonomi digital juga harus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

"Ekonomi digital juga harus menciptakan lapangan kerja, harus mendorong ekspor, harus meningkatkan devisa.

Kita harapkan ekonomi digital selanjutnya bisa menurunkan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang kita miliki," imbuhnya.

Selain itu, Kepala Negara melihat bahwa ekonomi digital Indonesia memiliki potensi untuk memecahkan persoalan-persoalan krusial di tengah masyarakat. Seperti akses kepada pendidikan yang layak, juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

"Meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu dan terpencil, saya lihat ini juga sudah muncul banyak. Menyediakan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil, saya lihat ini juga sudah banyak termasuk crowdfunding untuk bantuan sosial," ucapnya.

Maka itu, pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan cara mempermudah sumber pendanaan, memberikan pendampingan, mempermudah ekosistem kerja sama dengan lembaga-lembaga investasi dunia, serta regulasi dan birokrasi yang kondusif.

"Saya melihat semakin banyak inisiatif startup. Banyak sekali. Cukup banyak inisiatif kewirausahaan dan bisnis kita. Kewirausahaan sosial yang berbasis teknologi digital saya juga lihat banyak. Inilah kekuatan yang harus kita himpun terus," tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain CEO Microsoft Satya Nadella, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.



Wujudkan Indonesia Digital

Kominfo Terapkan 4 Fokus Utama



Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merampungkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan peta jalan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dengan empat fokus utama.

"Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama adalah percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital dan terakhir menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital," paparnya dalam Program Prime Talk Metro TV "Peta Jalan Indonesia Digital", di Jakarta, Jumat (26/06/2021).

Menkominfo menyatakan percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, menteri Johnny menegaskan Pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet.

"Langkah ini untuk menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia mengambil langkah yang cepat dan konsisten akibat dampak Covid-19. Jadi, Kominfo membangunnya mulai dari level tulang punggungnya *backbone* melalui pembangunan *fiber optic* di darat dan di laut yang massif dilakukan dan ditargetkan selesai pada tahun 2022," tegasnya.

Menkominfo memaparkan di wilayah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T, pemenuhan akses internet akan dibangun Kominfo di 9.113 desa dan kelurahan. Sedangkan di wilayah komersial atau non-3T, menjadi komitmen

operator seluler untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK secara simultan di 3.435 desa dan kelurahan.

"Tahun 2022 nanti kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh BTS. Selain itu, Pemerintah juga akan membangun layanan internet 5G untuk publik dan komersial. Ini butuh biaya yang banyak," ujarnya.

Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.

"Saat ini kita menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi kita dan untuk Kominfo sendiri memakai 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet untuk masyarakat, lalu membangun *microwave link* di wilayah-wilayah yang sangat sulit di *middle-mile* untuk menghubungkan titik yang satu dengan yang lain," jelas Menteri Johnny.

Satelit yang akan diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2023 digunakan untuk penyediaan akses internet di 150.000 titik



Saat ini kita menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi kita dan untuk Kominfo sendiri memakai 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet untuk masyarakat, lalu membangun *microwave link* di wilayah-wilayah yang sangat sulit di *middle-mile* untuk menghubungkan titik yang satu dengan yang lain



layanan publik dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia yang belum tersedia akses internet.

“Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah atau pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, serta 4.500 titik layanan publik lainnya. Untuk komersial operation-nya di Kuartal ke-4 di tahun yang sama dan saat ini sudah rampung ke dalam tahap pembiayaan,” ungkap Menkominfo.

Adapun di jaringan *last-mile*, saat ini Indonesia memiliki 480.000 Base Transceiver Station (BTS) dibangun Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan *mobile broadband*.

“Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur, Kominfo juga menjadi leading sector untuk mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital,” tutur Menteri Johnny.

Untuk mewujudkan Pemerintahan digital atau e-government, Menkominfo menyatakan telah menyiapkan pembangunan pusat-pusat data yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda.

“Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar yang akan menggunakan *cloud technology* untuk server dan pelayanan Pemerintahan digital. Itu akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berproses sekarang di Jakarta di Jabodetabek,” jelasnya.

Untuk lokasi kedua, Kementerian Kominfo sedang melakukan pemeriksaan di wilayah Batam. Ketiga, di lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di Balikpapan untuk Wilayah Indonesia Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur.

“Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan,” ungkap Menteri Johnny.



Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar yang akan menggunakan cloud technology untuk server dan pelayanan Pemerintahan digital. Itu akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berproses sekarang di Jakarta di Jabodetabek

Menurut Menkominfo dengan pembangunan infrastruktur digital yang masif dan penyediaan pusat data pemerintah untuk layanan pemerintahan digital ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia.

“Hilirnya daripada infrastruktur TIK yaitu ekonomi digital itu sendiri. Makanya, kita harus memanfaatkan infrastruktur kita untuk memanfaatkan ekonomi digital. Di Indonesia saat ini tulang punggung perekonomian kita adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07% dari GDP nasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, Pemerintah memberi perhatian serius kepada 64.2 juta UMKM Indonesia untuk bisa onboard go digital, karena potensi ekonomi digital Indonesia yang besar. Bahkan, Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku melalui Program Nasional Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

“Di samping itu, kita tentu berharap bahwa selain dari UMKM ada sektor-sektor yang lain yang harus masuk untuk mendukung itu. Seperti misalnya industri dan pariwisata, sektor perdagangan digital e-commerce kita harus dorong besar-besaran,” paparnya.

Menkominfo menyatakan, Presiden Joko Widodo mendorong Indonesia dapat menghasilkan unicorn dan startup digital di sektor jasa keuangan digital, digitalisasi perindustrian, media hiburan (digital broadcasting), pertanian dan perikanan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, serta real-estate atau perkotaan digital.

“Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan berulang kali kepada kita bahwa digital space kita di sisi digital economy harus dimanfaatkan terutama untuk digital economy nasional kita yang saat ini sekitar USD44 Miliar dan diproyeksikan di tahun 2025 lebih dari USD124 Miliar atau setara dengan 40% dari nilai digital economy ASEAN,” tegas Menkominfo.

Melihat potensi besar ekonomi digital, Menteri Johnny menilai hal itu perlu didukung dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri.

“Potensinya besar dan ini kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Di sinilah membangun mulai dari yang paling dasar yaitu talenta digital itu sendiri. Kominfo memberikan dukungan yang besar bersama ekosistemnya, termasuk *global technology companies*, e-Commerce kita atau platform digital untuk mengisi pelatihan digital bagi masyarakat tingkat dasar,” paparnya.

Untuk menyiapkan masyarakat digital, Kementerian Kominfo telah melaksanakan program pertama yang dikenal dengan sebutan Literasi Digital Nasional. Tahun 2021 program itu ditargetkan dapat meliterasi 12,5 juta masyarakat agar memiliki kecakapan digital.

“Kita harapkan di akhir tahun 2024 nanti targetnya 50 juta dari penduduk Indonesia sudah terliterasi digital di tingkat basic dan selanjutnya bisa dilakukan setiap tahunnya sehingga seluruh warga Indonesia nanti terliterasi secara keseluruhan,” harap Menkominfo.

Kedua, lanjut Menteri Johnny, Indonesia juga membutuhkan tenaga terampil di tingkat menengah atau intermediate skill. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Talent Scholarship bekerja sama dengan ekosistem untuk membekali masyarakat agar punya keahlian.

“Kita diproyeksikan dalam setahun setidaknya membutuhkan 9 juta tenaga kelas menengah atau setara dengan 600.000 per tahunnya. Pekerjaannya besar, Pemerintah hanya menyiapkan 100 ribu. Jadi, kita harapkan dukungan dari ekosistem untuk sisanya dan setiap tahun harus dilakukan,” ungkapnya.

Ketiga, Kementerian Kominfo menyiapkan pelatihan keterampilan tingkat mahir atau digital advance. Pelatihan itu ditargetkan melatih master mentor digital melalui Program Digital Leadership Academy (DLA),

“Kuota pelatihan yang dapat diikuti sekitar 300 orang dari tokoh Pemerintahan dan founders startup Indonesia untuk melengkapi pengambilan keputusan (dengan mindset digital),” tutur Menkominfo.

Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan ekosistem, di Kementerian Pendidikan, perusahaan teknologi yang menjadi mitra kementerian-kementerian teknis lain.



“Tentu bekerja sama untuk membangun basis dari keahlian-keahlian digital kita dan Kominfo tengah menyiapkan metamorfosa lembaga pendidikan melalui Sekolah Tinggi Multi Media yang diharapkan nanti menjadi Institut Digital Nasional dengan prodi-prodi baru,” tegas Menteri Johnny.

Pemerintah. mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju dengan hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Hal itu ditargetkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama.

Peta Jalan Indonesia Digital telah menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024. Pindai di sini untuk mengunduh dokumen lengkap:



Unduh di sini :
kominfo.go.id/renstra

Tiga

Sektor

Penting

dalam Renstra Kominfo

2020-2024

Melihat Indonesia dalam beberapa tahun kedepan, tentunya akan terselip harapan adanya perubahan kehidupan sosial yang jauh lebih berkembang pesat. Kita sedang membayangkan pusat-pusat perkotaan menjadi smart city, membangkitkan perekonomian daerah dengan mengenalkan potensi sumber daya alam, bahkan menyaksikan masyarakat di pelosok negeri bermigrasi dengan cepat karena memanfaatkan industri teknologi.

Ketika tak ada lagi kesenjangan digital dan pemerataan akses internet menjangkau seluruh wilayah tanah air.

Kita pun akan melihat para petani, peternak, nelayan, UMKM hingga masyarakat umum secara bersama-sama memanfaatkan ekosistem infrastruktur digital dan ruang digital. Demikian halnya dengan pengajar dan pelajar, aktivitas belajar yang ditopang dengan akses internet berkapasitas tinggi dan memadai akan semakin mencerdaskan generasi penerus bangsa di masa mendatang.





Pada tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS yang saat ini dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru

Mengukur waktu agar tercapainya Indonesia sebagai bangsa digital, telah dan akan terus menjadi komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara besar-besaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor dalam mewujudkan hal itu telah menyusun rencana strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024. Melalui Renstra Kominfo pula terjawab komitmen pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital nasional.

“Kementerian Kominfo hadir di depan dan mengambil peran dalam percepatan transformasi digital ini, demi memulihkan dan ikut mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional lewat teknologi digital. Kita bersama yakini bahwa transformasi digital sanggup menciptakan momentum besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan jauh ke depan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Menteri Johnny saat mengumumkan Renstra Kominfo 2020 – 2024 mengatakan bahwa, proses transformasi digital yang dilakukan menerapkan prinsip menghubungkan yang tidak terhubung, connecting the unconnected, kemandirian dan kedaulatan digital.

“Hal itu juga tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang semakin mendorong percepatan transformasi digital sebagai suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Untuk itulah, dalam Renstra Kominfo terdapat tiga sektor penting antara lain sektor infrastruktur digital, transformasi digital di pemerintahan dan masyarakat, dan transformasi ekonomi digital,” ujarnya.

Sektor Infrastruktur Digital

Kementerian Kominfo memulai langkah percepatan transformasi digital nasional dengan membangun infrastruktur internet yang merata, agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi dengan mudah. Adapun salah satu program yang telah dan akan terus dilakukan adalah membangun ribuan Base Transceiver Station (BTS) untuk desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Menteri Kominfo dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI tanggal 7 Juni 2021 mengatakan bahwa, pemerintah saat ini telah mengoperasikan 1.682 BTS aktif dan masih terus melanjutkan pembangunannya dalam jangka waktu yang ditargetkan.

“Pada tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS yang saat ini dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru di mana hingga tahun 2024 nanti diharapkan keseluruhan 9.586 telah terbangun dan beroperasi penuh,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan bahwa pembangunan BTS juga akan didukung dengan satelit multifungsi SATRIA I yang ditargetkan akan beroperasi di tahun 2023.

“Saat ini telah tersedia dan beroperasi satelit berkapasitas 21 Gbps, di tahun 2021 Kominfo akan menambah kapasitas sebesar 9 Gbps, pada tahun 2022 akan dilakukan penambahan 7 Gbps dan sampai tahun 2024 nanti akan tersedia kapasitas satelit sebesar 117 Gbps,” tandasnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga akan menata penggunaan spektrum frekuensi melalui program farming dan refarming. Program ini guna memenuhi kebutuhan koneksi jaringan 4G yang lebih baik hingga ke seluruh pelosok nusantara. Sedangkan program lainnya adalah pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi yang dilakukan melalui migrasi televisi analog ke televisi digital atau lebih dikenal sebagai Analog Switch Off (ASO). Dengan diberhentikannya program siaran analog yang puncaknya pada November 2022 nanti, kualitas siaran televisi akan menjadi lebih bersih, jernih dan canggih.

Tidak hanya menuntaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Kementerian Kominfo dibawa kepemimpinan Johnny G. Plate telah menyiapkan ekosistem teknologi 5G. Penerapan teknologi generasi kelima itu dapat diawali demi peningkatan layanan telekomunikasi Indonesia yang lebih maju. Guna menjawab hal itu, pemerintah berhasil mendorong penyelenggara operator seluler menerapkan teknologi 5G di beberapa kota besar di Indonesia.

Sektor Transformasi Digital di Pemerintah dan Masyarakat

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan terjangkau salah satunya tentu untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan berbasis pada kecanggihan teknologi digital. Sehingga pemerintah dalam melayani masyarakat juga mampu menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien.

“Dalam mendorong transformasi digital, disiapkan berbagai program yang membantu masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan internet secara cerdas, cermat dan produktif,” kata Menteri Johnny.

Kementerian Kominfo memiliki program pembangunan Pusat Data Nasional atau Government Cloud. Menurut Menkominfo, program tersebut ditujukan untuk integrasi data pemerintahan dalam satu sistem, sehingga kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah dapat mewujudkan sinergi yang lebih cepat dan terpadu.

Program lainnya yang tengah disiapkan adalah mendorong masyarakat melatih kecakapan digital dari tingkat dasar (basic), menengah (intermediate), dan tingkat atas (advance).

“Gerakan Nasional Literasi Digital dilakukan agar masyarakat cakap, tangkas dan bijak dalam berinternet. Kalau program Digital Talent Scholarship (DTS) bertujuan untuk menyiapkan angkatan kerja dengan keterampilan teknologi digital yang dibutuhkan industri, dengan sumber daya manusia yang memadai dan menunjang ekonomi digital kita, serta program Digital Leadership Academy bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri terutama dalam pengembangan pengetahuan di bidang teknologi digital dan juga diperuntukkan bagi C-Level, Praktisi, dan Akademisi,” jelas Menteri Johnny.

“**Dalam mendorong transformasi digital, disiapkan berbagai program yang membantu masyarakat agar mampu menggunakan dan memanfaatkan internet secara cerdas, cermat dan produktif**”

Sektor Transformasi Ekonomi Digital

Negara yang berdaulat, sejahtera dan maju salah satunya ditentukan oleh perekonomian yang kuat. Di era digital saat ini, sektor ekonomi mengalami perubahan drastis di tengah ramainya pemanfaatan teknologi digital. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan perekonomian di hampir semua negara bertumbuh pesat karena ditopang oleh startup digital.

Menjawab faktor pentingnya perekonomian nasional yang berbasis pada digitalisasi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo berupaya memfasilitasi para startup digital dan melakukan digitalisasi pada sektor-sektor strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

“Startup digital diharapkan dapat menjadi roda penggerak atau enabler yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Saat ini, sedang dijalankan dua program startup digital, yaitu Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yang terbuka bagi mereka yang baru akan memulai startup-nya dan Startup Studio Indonesia untuk program pendampingan intensif bagi startup yang siap membesarkan skala bisnisnya,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny menegaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan fasilitasi agar sektor-sektor strategis dapat mengembangkan potensinya di ruang digital. “Tidak kalah penting, perlu merancang penerapan kebijakan perlindungan data pribadi guna tercipta ruang digital yang produktif, aman, dan sehat,” tandasnya.

Selama pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat dengan cepat berubah dengan hanya menggunakan gadget sebagai alat untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Pandemi ini juga menjadi momentum bagi para pelaku usaha seperti UMKM yang menjadi mitra perusahaan startup digital. Pelaku usaha dipertemukan dengan masyarakat dalam aktivitas jual beli yang semakin cepat dan fleksibel. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana teknologi digital.

Dalam upaya mewujudkan transformasi digital, Menteri Johnny menegaskan Kementerian Kominfo tentu tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya koordinasi dan bergerak bersama.

“Karenanya, kolaborasi nasional antar pemerintah pusat dan daerah, sektor industri, pihak swasta, dan segenap masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses. Dengan segala upaya akselerasi transformasi digital yang dilakukan, Kementerian Kominfo tidak hanya sebagai regulator, namun juga secara strategis sebagai fasilitator dan akselerator, demi upaya menghantar Indonesia menjadi negara digital,” imbuhnya.

Melalui pembangunan infrastruktur TIK dan kemudahan akses internet yang merata serta pemanfaatan teknologi digital yang optimal oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai sektor strategis, kita yakini dan selalu optimis Indonesia siap menjadi bangsa digital yang turut andil dalam akselerasi perekonomian global.

Kebut

Transformasi

Digital

Renstra Kominfo 5 Tahun ke Depan



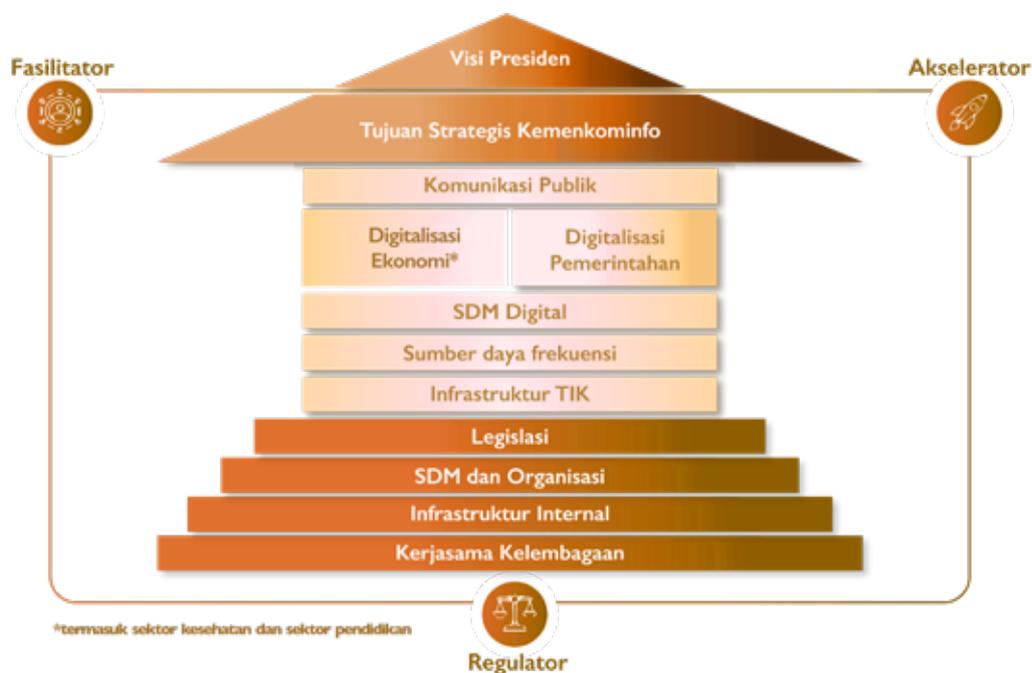
Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah lima tahun ke depan terutama sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang komunikasi dan informatika.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan menjadi rencana program dan kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Kemenkominfo untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kementerian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pemerintah. Kemenkominfo memfokuskan Renstra 2020—2024 pada mendorong percepatan transformasi digital.



Fokus Utama

1. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses dan konektivitas broadband di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong transformasi digital pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta mempersiapkan ekosistem digital dan SDM talenta digital
3. Memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas Polhukhankam melalui akses informasi dan komunikasi publik



Kerangka fungsi Kemenkominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu pertama, atap sebagai tujuan dan sasaran; kedua, pilar-pilar utama sebagai menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo; serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran.

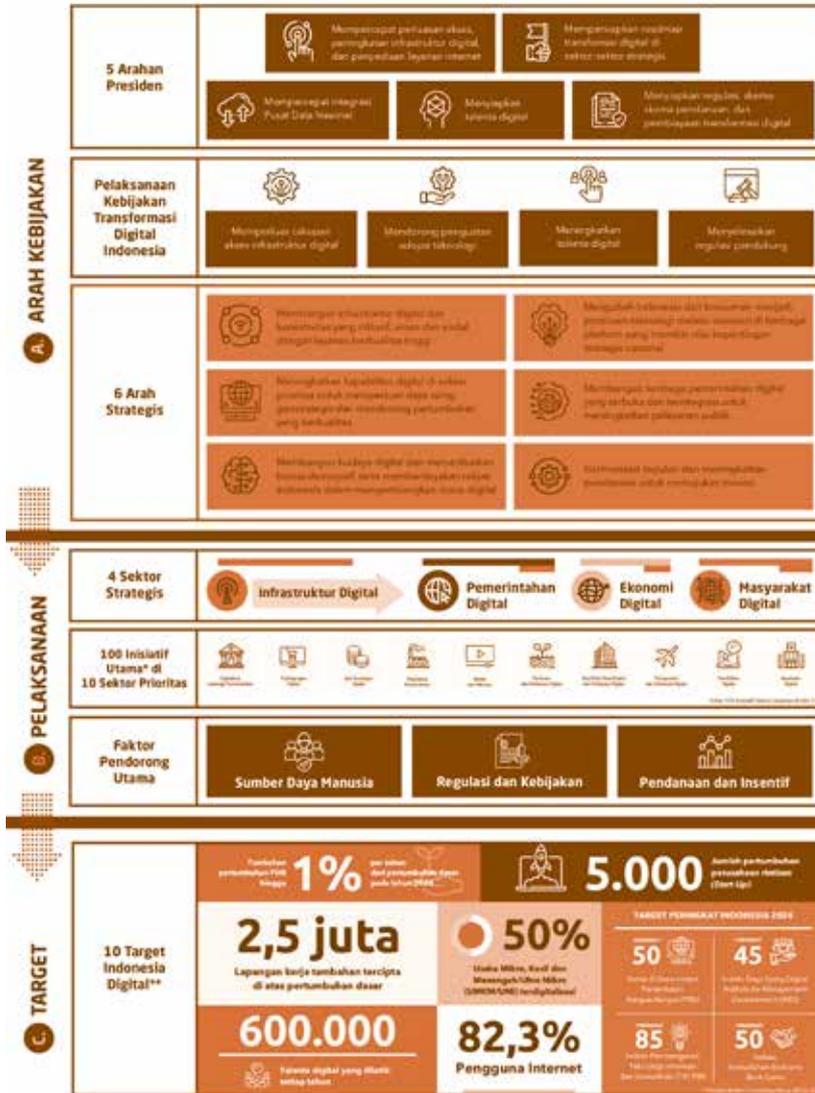
Arah Kebijakan dan Strategi 2020 - 2024

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk merah digital dividen <i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.
2.	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G) Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman
3.	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis
4.	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Nasional Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5.	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
6.	Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter <i>hoax</i> dan diseminasi kebijakan pemerintah
7.	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i>, dan inovasi perencanaan penganggaran.

Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4.	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

Arah Kebijakan Transformasi Digital



3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- SPBE
- Pusat Data Nasional
- Startup Digital
- Digitalisasi Sektor Strategis
- Pelindungan Data Pribadi
- Literasi Digital (Siberkreasi)
- Pelatihan SDM Digital
- Smart City

4. Program Komunikasi Publik

- Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi
- Dukungan Sosialisasi Event Nasional
- Penguatan Tata Kelola Komunikasi Publik

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- Penyediaan BTS
- Akses Internet
- Implementasi 5G
- Penyediaan Akses 4G oleh Operator
- Pusat Monitoring Telekomunikasi
- Digitalisasi Penyiaran
- Utilisasi Palapa Ring
- Satelit Multifungsi

2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik

- Sistem Monitoring Frekuensi Radio
- Lab Uji Telekomunikasi
- Farming Refarming Spektrum Frekuensi

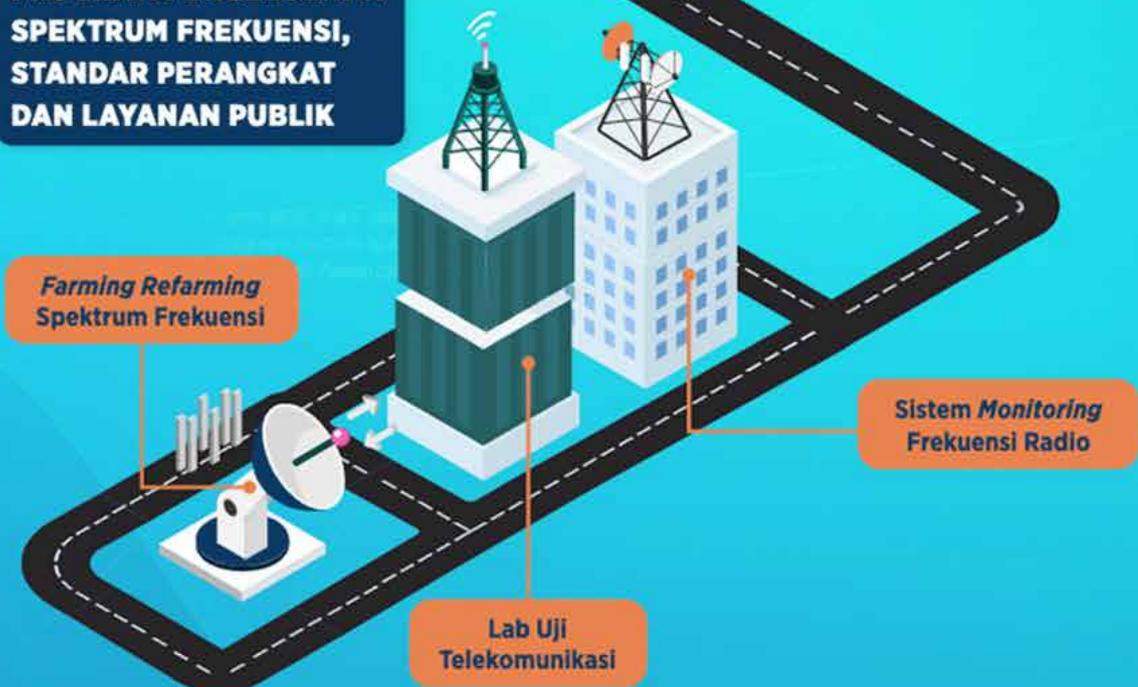
5. Program Dukungan Manajemen

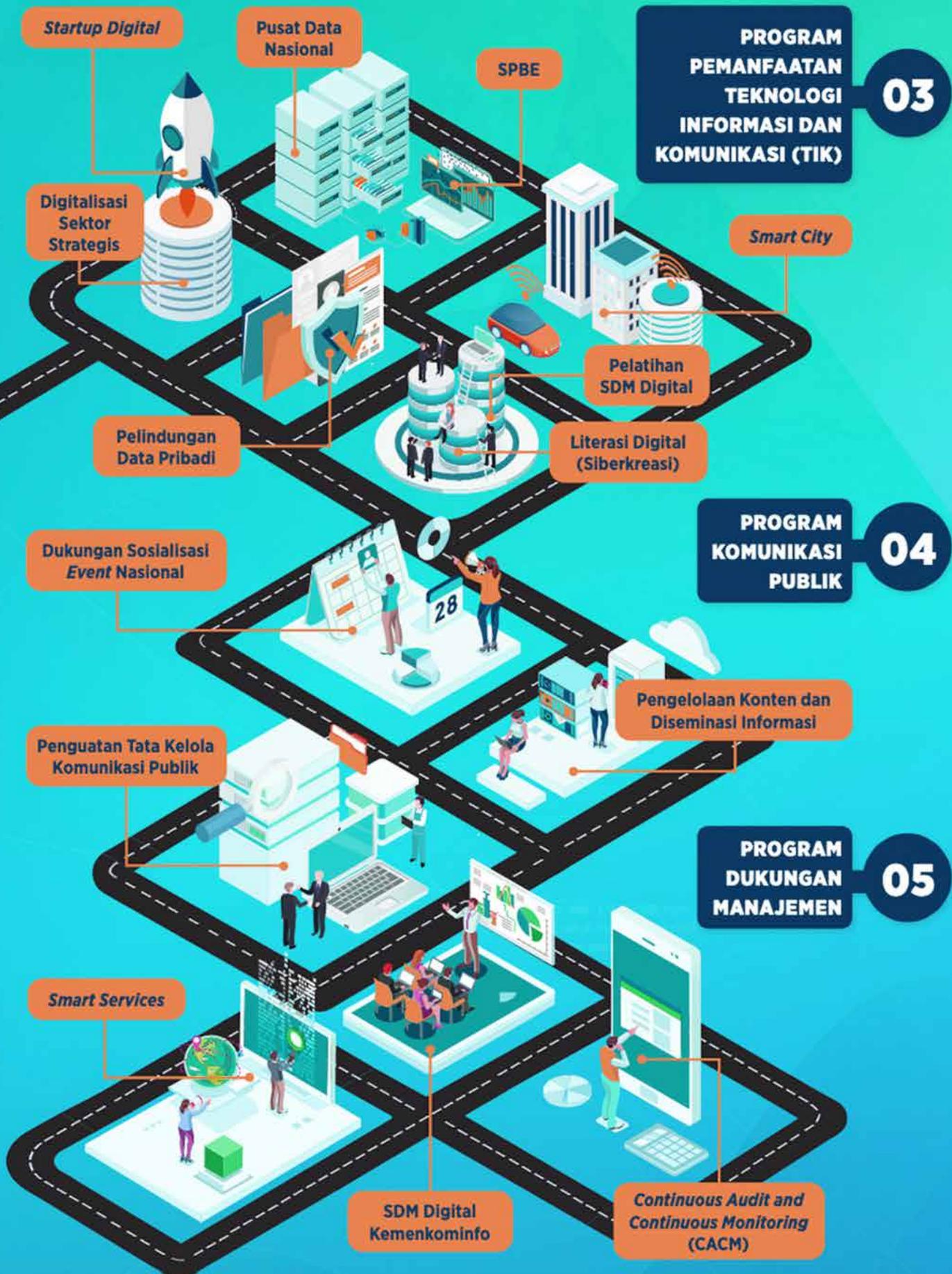
- Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM)
- SDM Digital Kemenkominfo
- Smart Services

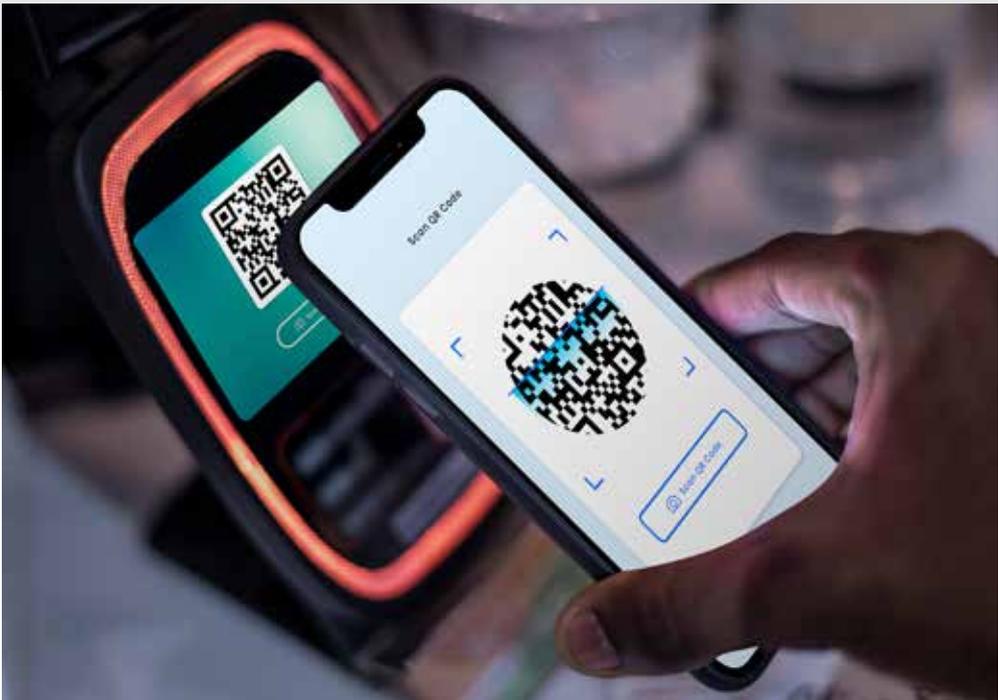
01

**PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)**

02

**PROGRAM PENGELOLAAN
SPEKTRUM FREKUENSI,
STANDAR PERANGKAT
DAN LAYANAN PUBLIK**





Mewujudkan

Ekosistem

Digital

di Indonesia

Ditulis oleh: Emild Kadju

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal. Dari sisi kemanusiaan, banyak nyawa yang merengang dan membawa duka bagi seantero dunia. Dari sisi ekonomi, banyak negara mengalami resesi. Lantas, bagaimana Covid-19 memberikan dampak perubahan dari sisi teknologi?

Tampaknya, pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita, bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan apa yang disebut transformasi digital. Bukan lagi lima atau sepuluh tahun kedepan, kebutuhan akan transformasi digital nasional menjadi keharusan saat ini. Betapa tidak, fenomena penggunaan data internet pada masa pandemi Covid-19 terus meningkat signifikan. Bahkan menjadi

begitu akseleratif, tatkala pemerintah menetapkan dan mengesahkan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan keharusan Work From Home (WFH) bagi para pekerja dan School From Home (SFH) bagi para pelajar.

Lonjakan kebutuhan akan aksesibilitas internet tersebut terjadi karena aktivitas di realitas offline yang kian dibatasi, mulai dari PSBB hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Ketatnya aturan *social* dan *physical distancing* sebagaimana termaktub dalam PSBB dan PPKM, akhirnya membuat masyarakat beralih haluan dari realitas offline ke realitas online. Jagad digital pun semakin dieksplorasi seiring berjalannya waktu. Alhasil, masyarakat pun mulai dengan aktivitasnya di dunia digital, mengingat ada begitu banyak hiburan dan tawaran-tawaran eksklusif dalam sekali click.

Akselerasi Transformasi Digital Menuju Indonesia Digital

Presiden Jokowi memiliki visi besar Indonesia Maju di tahun 2045. Dalam visi tersebut, Indonesia diproyeksikan menjadi satu dari lima raksasa ekonomi dunia dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) 7 triliun US Dollar. Untuk mencapai visi tersebut, sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia telah membuat roadmap transformasi digital yang disusun untuk 25 tahun ke depan. Roadmap tersebut berfokus pada empat sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.





Renstra tersebut dirancang untuk membangun basis yang kuat bagi lanskap digital nasional.



Menindaklanjuti arahan strategis Presiden Jokowi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Transformasi Digital untuk jangka waktu 2020-2024. Renstra tersebut dirancang untuk membangun basis yang kuat bagi lanskap digital nasional. Dalam Renstra tersebut, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024 yang bertujuan untuk melakukan akselerasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh. Ada tiga hal utama menyangkut Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, dan talenta digital. Ketiga hal tersebut saling melengkapi sebagai satu-kesatuan ekosistem digital.

Progres Transformasi Infrastruktur Digital

Menuntaskan Disparitas Akses Internet

Kondisi perkembangan TIK secara nasional direpresentasikan melalui ICT Development Index (IDI) yang dikeluarkan oleh ITU dan Mobile Connectivity Index (MCI) yang dikeluarkan GSMA. Jika dilihat pada MCI, Indonesia memiliki pertumbuhan yang signifikan, dimana Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang mengalami kemajuan paling signifikan dengan skor 46 di tahun 2014 menjadi 61 di tahun 2018. Namun, bila dilihat dari skor IDI terakhir tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 111 dari 176 negara di dunia dengan nilai 4,33 dari 10. Posisinya masih berada jauh dibawah Thailand yang menempati peringkat 78.

Dari profil IDI 2017 tersebut, tampak bahwa proses pembangunan TIK Indonesia relatif tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam parameter ICT Use misalnya, capaian *fixed broadband subscription* per 100 inhabitants masih sangat rendah yaitu pada poin 1,89. Pada *mobile broadband subscription*, Indonesia juga berada di bawah Malaysia. Selain itu, pada parameter ICT Access, Indonesia juga tertinggal, terlihat dari poin *fixed telephony subscription* per 100 inhabitants yang masih sangat rendah.

Dari sisi layanan telekomunikasi, secara global terlihat tren peningkatan penggunaan data di internet. Perkembangan industri telekomunikasi pun mengalami perpindahan fokus dari layanan telepon/suara menuju layanan data dan video dengan kebutuhan bandwidth yang besar, peningkatan kecepatan yang akan berlipat-lipat, latensi yang sangat rendah untuk melakukan hal-hal yang bersifat *mission critical*, dan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin atau manusia ke mesin yang sifatnya masif. Diperkirakan penggunaan perangkat ponsel cerdas yang terkoneksi internet akan terus tumbuh menjadi sekitar tujuh miliar di tahun 2043.

Peningkatan pertumbuhan data didukung oleh banyaknya jumlah orang yang menggunakan ponsel. Pada akhir tahun 2018, terdapat sekitar 5,1 miliar orang di dunia (67% dari total populasi dunia) yang menggunakan ponsel dan diproyeksikan akan menjadi 5,8 miliar pelanggan (71% dari total populasi dunia) pada tahun 2025. Tingginya proyeksi pertumbuhan pelanggan ponsel tentu akan memberikan dampak pada pertumbuhan penggunaan data seluler. Layanan video diyakini akan menjadi kontributor terbesar dari peningkatan traffic data tersebut.



Di satu sisi, pertumbuhan tingkat penggunaan data tersebut juga akan berdampak pada tumbuhnya industri TIK nasional, maupun industri berbasis inovasi (seperti: platform aplikasi, *data driven decision making*, dan cloud). Di sisi lain, juga menjadi tantangan bagi Kemenkominfo untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi agar tetap pada iklim yang sehat dan dengan pertumbuhan yang positif. Perkembangan TIK juga memunculkan tren industri 4.0 secara global, ditandai dengan berkembangnya terobosan-terobosan teknologi, meliputi Artificial Intelligence (AI), robotic, Internet of Things (IoT), autonomous vehicles, 3D printing. Perkembangan industri 4.0 ini juga mengakibatkan terjadi shifting di bidang SDM. Banyak pekerjaan *low-level/repetitive* yang akan tergantikan oleh sistem atau otomasi. Dari penelitian Oxford Economics 2018, yang menemukan bahwa pada negara-negara di Asia Tenggara, akan terjadi *job displacement* yang cukup besar. Dari studi tersebut, diperkirakan Indonesia akan kehilangan 9,5 juta pekerjaan akibat otomasi dan disrupsi digital.

Di sisi lain, pertumbuhan industri TIK mendorong pertumbuhan pesat platform berbasis aplikasi di Indonesia, seperti *e-commerce*, *ride hailing*, dan *digital payments*. Hal ini membawa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan internet ekonomi tertinggi, di atas Malaysia dan Thailand. Pada sisi e-commerce saja, dari data laporan Google, Indonesia mencapai pertumbuhan nilai transaksi e-commerce yang sangat baik, meningkat sebesar 50% per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari USD 8 miliar menjadi USD 27 M (dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat).

Selain itu, infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik.

Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kemenkominfo menyelenggarakan program penyediaan akses broadband nasional, khususnya di wilayah non komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan backbone nasional, serta penyediaan Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet.

Selain membangun infrastruktur Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang terdiri dari 4.156 km kabel darat (inland) dan 8.073 km kabel laut (SKKL), Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI)

masih bergerilya untuk membangun BTS di wilayah-wilayah pedalaman, khususnya di 3T. Hingga tahun 2020, BAKTI telah membangun BTS 4G di 1.682 lokasi, akses Internet di 11.817 lokasi termasuk di dalamnya 3.126 lokasi fasilitas layanan kesehatan sebagai bagian dari program KPC-PEN, dan penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps.

Namun, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan tersebut rupanya belum cukup. Masih ada banyak desa yang belum terlayani dengan akses internet. Menurut data, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T.

Dari 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T, 1.209 desa/kelurahan di antaranya sudah terdapat BTS dengan teknologi 2G atau 3G yang perlu *diupgrade* menjadi teknologi 4G, dimana 1.096 desa/kelurahan di antaranya merupakan BTS yang dibangun oleh BAKTI dan saat ini sudah selesai di-upgrade menjadi BTS 4G, sedangkan 113 desa/kelurahan sudah terdapat BTS yang dibangun oleh operator telekomunikasi yang saat ini dalam proses upgrade ke 4G.

Menyisakan 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan akses layanan 4G (unserved 4G). Pada 7.904 desa/kelurahan 3T unserved 4G ini akan dibangun BTS 4G oleh Kementerian Kominfo melalui BAKTI. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan Non-3T akan dibangun BTS 4G oleh operator telekomunikasi.

BAKTI juga menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik di mana sebanyak 7904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G. Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia.



Indonesia memiliki pertumbuhan yang signifikan, dimana Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang mengalami kemajuan paling signifikan dengan skor 46 di tahun 2014 menjadi 61 di tahun 2018



Implementasi Jaringan 5G: Selangkah Menuju Indonesia Digital

Program implementasi jaringan 5G merupakan salah satu indikator percepatan transformasi digital di Indonesia. Jaringan 5G di Indonesia memang belum terimplementasi pada awal tahun 2021. Namun pemerintah sudah mulai melakukan manuver, salah satunya dengan melakukan farming spektrum frekuensi sebesar 1.880 Mhz.

Menteri Kominfo, Johnny Plate sendiri menyatakan bahwa 5G hadir untuk mendukung lima prioritas kerja pemerintah yang sudah dicanangkan sejak pembentukan Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2025. Kedua, jaringan 5G diharapkan akan mendorong program Making Indonesia 4.0, sebuah peta jalan (roadmap) untuk mengimplementasikan strategi memasuki era industri 4.0. Ketiga, 5G nantinya akan menjadi semacam boost untuk mendorong pertumbuhan lima destinasi wisata super prioritas di Indonesia yang mana saat ini sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Kelima destinasi wisata yang dimaksud antara lain: Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).

Untuk target 5G di tahun 2023, saat ini pemerintah telah menyiapkan tiga layer spektrum, yakni Super Data Layer (high band) di spektrum 26/28 GHz, Capacity Layer (middle band) di frekuensi 2.3/2.6/3.3/3.5 GHz, dan coverage layer (low band) di 700 MHz.

Selain tengah membangun infrastruktur untuk 5G, saat ini Kementerian Kominfo juga berfokus pada pembangunan BTS di seluruh wilayah Indonesia, lebih khusus wilayah 3T guna memperkecil disparitas akses internet antar-wilayah. Ihwal yang dilakukan Kominfo adalah meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas internet antarwilayah di seluruh wilayah melalui deployment 4G secara masif.

Progres Transformasi Ekonomi Digital

Dampak dari pandemi Covid-19 memaksa sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi untuk segera mengadopsi sistem digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini juga mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 tahun ke depan, fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi digital bisa diwujudkan.

Sembari membangun infrastruktur TIK, Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi. Program seperti Program 1000 Startup Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM Go Online yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri onboard ke marketplace, dan Program Petani Nelayan Go Online yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi.



Progres Transformasi SDM Digital

Program Digital Talent Scholarship

Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya menyangkut infrastruktur digital semata, melainkan juga menyangkut aspek pengembangan sumber daya manusia digital. Melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo berupa mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku utama transformasi digital di Indonesia.

Dalam program DTS, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi global untuk melahirkan para profesional dan terampil menguasai bidang yang memberikan tutorial, pendampingan dan pelatihan.

Menteri Kominfo, Johnny Plate sendiri menyatakan upaya mewujudkan talenta digital menjadi kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hingga saat ini, Kementerian Kominfo telah sedang menyiapkan pengembangan SDM digital mulai dari tingkat basic yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital.

Selain pengembangan SDM digital tingkat basic, Kementerian Kominfo juga mendorong pemerintah daerah mendukung pelatihan di tingkat basic, intermediate dan advance dalam rangka menyukseskan smart city dan program digital lainnya. Kementerian Kominfo sendiri menargetkan pada tahun 2021 akan tersedia 100 ribu seat DTS bagi millennial Indonesia, baik untuk tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa S0, hingga sarjana.

Selanjutnya, program DTS tingkat intermediate seperti cloud computing, big data, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality untuk ditujukan untuk menghasilkan tenaga-tenaga dengan skill digital tingkat menengah. Oleh karena pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan WFH dan SFH, para milenial dapat mengisi waktunya dengan mengikuti gerakan digital talent scholarship secara virtual.

Fokus Pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital tidak hanya menyangkut infrastruktur digital semata, melainkan juga menyangkut aspek pengembangan sumber daya manusia digital

Kemudian di tingkat advance, Kementerian Kominfo menghadirkan Program Digital Leadership Academy (DLA). Program tersebut menggandeng startup founder dalam bentuk pelatihan-pelatihan offline. Pada level ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan perusahaan teknologi global bersama-sama dengan negara mitra seperti india, Tiongkok, Singapura. Tentu ekspertasi talenta digital pada level ini sangat dibutuhkan untuk mendukung program smart cities yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini.

Program DLA bertujuan untuk meningkatkan serta mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. DLA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang IT. Peserta Professional Academy akan belajar secara mandiri secara daring/online, peserta mengatur waktu belajar secara mandiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Fokus pelatihan dan sertifikasi mencakup bidang Artificial Intelligence, Data Science, Blockchain, Cyber Security, Cloud Computing, Internet of Things dan Web/Mobile Developer. Aktivitas DLA, yaitu:

Menyatukan Indonesia

Merupakan upaya pemerintah dan swasta untuk membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik yang dapat menjangkau seluruh kabupaten / kota di Indonesia.



Fokus proyek ini untuk memperbaiki infrastruktur serat optik di daerah non-commercial

in akses (band)



Sebab meski tumbuh pesat pengguna internet Indonesia

yang dibagi menjadi Barat, Tengah dan Timur dengan total panjang kabel 12000 KM



Penyediaan dan pengelolaan Palapa Ring pelaksanaannya melalui dana Universal Service Obligation yang dikelola oleh BP3TI

struktur Palapa Ring 2018 dan dapat

dioperasikan pada tahun 2019



Menteri Kominfo, Johnny Plate sendiri menyatakan upaya mewujudkan talenta digital menjadi kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hingga saat ini, Kementerian Kominfo telah sedang menyiapkan pengembangan SDM digital mulai dari tingkat basic yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital.



Pertama, Self-paced Learning/Belajar Mandiri.

Di sini, peserta belajar secara mandiri melalui laptop/komputer, jadwal pelaksanaan self-paced learning diatur secara mandiri oleh peserta dalam batas durasi pelatihan; **Kedua**, Live Session/Webinar yang merupakan sesi tatap muka secara daring/online antara instruktur dan peserta, peserta akan dipandu langsung dan berinteraksi dengan Instruktur.

Ketiga, Hands-on Labs dimana peserta akan mengerjakan suatu project baik secara mandiri atau berkelompok; **Keempat**, Grup Kelas, dimana peserta akan bergabung dalam Grup Kelas yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan Panitia Penyelenggara, Instruktur dan seluruh peserta DTS; **Kelima**, Evaluasi, dimana peserta akan mengikuti proses evaluasi pelatihan dalam bentuk kuis, ujian, atau menyelesaikan sebuah proyek; **Keenam**, Pasca Pelatihan yang meliputi Program Sertifikasi dan Pelatihan Lanjutan yang diberikan khusus kepada peserta dengan kriteria sesuai dengan ketentuan dan keputusan panitia penyelenggara yaitu Kominfo. Kriteria yang dimaksud ialah kemampuan menyelesaikan seluruh sesi pelatihan dan menyelesaikan sebuah project dalam waktu terbatas.

Program Literasi Digital: Menuju SDM yang Melek Informasi

Sama seperti program Digital Talent, literasi digital juga ditujukan untuk membangun SDM masyarakat Indonesia yang melek informasi dan melek teknologi. Tanpa SDM yang melek informasi dan teknologi, maka secanggih apapun infrastruktur TIK yang dibangun, semuanya percuma; ibarat memberikan permata kepada hewan.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa literasi digital merupakan bagian dari DTS tingkat basic, maka sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, Kementerian Kominfo bersama Siberkreasi dan Katadata pada November 2020 lalu telah merilis hasil Survei Literasi Digital Nasional di 34 provinsi. Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan akses internet semakin cepat, terjangkau, dan tersebar sampai ke pelosok. Masyarakat menggunakan internet untuk berkomunikasi melalui pesan singkat, melakukan aktivitas di media sosial, serta menonton video secara online.

Survei ini sejalan dengan hasil survei APJII pada periode yang sama, dimana terdapat 196,71 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 73,7% dari total penduduk. Data ini menunjukkan bahwa ada lompatan pengguna internet dan media sosial di Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, yang juga berarti mengembangkan sumber daya manusia di tingkat basic, Menteri Kominfo mengajak pemerintah daerah mendukung Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Menurut Menteri Johnny, GNLD Siberkreasi yang dimulai tahun 2017, hingga saat ini telah menjangkau 75 juta warganet dengan partisipasi aktif sebanyak 200 ribu orang di 462 titik lokasi.

Menteri Johnny mengharapkan gerakan literasi digital dapat menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, GNLD Siberkreasi dapat menjangkau sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami hal mendasar agar bersama-sama bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital. Hal ini tentunya dalam rangka mendukung kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya UMKM dan ultra mikro onboarding. Melalui program ini, dari sebanyak 64 juta UMKM dan ultra mikro di Indonesia, diharapkan pada tahun 2024 nanti, sekitar 30 juta diantaranya sudah menjadi UMKM dan ultra mikro digital.

Untuk itu, maka GNLD Siberkreasi perlu mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belum lagi GNLD Siberkreasi telah mengharumkan nama bangsa di Forum International Telecommunication Union (ITU) PBB.



GNLD Siberkreasi dapat menjangkau sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami hal mendasar agar bersama-sama bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital





Capaian Infrastruktur TIK

Tantangan Transformasi Digital

di Indonesia

Ditulis oleh:
Mulya Amri, Ph.D
Panel Ahli Katadata Insight Center

Semakin Pentingnya Sektor TIK

Sebesar 4,5% dari perekonomian Indonesia disumbangkan oleh sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Meskipun relatif kecil dari segi ukuran, pertumbuhan sektor TIK di Indonesia sangat pesat. Hanya Indonesia dan Vietnam di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan ekonomi sektor TIK di atas 10% di tahun 2020. Saat pandemi COVID-19

menyurutkan perekonomian di seluruh dunia dan di hampir semua sektor, sektor TIK justru tumbuh sehat. Di Indonesia, tingkat pertumbuhan sektor TIK konsisten naik dari 7,0% (2018), ke 9,4% (2019), ke 10,6% (2020).

Semakin besarnya peran sektor TIK dalam perekonomian adalah keniscayaan karena saat ini sedang berlangsung revolusi digital. Perkembangan TIK dalam satu dekade terakhir telah memungkinkan terciptanya data dalam

jumlah sangat besar (*big data*), yang bergerak mengalir antar perangkat kadang tanpa dikontrol sepenuhnya oleh manusia (*internet of things*). Dan pola-pola yang tercipta dalam aliran *big data* itu dipelajari oleh komputer (*machine learning*) agar dapat membantu pengambilan keputusan.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 merespon tren di atas dan mendukung pencapaian visi dan misi Presiden melalui tiga tujuan utama, yaitu: (1) percepatan penyediaan infrastruktur TIK di seluruh wilayah Indonesia, (2) percepatan transformasi digital dalam industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta (3) peningkatan kualitas pengelolaan informasi publik.

Capaian dalam Percepatan Penyediaan Infrastruktur TIK

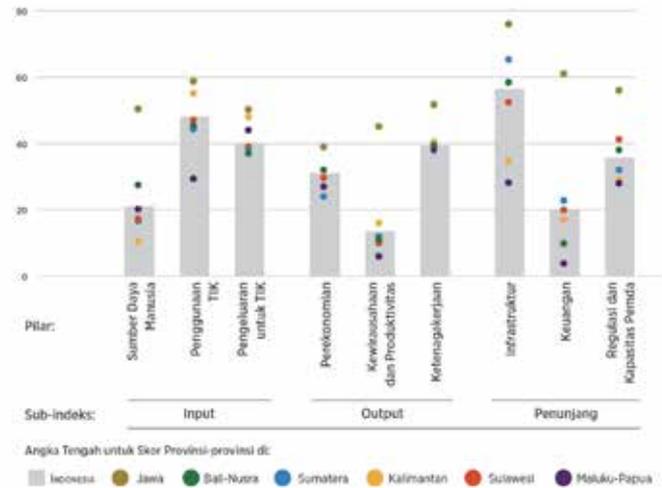
Tujuan yang pertama, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK, adalah yang paling mudah diukur keberhasilannya. Berbagai data statistik menunjukkan Indonesia mengalami progress yang baik dan cepat dalam hal ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur TIK. Data BPS menunjukkan, antara 2019 dan 2020 persentase penduduk Indonesia yang menggunakan internet meningkat dari 48,4% menjadi 54,4%. Laporan tahunan Digital 2021 yang diterbitkan We Are Social dan Hootsuite bahkan memperkirakan pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73,7% dari penduduk. Tingkat pertumbuhan pengguna internet Indonesia pun sangat tinggi, sebesar 15,5% antara Januari 2020 dan Januari 2021.

Peningkatan akses internet terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Ini terlihat dalam laporan Status Literasi Digital Indonesia 2020, yang diterbitkan oleh Kementerian Kominfo bersama Katadata Insight Center berdasarkan survei di seluruh provinsi Indonesia. Hasil survei menunjukkan 68,7% responden merasakan peningkatan kecepatan internet di wilayahnya selama lima tahun terakhir, sementara 71,2% merasakan peningkatan cakupan atau jangkauan internet.

Hal ini juga didukung oleh laporan Indeks Daya Saing Digital provinsi-provinsi Indonesia 2021, yang diterbitkan oleh East Ventures. Dari Sembilan pilar yang diukur dalam indeks ini, pilar infrastruktur TIK mendapatkan skor tertinggi (lihat Gambar 1). Pilar yang mendapat skor tertinggi berikutnya adalah Penggunaan TIK. Ini menunjukkan bahwa sebaran infrastruktur TIK dan tingkat penggunaan TIK di Indonesia sudah cukup tinggi dan relatif merata antar provinsi.

Tantangan dalam Percepatan Transformasi Digital

Di sisi lain, Gambar 1 juga menunjukkan pilar yang mendapat skor terendah, atau paling timpang antar provinsi, yaitu Kewirausahaan dan Produktivitas. Indikator yang menunjukkan hal ini, seperti persentase penduduk yang menggunakan TIK untuk menunjang pekerjaan atau usahanya, masih kecil dan cenderung terpusat di pulau Jawa. Artinya, di kebanyakan daerah lainnya, TIK terutama digunakan bukan untuk kegiatan produktif atau wirausaha, tetapi mungkin hiburan.



Tujuan kedua dari Renstra Kominfo, yaitu transformasi digital, mensyaratkan pemanfaatan TIK dalam semua bidang kehidupan masyarakat: bukan hanya untuk kegiatan hiburan dan konsumtif, tapi juga untuk pekerjaan dan usaha. Laporan Status Literasi Digital Indonesia 2020 masih menunjukkan tingkat paparan terhadap hoaks yang tinggi. Bahkan 11,2% dari responden mengaku pernah mengirim hoaks. Alasan mereka mengirimnya adalah karena mereka hanya meneruskan berita tanpa terlalu dipikirkan apakah itu hoaks atau bukan.

Selain dari ketersediaan dan keterjangkauan akses pada TIK, kemampuan Indonesia untuk melakukan transformasi digital tergantung dari adanya tingkat literasi digital yang tinggi. Upaya untuk meningkatkan literasi digital, antara lain melalui Gerakan Nasional Siberkreasi, sudah banyak mencapai kemajuan. Namun membangun literasi digital nasional adalah upaya yang besar karena aspek-aspek yang ingin dibangun sangat kompleks: mulai dari kemampuan menggunakan teknologi, menerapkan keamanan, berkomunikasi dan berkolaborasi di dunia maya, serta mencerna informasi dan data secara kritis dan produktif.

Tugas yang diemban Kementerian Kominfo, sebagaimana dijabarkan dalam Renstra 2020-2024, sangat penting untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi revolusi digital, agar TIK dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa. Dukungan dari seluruh masyarakat dan sektor-sektor terkait menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan itu.



Ririek Adriansyah

CEO PT Telkom Indonesia

Dukungan Penuh Telkom untuk Transformasi Digital di Indonesia

Upaya pemerintah melakukan transformasi digital masyarakat Indonesia mulai terlihat wujudnya. Perlahan tapi pasti, proses digitalisasi telah berjalan dan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerjasama dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lain.

Berdasarkan peta jalan (*roadmap*) Indonesia Digital yang dimiliki pemerintah, ada 6 arah strategis yang harus dituju dan menjadi dasar pelaksanaan program transformasi digital masyarakat Indonesia. Keenam arah itu adalah membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi; mengubah Indonesia menjadi negara produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform seperti pusat data, komputasi awan; meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas; membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi; membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat dalam mengembangkan dunia digital; dan harmonisasi regulasi serta meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Keenam arah strategis untuk mewujudkan Indonesia Digital itu ditargetkan tercapai maksimal pada 2024. Untuk mewujudkannya, kebijakan transformasi digital harus dieksekusi bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Perluasan cakupan akses infrastruktur digital, penguatan pemanfaatan

teknologi, peningkatan kapasitas talenta digital, dan penyelesaian regulasi pendukung adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyukseskan program Indonesia Digital.

Sebagai kementerian yang memimpin proses transformasi digital di Indonesia, Kemkominfo telah mengorkestrasi terwujudnya digitalisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari terus meningkatnya jumlah ketersediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), meluasnya akses broadband nasional, serta menguatnya jaringan komunikasi di seluruh daerah akibat terus berlangsungnya penyediaan BTS serta akses internet hingga daerah terdepan, terkecil, tertinggal (3T).

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor telekomunikasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen terus mendukung dan bergerak bersama Kemkominfo serta pemangku kepentingan lain untuk mewujudkan transformasi digital masyarakat Indonesia. Telkom telah menetapkan visi untuk menjadi perusahaan digital telekomunikasi terdepan serta menjadi entitas utama penyedia segala layanan dan infrastruktur digital, selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan digitalisasi Indonesia.

Dengan mengandalkan 167.935 kilometer bentangan kabel fiber optic yang dikelola Telkom, saat ini ada semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses internet dan berkomunikasi tanpa kendala di berbagai daerah. Telkom juga mendukung visi transformasi digital

Indonesia melalui penyediaan 231.172 BTS dari Sabang sampai Merauke, penempatan 35.822 menara telekomunikasi Telkomsel dan Mitratel, pengelolaan 133 transponder, pengoperasian 26 data center, serta penyediaan berbagai platform digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Ke depannya, Telkom akan segera memiliki data center terbesar di Indonesia yang mampu menampung lebih dari 10.000 rack dan berdaya 75 MW. Selain itu, Telkom juga telah dan akan terus memperluas implementasi jaringan 5G yang menjadi tulang punggung dunia digital di Indonesia. Keberadaan pusat data berskala besar dan jaringan 5G menjadi instrumen penting bagi Indonesia agar siap menjadi negara terdepan dalam hal pemanfaatan serta penghasil produk-produk digital di tingkat global.

Berlandaskan arah program transformasi digital 2021 dari Kemkominfo, Telkom ke depannya akan terus mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu kami juga mendukung rencana Kemkominfo mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat, serta mengonsolidasikan dan mengoptimalkan infrastruktur dan layanan bersama.

Melalui kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk terus membangun infrastruktur serta mempersiapkan SDM yang siap go digital, kami yakin visi pemerintah dalam Indonesia Digital akan terwujud tepat waktu

Telkomsel
by Telkom Indonesia



Hendri Mulya Syam

Direktur Utama Telkomsel

Telkomsel Dukung Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020-2024 untuk Percepatan Transformasi Digital Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Kondisi demografi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar, bahkan diprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2024. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pandemi COVID-19 yang masih menjadi tantangan, perkembangan ekonomi dunia saat ini mengarah kepada ekonomi digital. Oleh karena itu untuk dapat mencapai potensi ekonomi secara maksimal perlu adanya transformasi digital di Indonesia, yang sesuai dengan Rencana Strategis Kemenkominfo (Renstra) Tahun 2020-2024.

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam mengatakan "Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan siap mendukung komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI melalui Rencana Strategis Kemenkominfo (Renstra) Tahun 2020-2024 yang dapat mendorong semangat seluruh pelaku industri dalam membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Salah satunya dengan mendorong percepatan transformasi digital yang mensinergikan tiga aspek penting, yakni bisnis/industri, masyarakat dan pemerintahan, termasuk dengan meningkatkan kompetensi talenta sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang saat ini sebagian besar berada pada usia produktif agar memiliki kompetensi digital, sehingga dapat bersaing secara global."

“

...mensinergikan tiga aspek, yakni bisnis/ industri, masyarakat dan pemerintahan, termasuk meningkatkan kompetensi digital talenta SDM Indonesia.”

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam



Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya penyediaan internet cepat dan berkualitas merupakan landasan utama percepatan transformasi digital nasional. Dengan adanya infrastruktur TIK yang dapat menjangkau seluruh wilayah populasi di Indonesia, masyarakat dapat mengakses berbagai aplikasi dan konten untuk mengembangkan kompetensi maupun mengembangkan usaha sehingga dapat terbangun ekosistem digital bagi masyarakat, pemerintah, dan industri termasuk sektor-sektor strategis untuk dapat melakukan aktivitas dari lokasi masing-masing di masa pandemi sehingga ekonomi nasional dapat terus bertumbuh, serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diimplementasikan sampai ke seluruh daerah. Pembangunan infrastruktur TIK khususnya implementasi teknologi berorientasi ke depan seperti 5G juga dapat mendukung

pengembangan Industri 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan transformasi sektor industri yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Telkomsel sendiri hingga akhir 2020 lalu telah menggelar lebih 231.000 BTS yang sebagian besar sudah terhubung jaringan broadband 3G/4G hingga ke pelosok negeri. Telkomsel bersama BAKTI Kominfo juga telah memastikan seluruh BTS USO yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan dan terdalam) terhubung dengan teknologi 4G/LTE. Secara bertahap hingga 2022 nanti, Telkomsel juga telah berkomitmen untuk membangun BTS 4G/LTE di 1.500 wilayah desa/kelurahan non-3T yang sebelumnya belum mendapatkan akses telekomunikasi broadband atau 100% dari target yang telah diamanahkan pemerintah melalui Kemenkominfo RI.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan *mobile broadband* yang dapat menjangkau sampai seluruh pelosok Indonesia, diperlukan adanya peran pemerintah dalam beberapa hal penting diantaranya : penyediaan spektrum frekuensi radio baik untuk pemenuhan *coverage*, tambahan kapasitas, maupun implementasi teknologi baru berorientasi ke depan (5G) dengan biaya yang terjangkau; penerbitan regulasi yang mendukung pengembangan *mobile broadband* baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; serta menjaga kesehatan industri telekomunikasi agar tetap sustain dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di tengah-tengah adanya kompetisi tarif dan disrupsi layanan oleh pelaku bisnis layanan OTT (*Over The Top*).

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, terutama adanya teknologi *Internet of Thing* (IoT) dan 5G yang disertai dengan



aplikasi dan platform sebagai solusi yang terintegrasi seperti untuk Smart City atau pengembangan aplikasi *e-government* lainnya, ke depan diprediksi akan sangat banyak jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia untuk mendukung perkembangan

teknologi tersebut serta akan memerlukan proses pengujian yang lebih kompleks karena melibatkan pengujian terhadap aplikasi dan platform.

Hal tersebut tentunya akan memerlukan lab uji yang memiliki kapasitas yang besar dan kapabilitas yang lengkap, di mana pengembangan lab uji tersebut apabila seluruhnya menggunakan APBN akan memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, di sisi lain perkembangan teknologi tersebut memerlukan sumber daya dengan kompetensi yang mumpuni untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global.

Sebagai solusi pemenuhan kebutuhan ketersediaan lab uji, pemerintah dapat mendorong pelaku usaha/industri untuk turut serta berperan dalam penyediaan lab uji melalui kemudahan perizinan berusaha dan pemberian insentif sehingga kebutuhan akan adanya lab uji dapat dipenuhi oleh pemerintah maupun swasta yang sekaligus dapat mempersiapkan pelatihan SDM untuk pengembangan teknologi terbaru seperti 5G ke depan.

Saat ini sebagian besar infrastruktur TIK *mobile broadband* untuk penyediaan internet cepat dan berkualitas di Indonesia dibangun oleh penyelenggara jaringan

bergerak seluler, di mana spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya utama bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk dapat menggelar infrastruktur TIK. Apabila spektrum frekuensi tersebut harus digunakan juga untuk implementasi program pemerintah yang lain, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap percepatan transformasi digital.

Oleh karena itu, untuk dapat mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia diharapkan pemerintah dapat memenuhi penyediaan spektrum frekuensi radio baik untuk penggelaran infrastruktur TIK maupun implementasi program pemerintah lainnya termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut Hendri menambahkan, "Selain percepatan pembangunan infrastruktur TIK, pemerintah diharapkan dapat menerbitkan regulasi yang mendukung industri digital nasional agar terdapat equal level playing field antara industri digital nasional dengan raksasa digital dunia, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama di era teknologi 5G yang diprediksi memiliki potensi ekonomi yang sangat besar."

Pada Mei 2021, Telkomsel juga telah meraih Surat Keterangan

Laik Uji Operasional (SKLO) untuk komersialisasi layanan 5G di Indonesia, yang kemudian dilanjutkan Telkomsel dengan menjadi operator telekomunikasi seluler pertama yang meluncurkan layanan 5G di Indonesia. Pada tahap awal, layanan 5G Telkomsel sudah dapat dinikmati pelanggan di sejumlah titik tertentu di 9 kota besar di Indonesia, yang ke depannya akan semakin dikembangkan, baik cakupan jaringan hingga pengembangan produk dan layanan yang terhubung dengan keunggulan jaringan 5G, sesuai dengan kesiapan ekosistem gaya hidup digital masyarakat.

"Telkomsel memandang, dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2020–2024, Kemenkominfo telah memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik; mempercepat digitalisasi industri penyiaran, farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, serta menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional. Telkomsel berharap, dengan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, industri dan masyarakat, maka percepatan transformasi digital di Indonesia dapat segera terwujud dan mendorong kebangkitan masyarakat untuk terus tumbuh menjadi Indonesia menjadi negara dengan potensi ekonomi digital terdepan di tingkat global," pungkas Hendri.





Steve Saerang

SVP-Head of Corporate Communications
Indosat Ooredoo

Rencana Strategis (Renstra) Kominfo 2020-2024: “Menuju Digital Nation”

PERAN OPERATOR WUJUDKAN BANGSA DIGITAL

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang kini telah mengubah kehidupan sosial masyarakat dalam menjalin komunikasi; interaksi tak lagi terjadi antar manusia, namun manusia dengan mesin, dan bahkan mesin dengan mesin. Era digitalisasi ini, disadari atau tidak, telah membawa masyarakat menuju era masyarakat digital.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah meluncurkan Rencana Strategis (Renstra) Kominfo tahun 2020-2024 yang meliputi 3 tujuan strategis yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Lalu bagaimana posisi operator dalam kebijakan ini?

Bagaimana operator dapat berperan dalam roadmap Kominfo ini? Steve Saerang, SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo membagikan pandangannya.

A Clear Path Forward

T: Bagaimana pendapat Bapak terkait Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang diluncurkan Kominfo?

Kami sangat mengapresiasi rencana strategis pemerintah tersebut. Melalui rencana strategis ini, maka pelaku industri memiliki gambaran target dan milestone yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dengan demikian sebagai korporasi, kami dapat melakukan antisipasi-antisipasi yang diperlukan. Ini juga membantu menyinergikan seluruh upaya digitalisasi sehingga semua pihak bergerak ke tujuan yang sama, yakni menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital serta digital powerhouse di kawasan.



T: Memasuki tahun kedua pelaksanaan Renstra, apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan pemerintah untuk mencapai target-targetnya tersebut?

Khusus terkait telekomunikasi, saya rasa beberapa program sudah berjalan dengan baik, misalnya registrasi IMEI, e-licensing untuk spektrum frekuensi, serta beberapa program untuk penataan frekuensi. Pelaksanaan program yang mengedepankan dialog dalam mencari solusi untuk industri juga sangat kami hargai sehingga potensi terjadinya gejolak dapat dihindari.

Beberapa program lain juga sudah mulai diterapkan meski penyelesaiannya memerlukan waktu. Misalnya konsolidasi industri, perbaikan prosedur registrasi pelanggan, dan digitalisasi penyiaran. Perangkat regulasi sebagian sudah diterbitkan (misalnya terkait konsolidasi), dan sebagian sudah mulai dilaksanakan (digitalisasi penyiaran). Secara umum kami merasa upaya-upaya ini on-track dengan tujuan yang ditetapkan pada Renstra dan adalah tugas bersama untuk mempercepat proses tersebut.

Tantangan Bersama ke Depan dan Peran Operator

T: Sampai saat ini, apa saja yang sudah dipersiapkan operator telekomunikasi untuk mendukung visi Indonesia menuju bangsa digital?

Operator, terutama penyelenggara seluler telah melakukan pembangunan jaringan 4G ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur 4G ini menjadi tulang punggung dalam pemerataan penyebaran layanan digital yang akan sangat sulit dilakukan dengan menggunakan teknologi infrastruktur lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, operator juga telah mempersiapkan diri menuju era 5G dengan melakukan modernisasi peralatan internal, menggelar lebih banyak jaringan fiber optic, dan mempersiapkan infrastruktur pita lebar. Guna mengedukasi dan mempercepat penetrasi 5G, kami juga meluncurkan layanan 5G di beberapa lokasi terlebih dahulu dengan harapan bahwa ekosistem yang 5G-ready bisa segera tercipta.

T: Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah implementasi layanan seluler generasi ke-5 (5G). Bagaimana pendapat Bapak dari sisi kesiapan regulasi, infrastruktur, dan industri?

Implementasi 5G saat ini sudah dimungkinkan secara regulasi. Namun belum memungkinkan penyediaan pengalaman 5G yang sesungguhnya karena keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menambah ketersediaan spektrum frekuensi lagi serta memudahkan terjadinya sharing antar operator.

Ada dua hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah, pertama adalah spektrum. Frekuensi seluler yang ada sekarang jelas tidak cukup untuk dapat dimanfaatkan dalam menyelenggarakan layanan 5G secara optimal. Pemerintah perlu merilis frekuensi tambahan dalam 1-2 tahun ke depan untuk memastikan layanan 5G di Indonesia dapat diselenggarakan secara optimal. Kedua, dorongan untuk kerjasama dan konsolidasi industri melalui penguatan regulasi, sehingga efisiensi nasional dapat tercapai. 5G tidak mungkin dapat dilaksanakan secara optimal apabila seluruh operator seluler melaksanakan pembangunan secara sendiri-sendiri. Akan banyak duplikasi infrastruktur yang membuang sumber daya secara nasional.

Dari segi industri, operator sudah mulai mempersiapkan 5G sejak beberapa tahun lalu dengan melakukan modernisasi jaringan dan investasi fiber optic. Pembangunan infrastruktur digital ini belum matang, tapi setidaknya diharapkan dapat mulai membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi dan layanan digital yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat lain.



T: Hambatan apa yang operator hadapi dalam mengimplementasikan jaringan 5G?

Hambatan utama adalah mahalnya penggelaran jaringan; mulai dari mahalnya biaya hak penggunaan spektrum, sampai pada perizinan dalam penggelaran fiber optic dalam bentuk biaya sewa dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah maupun pemilik lahan. Di kota-kota besar, terutama high-raised building, sarana publik dan wilayah tertentu (misalnya cluster perumahan), para pemilik aset seringkali menetapkan biaya yang mahal bagi operator untuk menggelar jaringan.

T: Untuk sukses menggelar 5G, dibutuhkan ekosistem digital yang memadai, termasuk penetrasi perangkat dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kondisi unsur-unsur tersebut di Indonesia saat ini?

Aspek penetrasi perangkat ini akan sangat bergantung pada dua hal: regulasi pemerintah (misalnya TKDN, termasuk biaya-biaya untuk impor) dan keinginan dan/atau kemampuan masyarakat sendiri untuk membeli perangkat. Pasalnya, ketersediaan perangkat yang mendukung 5G di pasar Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif mahal.

Kami juga setuju bahwa talenta digital juga penting untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Saat ini Indonesia masih kekurangan talenta digital, terutama dalam inovasi-inovasi teknologi baru. Kami sangat sepakat dengan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan jumlah talenta-talenta digital. Bahkan Indosat memiliki program ID-Camp yang bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan digital masyarakat.

Tapi selain talenta teknologi, Indonesia perlu juga mengembangkan talenta dalam ekonomi kreatif; talenta yang mampu membuat konten-konten yang tak hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, juga dapat "dijual" ke pasar luar negeri.

T: Terakhir, bagaimana proyeksi Bapak terhadap dunia digital Indonesia lima tahun ke depan?

Seiring dengan perkembangan internet, akan ada perkembangan layanan berbasis digital yang masif di Indonesia. Dengan adanya internet, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan daring yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh, layanan berbasis video di Indonesia mengalami lonjakan ketika operator menggelar layanan 4G dan masyarakat dapat mengakses konten video dengan nyaman. Sebelum 4G tersebar, layanan YouTube, Netflix, dan streaming lainnya sudah ada, namun tidak tumbuh subur di Indonesia. Konten digital masih terbatas pada tulisan (misal blog). Tapi ketika jaringan 4G menyebar, mulai muncul kreator-creator konten berbasis video. Penyebaran informasi juga semakin masif dengan menggunakan video.



Pelan namun pasti layanan 5G akan mendominasi. Dengan 5G, maka jaringan akan berevolusi menjadi lebih cepat dan latensi lebih rendah. Layanan baru yang bahkan mungkin belum terpikirkan sekarang akan dimungkinkan. Use-case 5G yang selama ini digaungkan (contoh: self-driving car, otomatisasi pabrik, dll) bisa saja terjadi, namun layanan yang muncul dari kreativitas masyarakat akan lebih dominan. Perlu pula digarisbawahi bahwa 5G tidak hanya soal kecepatan dan latensi, tapi juga berbagai peluang baru yang terbuka lebar. Ada banyak industri dan lapangan pekerjaan baru yang muncul, inefisiensi layanan yang dihilangkan, dan kegiatan ekonomi yang diperlancar. Harapannya, ini akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Dian Siswarini

CEO XL Axiata

Layanan 5G dan Perluasan Jaringan Pita Lebar

Indonesia telah masuk ke era 5G. Meskipun masih dengan berbagai keterbatasan yang menyertainya, antusiasme yang ditunjukkan beberapa operator dengan mulai mengajukan uji layak operasi (ULO) dan dilanjutkan dengan peluncuran program komersialisasi layanan 5G, tetap menandai telah masuknya Indonesia ke era internet super cepat tersebut. Dengan dukungan besar yang juga ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), fenomena 5G di tanah air akan terus bergulir mengejar titik idealnya. Ibarat bola salju yang menggelinding, semua pelaku industri telekomunikasi sudah selayaknya melakukan penyesuaian.

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) juga sudah bersiap untuk menyusul beberapa operator yang sudah lebih dahulu lolos uji operasi (ULO) 5G. Meski belum memiliki frekuensi khusus untuk 5G, XL Axiata akan menggunakan teknologi DSS (dynamic spectrum sharing) yaitu memanfaatkan frekuensi yang dimiliki saat ini untuk layanan 4G, untuk mencoba menjalankan teknologi 5G. Tentu saja, penggunaan DSS ini bersifat sementara, sembari menunggu ketersediaan frekuensi yang memang khusus untuk 5G di masa mendatang. Selain frekuensi, ekosistem penunjang 5G lainnya juga masih dibutuhkan, antara lain dukungan kebijakan pemerintah dalam kemudahan penyediaan infrastruktur pendukung pembangunan telekomunikasi. Kebijakan tersebut perlu untuk percepatan transformasi digital maupun insentif dalam bentuk pengurangan *regulatory cost*.

Satu hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penyelenggaraan 5G adalah perluasan jaringan pita lebar. Manajemen XL Axiata mendukung visi pemerintah yang tertuang dalam sasaran strategis Kementerian Kominfo, dalam hal ini adalah "Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang "cepat dan terjangkau" dan "Terwujudnya Konektivitas Next Generation Broadband Nasional". Asumsinya, teknologi jaringan bisa saja terus semakin maju dan canggih, namun tidak akan banyak berarti jika tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk itu diperlukan perluasan jaringan hingga mampu menjangkau semaksimal mungkin wilayah Indonesia. Dengan demikian, layanan 5G bisa menjadi sarana untuk mendukung percepatan pembangunan di semua bidang, serta meningkatkan kualitas hidup sebagian besar masyarakat Indonesia.

XL Axiata telah memberikan komitmen kepada pemerintah untuk membangun jaringan data berkualitas ke sebanyak 861 desa terpencil yang dikategorikan sebagai wilayah non-3T serta lokasi-lokasi tertentu di wilayah 3T melalui program pemerintah yang diselenggarakan oleh BAKTI.

Komitmen tersebut sesuai dengan data yang diajukan pemerintah. Desa-desa itu selama ini belum terjangkau oleh jaringan data, sehingga bisa dikategorikan sebagai desa yang cukup tertinggal dari sisi jangkauan informasi. Ketersediaan jaringan data hingga ke desa-desa terpencil seperti itu akan memungkinkan percepatan pembangunan, terutama dalam penyediaan berbagai sarana sosial dan ekonomi berbasis digital, seperti pendidikan dan kesehatan, perbankan, juga pemasaran. Selain itu, berbagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat setempat juga bisa lebih mudah dilakukan, seperti misalnya pelatihan kewirausahaan, pertanian, UMKM, hingga pengelolaan keuangan.

Mengingat urgensi perluasan jaringan data hingga pelosok daerah secara maksimal tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari Kementerian Kominfo sebagai regulator untuk bisa memperingan beban operator dalam pembangunannya. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah Kementerian Kominfo mampu menjadi fasilitator di dalam penentuan tarif infrastruktur pasif yang menjadi salah satu fondasi dalam kerangka Renstra 2020 – 2024 dan sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024 pembangunan infrastruktur dapat terimplementasi dengan cepat.

smartfren.



Merza Fachys

Presiden Direktur Smartfren

Sumber Foto : [Marketeers.com](https://www.marketeers.com)

Smartfren Dukung Penuh Renstra Koinfo 2020- 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional

Oleh : Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren

Memasuki tahun 2000, dunia dan khususnya Indonesia dihadapkan pada situasi di mana rakyat Indonesia belum pernah mengalaminya. Adanya pandemi COVID-19, memaksa sebagian pekerja dan pelajar di Indonesia untuk melakukan pekerjaan dan proses belajar mengajar dari rumah. Tak terbantahkan, semua proses kini dilakukan secara online dan digital yang semuanya harus bisa dilakukan dan diakses dari jarak jauh.

Smartfren sebagai operator penyedia jasa layanan data, berupaya maksimal agar komunikasi tetap berjalan selama masa pandemi ini, begitu pula dengan percepatan digitalisasi di berbagai bidang. Smartfren telah berperan sebagai agregator dan fasilitator digitalisasi bagi semua sektor usaha serta layanan masyarakat. Selaras dengan Renstra Koinfo 2020 – 2024, Smartfren mendukung upaya Koinfo untuk percepatan digitalisasi di semua sektor. Dukungan Smartfren terhadap telah dan terus dilakukan untuk mewujudkan digitalisasi yang berbagai sendi kehidupan masyarakat dan di semua sektor usaha. Seiring dengan kebutuhan layanan digital yang meningkat dan meski berada dalam situasi sulit pun, seperti pandemi COVID-19 saat ini, Smartfren tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menambah 9000 BTS dari sebelum pandemi yang berjumlah 31 ribu BTS (*Base Transceiver Station*).

Jauh sebelum pandemi hadir, Smartfren menyiapkan produk dan layanan terbaiknya untuk dapat membantu masyarakat membuka dan menciptakan peluang (*Open Possibilities*) seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya para generasi muda untuk tetap berkreasi dan menciptakan hari esok yang lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin perkembangan dunia digital. Hadirnya pandemi tidak mematahkan semangat Smartfren untuk tetap meningkatkan jangkauan layanan agar semakin dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke pelosok negeri. Smartfren juga terus meningkatkan layanannya dengan menghadirkan jaringan 4G LTE yang memiliki cakupan luas secara nasional, dengan tingkat ketersediaan tertinggi dan menjadi satu-satunya operator seluler di Indonesia yang beroperasi di jaringan 4G seluruhnya.





Upaya ini terus dilakukan Smartfren untuk mendukung masyarakat, agar tetap dapat menjalankan aktivitasnya (*New Normal*) dan berkeaktivitas di tengah pandemi. Smartfren melalui wadah Teman Kreasi Indonesia yang merupakan gerakan sosial dan sebuah inisiatif strategis dari Komunitas Smartfren yang tersebar di 100 kota dengan jumlah anggota 90 ribu anggota.

Melalui Teman Kreasi Indonesia, ada 5 program utama yang dijalankan

1. Buka Peluang (Open Possibilities),

Smartfren membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia supaya terus produktif dan kreatif dengan menggunakan teknologi digital

2. Ko-kreasi,

melakukan kolaborasi kreasi bersama dalam hal penciptaan kreasi yang positif dan bermanfaat

3. Social Digital Technopreneur,

penumbuhan kewirausahaan sosial dari setiap anggota Teman Kreasi Indonesia untuk mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya secara, sosial, ekonomi, pendidikan dsb.

4. Local Heroes,

mendorong *local influencer* yang difasilitasi Smartfren untuk terus memberikan impact positif bagi masyarakat sekitarnya

5. Sustainable Community Development,

mampu membawa Komunitas Smartfren untuk membangun komunitas yang mandiri dan melakukan aktivitas positif secara terus menerus dan berkelanjutan

Inilah yang merupakan salah satu wujud kontribusi Smartfren kepada negeri dalam rangka mendukung program Pemulihan Perekonomian Nasional dan Percepatan Transformasi Digital

Selain itu, dalam dunia pendidikan Smartfren bersama operator lain juga mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan pengadaan kuota khusus pelajar agar proses belajar mengajar bisa terus dijalankan selama pandemi ini.

Menyongsong era digital, kebutuhan akan layanan data yang berkualitas kian hari kian bertambah. Tidak dipungkiri lagi bahwa kemajuan layanan data telah membuka pintu perubahan dalam gaya hidup sehari-hari. Bagi kaum millennial, hal ini berarti lebih banyak lagi cara-cara kreatif untuk mengekspresikan

diri dan untuk terus terhubung dengan dunia. Teknologi 4G telah membawa kesempatan untuk berkembang di bidang-bidang yang dahulu tidak terbayangkan dengan cara-cara lama, dan memungkinkan tiap individu bebas berkreasi sesuai dengan minatnya sendiri. Digitalisasi pun semakin mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan seiring dengan Bergerak ke dunia digital, layanan data akan semakin dibutuhkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian. Smartfren hadir dengan layanan 4G LTE yang semakin baik, luas dan terjangkau.

Melalui layanan internet yang sudah diluncurkan, seperti layanan *Unlimited* dan *Gokil Max*, Smartfren hendak mendorong kaum kreatif millennial dan Gen Z.

Smartfren memfasilitasinya dengan layanan ini agar kaum muda terus berkreasi tanpa kekhawatiran akan batasan, didukung dengan layanan data 4G LTE yang terbaik dan dengan jaringan terluas di seluruh Indonesia

Memasuki era teknologi 5G, Smartfren siap menggelar teknologi ini dan berupaya agar implementasi teknologi ini tepat sasaran, terutama agar pemanfaatan teknologi ini tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama bisa mempercepat modernisasi dan percepatan implementasi digital bagi dunia perindustrian, kesehatan, transportasi dan sektor lainnya.

Sumber Foto : Unsplash.com - Deepak Kumar





Kebangkitan Digital Indonesia

Indonesia Terkoneksi,

Semakin Digital Semakin Maju

Oleh: **Dr. Devie Rahmawati M. Hum**
Tenaga Ahli Menkominfo
Bid. Komunikasi dan Media Massa

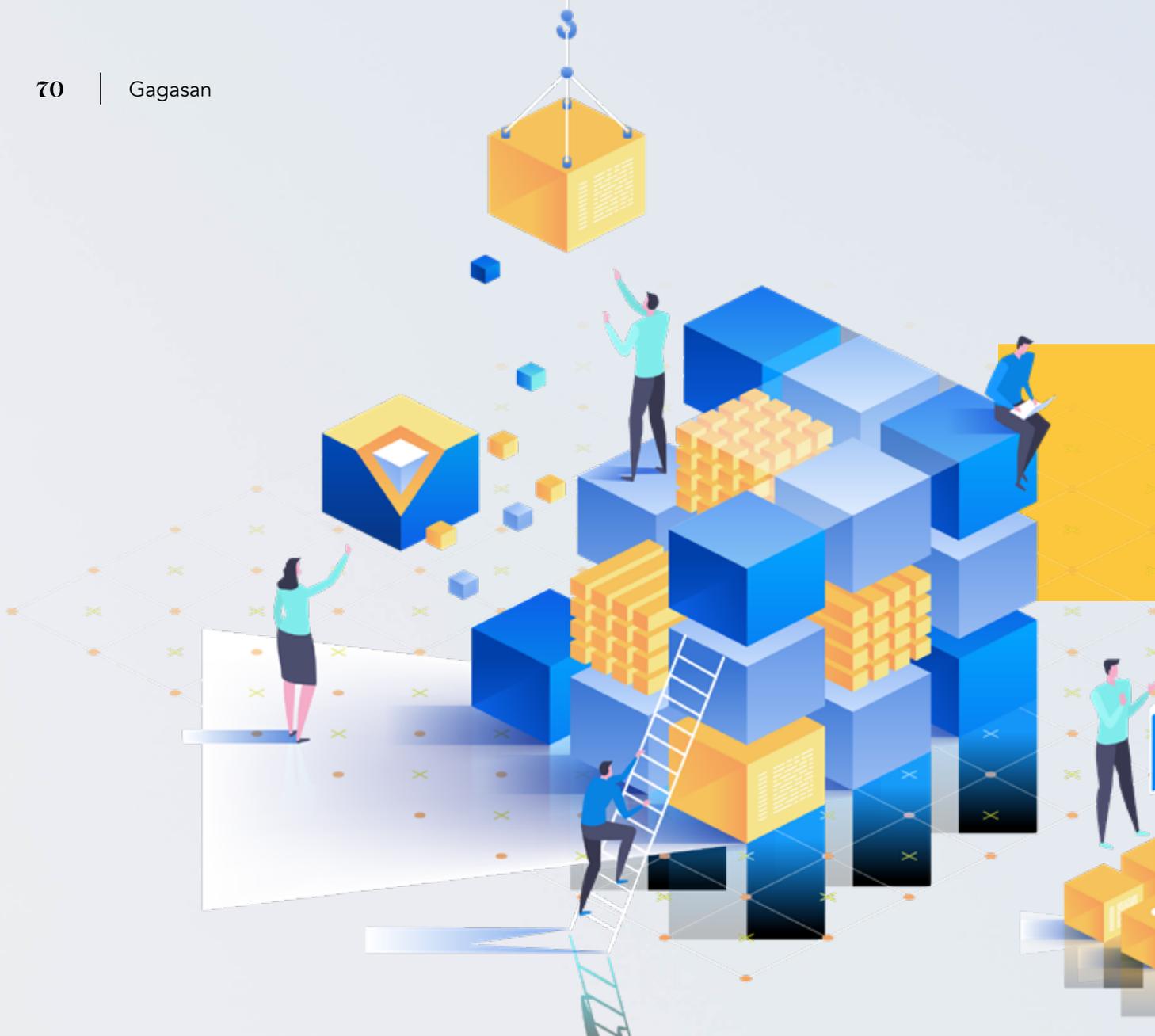
Transformasi teknologi digital berlangsung sangat cepat, bukan lagi dalam hitungan hari, tapi menit bahkan detik. Kemajuan yang terus berlangsung kadang membuat kita tidak bisa mengapresiasi, atau “taken for granted”, terhadap kerja besar di balik transformasi tersebut. Hingga tahun 2020 ini, sejumlah inisiatif besar pembangunan infrastruktur digital telah dirampungkan oleh pemerintah. Dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, hanya terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan pita lebar 4G. Kebutuhan akses internet di seluruh wilayah desa/kelurahan Indonesia ditargetkan dapat terpenuhi pada tahun 2022, **10 tahun lebih cepat dari rencana awal pada tahun 2032.**

Kondisi saat ini, ketika teknologi digital sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari, merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kerja keras anak bangsa di berbagai sektor. Harus ada satu tonggak waktu agar proses dan perjalanan yang panjang serta kerja keras menggugah kesadaran kita untuk memanfaatkan capaian kita semaksimal mungkin.

Kesadaran itu pula yang membawa kita semua perlu berkaca pada perjalanan sejarah bangsa, khususnya mengenai tumbuhnya kesadaran kebangsaan yang dipicu oleh pendidikan dan interaksi dengan pemikiran-pemikiran di dunia yang luas. Bayangkan, di tengah keterbatasan komunikasi dan informasi, para pendiri bangsa kita dapat menyerap saripati perdebatan pemikiran dunia dan merefleksikannya dalam perjuangan membangun kesadaran kebangsaan.

Jika dianalogikan dengan kondisi sekarang, koneksi para pendiri bangsa dengan sumber informasi di luar sana, yang akhirnya membawa pencerahan dan kesadaran kebangsaan, mirip dengan teknologi digital yang dapat mengoneksikan kita dengan begitu banyak sumber informasi bermanfaat yang akan menambah wawasan dan kesadaran kita.





Pada peristiwa sejarah, kesadaran itu kemudian tersebar luas hingga menghasilkan momentum Kebangkitan Nasional yang meluas. Pada kondisi sekarang, kesadaran itu ingin kita sebarluaskan dalam kesadaran makin cakap digital sehingga kemajuan teknologi digital dapat betul-betul membawa manfaat.

Itulah mengapa Presiden mencanangkan Gerakan Literasi Digital Nasional: Indonesia Makin Cakap Digital pada tanggal 20 Mei 2021 lalu, yang kemudian dapat dimaknai sebagai momen "Kebangkitan Digital Nasional". Karena jika transformasi digital hanya dimaknai sebagai kemajuan fisik teknologi, maka kemajuan itu hanya pada permukaan saja. Acara tersebut merupakan langkah awal pendidikan bagi masyarakat yang luas, sehingga ketika kesadaran digital

tersebut mencapai angka yang cukup besar dari proporsi penduduk kita, kesadaran itu akan berbuah momentum menggerakkan bangsa untuk bangkit dan maju. Kemajuan suatu bangsa membutuhkan "critical mass" yang cukup agar terbentuk momentum "ledakan" kemajuan.

Di sinilah pentingnya kita juga membangun TALENTA DIGITAL agar kemajuan infrastruktur juga dibarengi dengan kemajuan kualitas sumber daya manusia yang CAKAP dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk tujuan-tujuan yang positif. Talenta digital inilah yang akan mentransformasi ketersediaan infrastruktur dan konektivitas menjadi DAYA SAING di berbagai bidang, apakah itu akademis, bisnis, UMKM, hingga pemberdayaan sosial.



Karena itu, Kebangkitan Digital Nasional tersebut akan terus diikuti oleh pembentukan talenta makin cakap digital di sejumlah kabupaten/kota di 34 provinsi sebagai hub pendidikan masyarakat. Pada hub tersebut, masyarakat bisa belajar memanfaatkan teknologi digital sesuai kebutuhannya. Bagi UMKM bisa belajar untuk bergabung ke sistem perbankan dan e-commerce; untuk pelajar bisa mencari referensi dan bahan pelajaran; bagi pekerja industri kreatif dapat digunakan untuk menambah nilai bagi pekerjaannya atau memamerkan pekerjaannya agar mendapat akses pasar yang lebih luas, dan masih banyak lagi.

Dalam perspektif di atas, teknologi digital adalah instrumen pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pilihan pekerjaannya masing-masing. Bahkan petani dan nelayan pun dapat mengambil manfaat dari teknologi digital agar lebih berdaya dan mendapat manfaat bagi kesejahteraannya.

Tantangan global di era Revolusi Industri 4.0 serta pandemi COVID-19 kian memicu dan memacu akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai platform esensial dalam hidup bermasyarakat. Pemerintah harus siap untuk terus update dan upgrade teknologi digital dalam melayani masyarakat.

Untuk itu Program Transformasi Digital Nasional menjadi strategi yang ditandai dengan dua hal yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas talenta digital (*man-structure*). Hadirnya "jalan tol" sinyal bagi seluruh anak negeri merupakan upaya pemerintah untuk mempersempit digital divide di Indonesia. Diharapkan seluruh masyarakat Indonesia akan terkoneksi dengan jaringan internet pada tahun 2024.

Survei Global World Digital Competitiveness Index yang dirilis Institute Management Development (IMD) menunjukkan bahwa peringkat literasi digital Indonesia mengalami peningkatan. Sebagaimana data ITU (International Telecommunication Union) yang menunjukkan bahwa kita yang sebelumnya berada pada peringkat 115, maka di tahun 2020 sudah menempati peringkat 111.

Capaian ini sejalan dengan Hasil Survei Literasi Digital yang Kominfo lakukan pada tahun 2020. Skor Literasi Digital Indonesia masih berada pada rata-rata 3,4 dari skala 5. Skor ini sedikit meningkat di akhir tahun 2020. Dengan nilai rata-rata literasi digital Indonesia menjadi 3,1, telah terjadi perubahan perlahan tapi pasti pada penguatan kecakapan digital.

Masyarakat harus dapat menggunakan internet secara bijak dengan cakap bermedia digital. Cakap berarti mampu menentukan tujuan strategis kita dalam beraktivitas digital, dan mampu menavigasikan diri kita secara teknis untuk mengakses sisi positif dan menghindari tantangan negatif seperti penyebaran informasi palsu; penyalahgunaan data pribadi dan jejak digital; penipuan scam, phishing; perundungan di ruang siber; juga perilaku asusila dan tidak berbudaya di ruang digital.

Itulah makna strategis Kebangkitan Digital Nasional pada 20 Mei 2021 lalu. Kita sengaja berkaca pada perjalanan sejarah bangsa untuk mendapat inspirasi agar dapat melaju ke depan, menuju Indonesia Maju yang berpengaruh dan dihormati di dunia. Dengan momentum kebangkitan digital ini, kita wujudkan Indonesia Terkoneksi, semakin digital semakin maju untuk kesejahteraan rakyat dan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Selamat Datang Jaringan 5G di Indonesia!





Indonesia siap menyambut Jaringan 5G. Berbagai perencanaan telah dilakukan pemerintah dibawah Kementerian Kominfo untuk menyambut jaringan telekomunikasi generasi kelima tersebut. Peluncuran 5G di Indonesia menjadi momentum percepatan akselerasi transformasi digital.

Kementerian Kominfo menargetkan untuk menggelar layanan 5G di 13 lokasi hingga 2024. Lokasi tersebut terdiri dari enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, lima destinasi wisata super prioritas, Ibu Kota Negara (IKN), dan satu industri manufaktur.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2/2021, Pemilihan lokasi enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa sebagai pilot project pada tahap awal implementasi 5G, karena enam lokasi tersebut dianggap feasible baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur

“Pergelaran akan dilakukan secara bertahap dan pada tahap awal bersifat terbatas di sejumlah titik. Mulai sekarang, operator perlu mulai menghitung monetisasi dari investasi sehingga dapat memilih wilayah dengan profil lalu lintas data yang tinggi, atau yang nyaris menyentuh kapasitas maksimumnya dengan jaringan 4G,” tutur Menkominfo Johnny G. Plate dalam keterangan persnya, Kamis (25/03/2021).

Untuk menyambut jaringan 5G, Kementerian Kominfo membuat roadmap serta regulasi atau kebijakan percepatan jaringan 5G. Pemerintah juga menyiapkan aturan tambahan terkait pengelolaan jaringan 5G yang memuat lima aspek, yaitu regulasi, spektrum frekuensi radio, model bisnis, infrastruktur, dan ekosistem, perangkat, dan talenta digital.

“UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum khususnya terkait dengan *infrastructure sharing* aktif maupun pasif dan juga *frequency sharing* yang akan mendukung penerapan teknologi 5G di lapangan,” ungkap Johnny.

Di lain kesempatan, Menkominfo mengatakan bahwa peluncuran 5G dapat mendorong lompatan besar inovasi digital. “Melalui 5G, adopsi dan inovasi teknologi digital di berbagai sektor dapat terus kita tingkatkan, baik untuk pengembangan ekonomi, *health technology*, *education technology*, *electronic government*, dan *smart city*, serta berbagai sektor lainnya,” ucap Menkominfo pada peluncuran 5G Indosat di Surakarta secara virtual.



Kementerian Kominfo melakukan tiga upaya untuk terus mendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi 5G. Pertama, penyiapan pita spektrum frekuensi yang memadai melalui farming dari refarming frekuensi spektrum. Kedua, mendorong pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, Kementerian Kominfo juga akan terus melaksanakan penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 4G di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal)

"Melalui tiga upaya tersebut diharapkan Indonesia memiliki lompatan-lompatan besar yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat," lanjut Johnny.

Menkominfo berharap implementasi teknologi 5G di Indonesia dapat semakin mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan, menjembatani kesenjangan digital (digital divide), meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“

Kami berharap komersialisasi 5G dapat berkontribusi mewujudkan visi nasional menjadi digital powerhouse di kawasan. Mari bersama kita pastikan kehadiran layanan 5G ini akan membawa beragam manfaat bagi bangsa dan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi,” ucap Johnny.



Berdasarkan riset yang dilakukan Qualcomm, 5G membawa dampak ekonomi yang besar dan disebut mampu mendorong ekonomi global hingga USD 13,1 triliun pada 2035.

Maka dari itu, Menkominfo mengajak penyelenggara telekomunikasi menjadi bagian dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia. "Karenanya, kami mendorong Penyelenggara Telekomunikasi lainnya untuk dapat turut serta dalam percepatan implementasi 5G di Indonesia, dan bersama-sama menyongsong Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju," pungkas Menkominfo.



DUKUNGAN OPERATOR SELULER

Tentunya Kementerian Kominfo tidak bisa membangun Jaringan 5G sendirian, Dibutuhkan berbagai stakeholder untuk mendukung pembangunan ini, salah satunya adalah operator seluler.

PT Telkomsel merupakan provider pertama yang menyelenggarakan jaringan 5G di Indonesia. Setelah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) Layanan 5G pada tanggal 24 Mei 2021, tidak menunggu lama Telkomsel langsung menyelenggarakan jaringan 5G secara komersial pada tanggal 27 Mei 2021 dengan tema Telkomsel 5G Grand Launch Unlock the Future di Jakarta.

Menurut Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro, jaringan 5G dapat mendukung banyak sektor. "inovasi-inovasi baru bakal hadir, seiring dengan keunggulan 5G yang dapat memberikan kecepatan internet hingga diatas 1Gbps dan latensi di bawah 1 milidetik. Inovasi tersebut bakal membuat perusahaan makin efisien dan produktif, untkan Setyanto.

Layanan 5G Telkomsel baru tersedia di Sembilan kota, yaitu DKI Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali, Batam, Medan, Solo, Balikpapan, dan Bandung.

Selain Telkomsel, operator seluler yang sukses menyelenggarakan jaringan 5G secara komersial adalah Indosat Ooredoo. Memilih kota Surakarta, Indosat Ooredoo ingin mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui kekuatan teknologi.



"Saya sangat bersyukur dan bangga dapat meluncurkan layanan 5G komersial pertama Indosat Ooredoo di Solo untuk menunjukkan kekuatan transformatif 5G kepada anak muda, komunitas digital, dan bisnis di kota yang menakjubkan ini", ucap Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama (22/06).

Indosat Ooredoo juga yakin bahwa teknologi akan membantu akselerasi transformasi digital masyarakat Indonesia dan mendorong inovasi bisnis di semua industri. Setelah Solo, Indosat Ooredoo berencana memperluas layanan 5G komersial ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Makasar.

Sementara provider Smartfren sedang bersiap untuk menggelar jaringan 5G secara komersial. Smartfren Bersama Kementerian Kominfo menggelar uji jaringan 5G pada Kamis (17/06) di Galeri Smartfren Sabang di Jakarta Pusat.

"Tidak lama lagi mudah-mudahan layanan 5G Smartfren akan segera diluncurkan," kata Presiden Director Smartfren Merza Fachys.



Investigasi 279 Juta Data Pengguna BPJS Kesehatan, Menkominfo Ambil Langkah Tegas

Baru-baru ini publik tengah dikejutkan soal adanya kasus kebocoran data 279 juta warga Indonesia. Data tersebut disinyalir bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berawal dari sebuah situs *hacker* bernama Raid forums di sebuah laman digital. Di sana, seorang pengguna dengan nama akun "Kotz" menawarkan data WNI sebagai barang dagangan. Bukan hanya itu, ia juga menyertakan sampel data sekitar 100 ribu yang bisa diunduh secara gratis.

Di dalam deskripsinya, penjual mengatakan bahwa data tersebut berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi.

Di linimasa Twitter, data tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang jika dikonversi ke rupiah sekitar Rp81,6 juta. Untuk meyakinkan calon pembeli, penjual turut menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis.

Bahkan, adapula 91 juta data pengguna dan 7 juta data *merchant* yang dijual di *empire market* sebesar 5000 dolar. Bahkan, di platform *bhineka.com* pada Mei 2020 lalu terdapat 819.976 data nasabah dijual.

Setelah ditelisik jauh, akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (*reseller*). Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 279 juta atau 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Oleh karena itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, Kementerian Kominfo langsung melakukan tindakan tegas dengan bergerak cepat melakukan investigasi terkait isu yang meresahkan masyarakat.

"Nah, tetapi memang ada kesimpangsiuran kalau dilihat data sekian juta yang sudah kita konfirmasi itu satu juta di BPJS misalnya, ini ada perusahaan-perusahaan pengelola seperti *bayfiles.com*, *mega.nz*, dan *anonfiles.com*, termasuk Raid Forums teridentifikasi sebagai forum yang banyak menyebarkan konten yang melanggar perundang-undangan di Indonesia sehingga kita langsung melakukan pemutusan akses terhadap mereka agar datanya tidak berlanjut. Dalam hal ini mereka menggunakan aplikasi yang di dalamnya terdapat tautan untuk mengunduh data pribadi dan dijual dengan harga murah," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam sebuah bincang online di Kanal YouTube AF Uncensored, Senin (21/06/2021).

Menjawab kritikan dari warganet mengenai tindakan pemblokiran yang dilakukan pihaknya terhadap Raid Forums yang menjadi situs jual beli, Menteri Johnny menegaskan tindakan itu bukan serta-merta dilakukan tanpa dasar. Ia menyebut, dalam hal ini ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kominfo.

“Pertama, dimaksudkan untuk mencegah menyebar secara luas datanya dengan cara apa? Tindakan pertama menutup situs yang ada di ISP, tetapi tidak tertutup kemungkinan situs baru dibuka, tidak juga menutup kemungkinan melalui VPN bisa dilakukan, itu satu kenyataan dan fakta ruang digital,” jelasnya.

Dua Pendekatan

Namun demikian, Kominfo akan melakukan dua pendekatan, yaitu melakukan *forensic audit* terhadap sistem security di Penyelenggara Sistem Elektronik. Di sisi yang lain, melakukan juga crawling untuk mencari tahu pelaku ada di mana.

“Ini sebagai upaya mengantisipasi terobosan-terobosan dari hacker yang semakin menggeliat, makanya kepada masyarakat pendekatannya itu dari pemerintah dan aparat penegak hukum dan dari masyarakat juga.

Untuk masyarakat, lanjut Menkominfo, setelah mengetahui itu maka dua tindakan yang harus dilakukan. Pertama, jangan meneruskan. Kedua, melaporkannya supaya bisa ditindaklanjuti karena ini suatu fakta di dalam ruang digital yang tidak bisa dihindari.

“Semakin bagus, semakin cepat, semakin baik. Infrastruktur telekomunikasinya apalagi nanti akan muncul 5G, maka tentu kecepatan transmisi data dan teknologi-teknologi security harus berkembang dengan cepat,” tuturnya.

Selanjutnya, Kementerian Kominfo sesuai tugasnya sebagai fasilitator dan regulator, telah berkomunikasi dan juga melakukan klarifikasi ke Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk mengetahui apa yang terjadi versi BPJS Kesehatan.



Menkominfo menyatakan hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lainnya.

“Pada Jumat, 21 Mei silam, Kominfo telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa BPJS akan segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor,” ujarnya.

Selain itu, sebagai PSE, BPJS Kesehatan juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Menkominfo menilai sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan itu didasari pada struktur data yang terdiri dari noka (Nomor Kartu), kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan.

“Masalah data ini sangat krusial, sangat penting dan mempunyai yang berhubungan langsung dengan resiliensi ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa. Jadi, masalah data di Indonesia sendiri, saat ini payung hukum kita adalah Peraturan Pemerintah (PP) 71 dan saya perkuat dengan peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2020 yang berkaitan dengan tata kelola data, perlindungan data pribadi,” jelas Menteri Johnny.

Hal kedua, investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ketiga, langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

Kasus ini kini sudah bergulir ke Bareskrim Polri untuk diselidiki lebih lanjut. Pihak BPJS Kesehatan dan BSSN sudah diminta keterangan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Kominfo sendiri, kata Menkominfo, bertugas melakukan pengawasan, pengelolaan, pemeriksaan, pengendalian data terhadap penyelenggara data. Sementara dari sisi keamanan data, menjadi tugasnya BSSN. Lalu, untuk pemberlakuan ketentuan-ketentuan di Undang-Undang lainnya, pelaksana terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana, perdata, denda, maupun hukumannya menjadi tugas dari aparat keamanan (Polri) sebagai penyidik dan penyelidik hukum.

“Sehingga terkait dengan tata kelola data ini ada tiga lembaga yang mengaturnya yaitu Kominfo, BSSN, serta aparat penegak hukum (Polri) yang masing-masing punya tugas dalam menangani kasus kebocoran data,” tuturnya.

Rekomendasi dan Evaluasi

Dalam perbincangan, Menteri Johnny memaparkan sejak tahun 2019 hingga 2021, terdapat 29 kasus kebocoran data untuk penyelenggara-penyelenggara sistem elektronik. “Tahun 2019 ada tiga, tahun 2020 sebanyak 20 dan tahun 2021 ada 6 termasuk BPJS.

Dari ke-29 lembaga yang mendapat serangan hacker itu, Menteri Johnny mengatakan 21 diantaranya sudah diselesaikan oleh Kominfo melalui berbagai rekomendasi, termasuk rekomendasinya peningkatan kualitas technology security mereka.

“Mereka harus meningkatkan peningkatan tata kelola dan peningkatan talenta digital, sumber daya manusia yang ada di situ yang melakukan manajemen terhadap tata kelola data,” urainya.

Kepada 4.572 pemirsa yang menonton bincang online itu, Menteri Johnny menyatakan kebocoran data bisa disebabkan karena teknologinya dapat diterobos atau terdapat kerjasama dengan orang dalam, sehingga menurutnya diperlukan evaluasi oleh Kementerian Kominfo untuk melihat bagaimana tata kelola teknologinya, tata kelola manajemennya dan sumber daya manusia yang ada di penyelenggara sistem elektronik tersebut.

“Karena apa? Di sinilah persaingan antara kemajuan temuannya unethical hacking dengan peningkatan kualitas technology security-nya, di situ BSSN bertindak. Kalau sampai terjadi kebocoran data dan data diambil, maka itu pelanggaran hukum untuk selanjutnya diselidiki ditindak oleh kepolisian,” paparnya.

Di samping itu, menurut Menteri Johnny, kemungkinan kebocoran data juga dapat terjadi melalui tindakan hacking yang dilakukan seseorang. Menkominfo menilai hal ini disebabkan karena tata kelola internal yang kurang baik.

“Nah, di sinilah kita perlu satu kebijakan yang kuat, keras, guna memastikan bahwa data itu terlindungi dengan baik karena cuma aja syarat yang boleh data berpindah dari pemilik, yaitu atas persetujuan pemiliknya. Apabila tidak ada persetujuan itu illegal, kecuali yang terkait dengan pertahanan negara, pengadilan, lebih dari itu wajib dan jika melakukan pelanggaran pelakunya ditangkap dan ditindak secara hukum,” jelasnya.

Perkuat Regulasi Dengan RUU PDP

Karena maraknya kebocoran data di Indonesia, maka Menteri Johnny menilai saat ini Indonesia membutuhkan legislasi primer dalam melakukan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat lebih kuat lagi. Oleh karena itu, Kominfo menyiapkan inisiatif berupa payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Kami telah memasukkannya ke parlemen tanggal 24 Januari tahun 2020, hampir satu setengah tahun yang lalu dan ini berbasis *benchmark*-nya adalah GDPR atau General Data Protection Regulation Uni Eropa dengan kekhasan dan kekhususan Indonesia. Mengapa itu dilakukan? Karena memang data yang menjadi satu kekuatan suatu bangsa untuk harus kita kawal dan kita lindungi," tegasnya.

Ketika disinggung apa inti yang diatur dalam RUU yang kini tengah diajukan ke parlemen, Menkominfo menjelaskan regulasinya mengacu kepada GDPR Uni Eropa yang di dalamnya terdapat klasifikasi data (data umum dan data-rata spesifik.) Menkominfo merinci, untuk data umum terkait dengan nama, alamat, tanggal lahir dan seterusnya. Sedangkan data spesifik erat kaitannya dengan medical record, catatan kesehatan yang lebih dalam, catatan keuangan, termasuk di dalamnya misalnya kecenderungan seksual.

Lebih lanjut, menanggapi pertanyaan sanksi apa yang akan diberikan bagi PSE yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi, Menteri Johnny menyatakan akan ada sanksi yang diberikan. Secara spesifik, ada beberapa pasal di dalamnya yang mengatur dengan berbagai kategori dan levelnya, baik itu tidak kurungan maupun denda.

Di dalam Undang-Undang yang baru, Kominfo tengah mengatur dua jenis sanksi dan ini sedang berproses. Sanksi yang pertama pasti hukuman, pidana kurungan 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Kedua, ada hukuman denda terhadap perorangan maupun korporasi.



Jika itu perusahaan, penanggung jawab perusahaan mempunyai kewajiban, tetapi kalau tuntutan terhadap perusahaan itu bentuknya denda bukan kurungan. "Kan, enggak bisa kita kurung itu perusahaan, namun kita berikan sanksi berupa denda. Nah, sanksi kepada perusahaan dapat berupa sanksi administratif yakni penutupan usaha atau pencabutan access karena bekerja di Internet Service Provider (ISP). Akses ISP kalau ditutup ya kelar juga perusahaannya. Di situlah saya butuh ini RUU PDP ini agar segera disahkan sehingga penyelenggara dan pemroses data bisa diberikan sanksi," tandasnya.



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (jaket biru) dalam Konferensi Pers usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi untuk 10.000 Pekerja Media, di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat (25/06/2021). - (AYH)

Menkominfo Imbau Penerima dan Penyelenggara Vaksinasi Lindungi Data Pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengimbau setiap penyelenggara vaksinasi dapat menjaga dan memastikan data pribadi masyarakat terlindungi dengan baik. Hal yang sama juga disampaikan Menkominfo kepada seluruh masyarakat agar tidak sembarang menyebarkan barcode setelah menjalani vaksinasi. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan.

“Proses-proses vaksinasi ini karena melibatkan data pribadi, maka tentu kita harapkan agar perlindungan data pribadi tetap kita jaga dengan baik. Payung hukumnya sudah kita siapkan. Saya sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kominfo,” jelasnya dalam Konferensi Pers usai meninjau Pelaksanaan Vaksinasi untuk 10.000 Pekerja Media, di Bentara Budaya Kompas, Jakarta, Jumat (25/06/2021).

Bahkan, Menteri Johnny menekankan sertifikat vaksinasi digunakan sendiri dan untuk keperluan khusus tertentu.

Misalnya, hanya diperuntukkan ketika sedang melakukan perjalanan dinas atau ada keperluan yang mendesak.

“Jangan sampai diedarkan karena di sertifikat itu ada QR Code, di dalam QR Code itu ada data pribadi, jadi sertifikat digital kita peroleh tetapi di saat yang bersamaan kita menjaga data pribadi kita dengan cara tidak mengedarkannya untuk kepentingan yang tidak semestinya,” tegasnya.

Menteri Johnny menjelaskan, sertifikat digital vaksin ini bisa diperoleh setiap orang usai melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai bukti telah divaksin. Sertifikat ini bisa diunduh dari Aplikasi PeduliLindungi dengan terlebih dahulu memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Momentum Satukan Bangsa

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny menyatakan vaksinasi COVID-19 menjadi momentum bagi seluruh komponen bangsa untuk bersatu. Menurutnya, hal ini diperlukan agar seluruh elemen dapat menemukan titik simpul yang sama sehingga seluruh kekuatan dan energi bisa digunakan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia sesegera mungkin.

Oleh karena itu, meski tingkat penularan COVID-19 yang begitu tinggi akhir-akhir ini, Menteri Johnny meminta masyarakat untuk tidak panik, jangan takut serta pesimistik. Menkominfo menilai dengan kondisi tersebut justru mendorong seluruh warga

Indonesia untuk memastikan dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 secara tertib, disiplin, dan terus-menerus.

“Karena itu cara yang sangat sangat efektif, jitu untuk mencegah penularan. Hal ini menjadi begitu pentingnya pada saat di mana sekarang tingkat penularannya cukup tinggi, tetapi tingkat penularan yang tinggi ini jangan membuat kita takut, jangan membuat kita menjadi pesimistik,” tuturnya.

Kepada pekerja media yang mengikuti vaksinasi hari ini, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah melaksanakan program vaksinasi secara massal, secara masif, secara besar-besaran, bertujuan untuk menghasilkan imunitas bagi masyarakat.

“Pekerjaan ini merupakan pekerjaan bersama-sama. Saya tentu berharap kita melakukannya secara bersama-sama,” ungkapnya.

Meski tak ada hal yang mudah, tetapi menurut Menteri Johnny vaksinasi bukan hal yang tidak mungkin. Menkominfo juga meyakini dengan pelaksanaan vaksinasi, bangsa Indonesia mampu menaklukkan pandemi COVID-19 dalam waktu yang tidak lama.

Apresiasi kepada Kompas

Mewakili Anggota Kabinet Indonesia Maju, Menteri Johnny memberi apresiasi kepada Kompas yang telah ikut mengambil peran dengan berpihak pada masyarakat untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 dengan melaksanakan

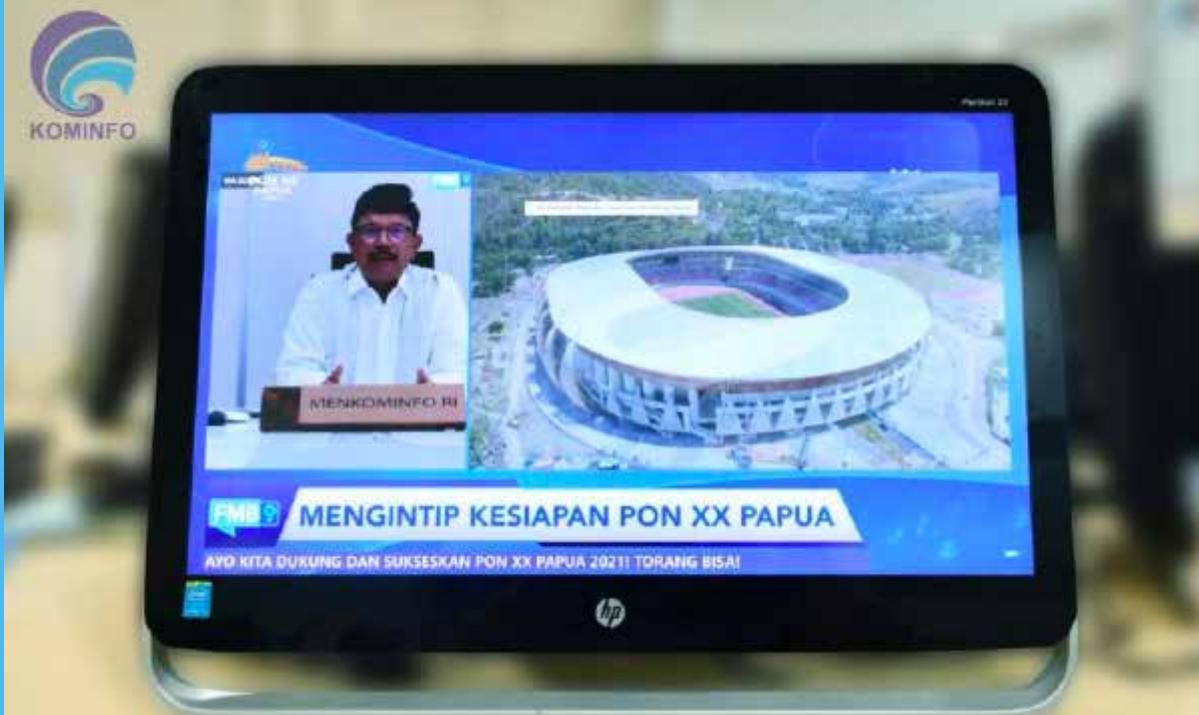
program vaksinasi pada hari ini. Langkah-langkah terdepan seperti ini, menurutnya perlu didukung agar menjadi media terdepan dan memberi transmisi informasi untuk kemajuan dan kejayaan negeri.

Menkominfo mengatakan upaya yang dilakukan Kompas merupakan bagian dari usaha bersama untuk memastikan Indonesia bisa mencapai vaksinasi 181,5 juta. “Suatu pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama-sama, apalagi Bapak Presiden Joko Widodo, sudah menyampaikan setidaknya kita harus mencapai 1 juta vaksinasi per hari,” jelasnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Menteri Johnny kepada Dewan Pers yang tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah henti-hentinya untuk mengajak bersama-sama ekosistem media melakukan vaksinasi.

“Seluruh ekosistem media, hal ini sangat baik dan perlu kita tulari agar tidak saja melalui organisasi-organisasi profesi, namun secara horizontal maupun secara hirarkis pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh komponen untuk kita lakukan vaksinasi massal secara bersama-sama,” tandasnya.

Hadir mendampingi Menkominfo pada saat peninjauan vaksinasi antara lain Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel A. Pangerapan; Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latief; Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo; serta Wartawan Senior Kompas; Budiman Tanuredjo.



Menteri Johnny: Sukseskan PON Papua, Kominfo Siapkan Media Center dan Perkuat Komunikasi Publik

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua akan berlangsung bulan Oktober 2021 mendatang. Seratus hari dari sekarang, perhelatan olahraga nasional empat tahunan akan digelar di tengah pandemi COVID-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya menyiapkan dukungan berupa media center dan pelaksanaan komunikasi publik agar PON Papua makin semarak.

“Yang penting sekali adalah kalau infrastruktur kita sudah sediakan, media-media center kita siapkan nanti, kanal-kanal komunikasi kita siapkan, sarana prasarana kita siapkan, yang penting juga adalah konten-konten informasi,” ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) Mengintip Kesiapan PON XX Papua, dari Rumah Dinas Menkominfo, Jakarta, Kamis (24/06/2021).

Menurut Menkominfo, konten informasi sangat penting untuk disiapkan, secara khusus oleh juru bicara dari masing-masing cabang olahraga, Pengurus Besar PON hingga bagi awak media selama meliput PON XX Papua.

“Agar bagaimana untuk mentransmisikan informasi dengan pilihan-pilihan diksi yang membangun semangat, membangun kekompakan, yang mendorong partisipasi masyarakat, reporter-reporter perlu menyampaikan dengan diksi-diksi yang akurat dan menyemangati, kameramen-kameramen perlu menampilkan dengan *angle-angle* olahraga yang menantang dan hebat, memberikan kebanggaan bagi kita,” jelasnya.

Menteri Johnny berharap, komunikasi publik untuk PON XX Papua harus ditindaklanjuti secara bersama-sama, sehingga baik sarana dan prasarana, media center, kanal komunikasi maupun konten-konten yang disajikan menggambarkan semangat olahraga dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

“Saat ini, pasti nanti PON Papua akan ditonton oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar Indonesia, masyarakat diaspora. Jadi saya ingin ingatkan juga bahwa komunikasi publik kita harus kita jaga,” tandasnya.

Menteri Johnny juga mengajak masyarakat agar ruang digital tidak diisi dengan informasi hoaks, berita yang simpang siur, adu domba, hate speech dan yang saling mencela agar sebelum, selama dan setelah PON XX Papua dapat berlangsung dengan lancar.

“Kita harus waspada itu, kita ingin agar kanal komunikasi yang kita siapkan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar PON berlangsung sukses dan kita semua bangga dengan PON XX dan Paralympic XVI di Papua,” ujarnya.

Menkominfo menegaskan bahwa pelaksanaan PON XX Papua bukan saja kesuksesan masyarakat Papua selaku tuan rumah, tetapi olahraga nasional yang digelar setiap empat tahun sekali itu merupakan kesuksesan dan partisipasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Karenanya, partisipasi dan peran masyarakat harus dilibatkan, kami tentu berharap ruang digital, platform digital, dan infrastruktur digital dipakai nanti untuk menyaksikan dan menyemarakkan PON di Papua. Karena apa? Ternyata nanti PON di Papua itu juga keren kalau ditonton melalui ruang digital kita, baik itu platform digital maupun penyiaran-penyiaran nanti,” tandasnya.

100 Hari Jelang PON

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan, hari ini tepat 100 hari menuju pelaksanaan PON XX Papua. Menurutnya, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON), serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan olahraga nasional itu berjalan baik.

Panitia Besar (PB) PON XX Papua yang diketuai oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai penyelenggara, didukung dengan sub PB PON yang berada di empat lokasi yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke.

“Tentu ini harus bisa terkoordinasi dengan baik, supaya hajatan besar kita yang menjadi agenda empat tahunan dari olahraga nasional ini bisa berlangsung dengan baik,” jelasnya.

Menurut Menteri Zainudin Amali, jika tidak ada sinkronisasi gerak atau komunikasi yang terputus baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, atau bahkan di level kementerian dan lembaga, hal itu akan mengganggu kesiapan pelaksanaan PON XX Papua.

“Itu yang paling penting bagi kami, jadi persiapan-persiapan non fisik seperti ini juga penting disamping kita mempersiapkan hal-hal yang bersifat fisik, seperti persiapan

venue, tempat penginapan, transportasi dan berbagai hal lainnya,” tandasnya.

Dalam FMB9, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano menegaskan, masyarakat sangat antusias menyambut pelaksanaan PON XX Papua. Menurutnya, momentum ini mengingatkannya pada Presiden Pertama RI Bung Karno saat berkunjung ke Papua.

“Masyarakat Kota Jayapura sudah antusias untuk digelarnya PON XX 2021 di Papua. Saya ingat perkataan Bung Karno pada saat berkunjung di Papua yang mengatakan bahwa membangun Indonesia itu harus dimulai dari Papua. Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekali NKRI tetap NKRI, sekali Merah Putih, tetap Merah Putih. Itulah yang membara di dalam diri orang Papua,” ujarnya.

Selain mengingat kunjungan Bung Karno, Walikota Benhur Tomi juga mengaitkan kunjungan Presiden Joko Widodo di kota Jayapura yang pada saat itu mengatakan sepakbola di Indonesia dimulai dari Papua dan gudang sepak bola pun ada di Papua.

“Itu menjadi kenyataan apa yang saya kaitkan dengan Bung Karno dengan Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Masyarakat Papua itu bangga dengan dibangunnya venue-venue yang bertaraf internasional di Papua dengan dana yang begitu besar,” tandasnya.

Menurut Walikota Jayapura, Papua akan menjadi tempat pelatihan nasional di Indonesia Timur dan menjadi kebanggaan prestasi olahraga secara nasional.

“Dan kita bangga bisa diberikan kepercayaan, maka orang Papua mengatakan ‘torang bisa’, dan itu akan kita buktikan dari kesiapan masyarakat yang luar biasa antusiasnya,” imbuhnya.



Penegasan Komitmen Kominfo dalam Menindak Konten Radikalisme Terorisme

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten berkomitmen untuk menindak tegas konten radikalisme terorisme di ruang digital sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penanganan konten radikalisme terorisme terus dilakukan secara berkesinambungan melalui sinergi solid antara Kementerian Kominfo, Densus 88 Polri, BNPT serta lembaga terkait lainnya.
3. Sejak 2017 s.d. 22 Juni 2021, Kementerian Kominfo telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs dan platform digital. Kami juga memberikan dukungan teknis bagi kementerian/lembaga lain yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana terorisme.
4. Pemblokiran terhadap konten radikalisme dan terorisme terus kami proses sesuai dengan peraturan yang berlaku baik berdasarkan aduan kementerian/lembaga terkait maupun laporan masyarakat yang kami terima melalui kanal pelaporan yang telah kami sediakan.
5. Upaya penyebaran informasi positif sebagai bentuk penanggulangan terhadap konten radikalisme terorisme terus kami lakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
6. Guna memperkokoh ketahanan masyarakat dari informasi negatif internet, termasuk konten radikalisme terorisme, kami terus menggalakkan kegiatan literasi digital di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi seluruh Indonesia.
7. Kementerian Kominfo akan terus konsisten menjaga dan mempertahankan keamanan ruang digital dari muatan radikalisme terorisme yang mengancam NKRI.
8. Kami mendorong publik yang menemukan konten radikalisme terorisme untuk melakukan pelaporan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui aduankonten.id serta kanal-kanal pelaporan lain yang kami siapkan.

Jakarta, 23 Juni 2021, Dedy Permadi Juru Bicara Kementerian Kominfo

Pernyataan Kominfo terkait Informasi Dugaan Penjualan Foto Selfie KTP

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi mengenai dugaan penjualan foto selfie KTP secara tidak sah yang beredar di platform media sosial.
2. Langkah-langkah tegas akan segera kami lakukan setelah berkoordinasi lebih lanjut baik secara internal, maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Kami tegaskan kembali bahwa seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Kami mengimbau masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam menjaga keamanan data pribadi dengan tidak menyebarkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dan menjaga keamanan gawai atau perangkat elektronik lain yang digunakan untuk menyimpan data pribadi.
5. Kami mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan konten negatif serta tindakan-tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain di ruang digital melalui aduankonten.id atau kanal-kanal aduan lain yang kami sediakan.





Luncurkan 5G, Menkominfo: Dorong Lompatan Besar Inovasi Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, kesiapan operator seluler dalam menggelar infrastruktur jaringan telekomunikasi seluler generasi kelima atau 5G di Indonesia dapat mendorong lompatan besar bagi inovasi digital di Indonesia.

“Melalui 5G, adopsi, dan inovasi teknologi digital di berbagai sektor dapat terus kita tingkatkan, baik untuk pengembangan ekonomi, *health technology*, *education technology*, *electronic government*, dan *smart city*, serta berbagai sektor lainnya,” ujarnya dalam Peluncuran 5G Indosat di Surakarta secara virtual, dari Jakarta, Selasa (22/06/2021).

Menurut Menteri Johnny, peluncuran 5G di Indonesia menjadi titik lompatan menuju Indonesia semakin digital, sekaligus semakin satu, semakin cerdas,

dan semakin maju. Selain itu, Menkominfo menyatakan bahwa jaringan 5G juga merupakan momentum percepatan akselerasi transformasi digital.

“Dengan penuh semangat kita sekalian menyaksikan *roll out* jaringan telepon seluler generasi kelima 5G oleh Indosat Ooredoo, momentum peluncuran 5G ini merupakan hasil kolaborasi bersama-sama yang berkelanjutan, mengambil bagian dalam akselerasi transformasi digital Indonesia,” jelasnya

Menurut Menteri Johnny, Kota Surakarta bersama tiga kota lain yaitu, Jakarta, Surabaya, dan Makassar akan menjadi daerah layanan jaringan 5G secara komersial dari Indosat Ooredoo. Melalui pembangunan infrastruktur 5G, Menkominfo mengharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ekosistem teknologi tersebut.

“Penggelaran telepon seluler 5G diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat Surakarta dan kota-kota lainnya tersebut di atas di Indonesia untuk terus memanfaatkan pengembangan teknologi telepon seluler generasi kelima ini,” jelasnya.

Tiga Upaya

Menteri Johnny menyatakan penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G dan 5G saat ini hadir bersama-sama secara koeksis. Menkominfo menegaskan jaringan 4G menjadi tulang punggung transformasi digital di seluruh wilayah tanah air.

“Teknologi 5G dikembangkan pada wilayah yang didukung oleh

ekosistem 5G yang memadai, seperti misalnya perkotaan dan destinasi pariwisata super prioritas,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo melakukan tiga upaya untuk terus mendukung pemanfaatan dan pengembangan teknologi 5G. Pertama, penyiapan pita spektrum frekuensi yang memadai, melalui *farming* dari *refarming* frekuensi spektrum. Kedua, mendorong pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital yang berkualitas dan berkelanjutan.

“(Ketiga) Kominfo juga akan terus melaksanakan penggelaran infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 4G di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal),” ujarnya.

Oleh karena itu, Menkominfo juga mendorong Indosat Ooredoo dan operator telekomunikasi seluler untuk menyelesaikan pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) *last mile* 4G di wilayah Non-3T. Daerah yang sering disebut sebagai wilayah komersial untuk menjawab kebutuhan sinyal dan *bandwidth* oleh masyarakat yang terus meningkat.

“Melalui tiga upaya tersebut diharapkan Indonesia melakukan lompatan-lompatan besar yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” tandasnya.

Akselerasi Transformasi Digital Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama mengatakan, peluncuran layanan 5G Indosat itu menunjukkan

kekuatan transformatif 5G kepada anak muda, komunitas digital, dan bisnis kota, salah satunya di kota Surakarta yang merupakan pilihan pertama peluncuran 5G Indosat.

“Kami percaya teknologi ini akan membantu mengakselerasi transformasi digital masyarakat Indonesia, dan mendorong inovasi bisnis di semua industri,” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah yang terus berkomitmen menggelar dan memanfaatkan ekosistem teknologi. “Kami ingin terima kasih kepada Pemerintah Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan terhadap perusahaan,” tandasnya.

Dalam rangkaian peluncuran 5G Indosat itu, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berharap dapat menghadirkan optimisme bagi masyarakat di tengah situasi ketidakpastian yang terjadi saat ini, terutama bagi anak muda, perempuan dan UMKM.

“Mari tetap optimis bahwa kita akan bangkit kembali terlepas pandemi, dengan layanan 5G yang baru ini yang menghadirkan kemungkinan yang tak terbatas akan berbagai peluang dan inovasi digital,” imbuhnya.

Peluncuran 5G Indosat Ooredoo di Surakarta dihadiri Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Duta Besar Qatar untuk Indonesia H.E. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, Direktur Utama Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama, dan CEO Huawei Indonesia Jacky Chen.

Bincang Singkat Empat Punggawa UPT SDPPI



Akhir Mei 2021 lalu, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemkominfo, Ismail, melantik 19 Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT). Keputusan rotasi dan promosi dilakukan dengan proses objektif, dengan tetap menjaga konsistensi kriteria yang dipilih dari kemampuan yang ditunjukkan dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam acara yang dilakukan secara daring dan luring di Gedung Sapta Pesona Lt 13 tersebut, Dirjen SDPPI menyampaikan pesan dan harapan Menkominfo agar pejabat di lingkungan UPT menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi di daerah.

“

Tunjukkan kualitas kita sebagai insan Ditjen SDPPI Kemkominfo. Satu pesan yang disampaikan Menteri, tunjukkan bahwa kita itu merupakan organ pusat yang berada di daerah, untuk menghargai kinerja dan karya besar Kemkominfo yang perlu dilakukan koordinasi dengan semua pihak



Sumber Foto : Fandi/SDPPI



Dirjen Ismail turut mengingatkan tantangan Ditjen SDPPI sebagai suatu organisasi adalah menjadi satu direktorat jenderal yang diandalkan Kemkominfo. Dirjen SDPPI berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi. "Jabatan adalah titipan, bukan hak. Semoga Tuhan YME memberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap proses, dan kita semua selalu diberkati dalam melakukan kontribusi kita bagi bangsa dan negara," tutupnya.

Tim KominfoNext beberapa waktu lalu berkesempatan mewawancarai empat dari total 19 pejabat struktural lingkup UPT yang dilantik. Keempat orang tersebut adalah Latuse selaku

Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Kupang, Hermanto selaku Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palu, Manuelson Jaka Jusuf selaku Kepala Loka Monitor SFR Ternate, dan terakhir, Hamzah selaku Kepala Loka Monitor SFR Gorontalo.

Tim KominfoNext berbincang tentang proses adaptasi sebagai pimpinan yang baru, program prioritas, prestasi, hingga harapan dan target ke depan dari para pimpinan UPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi masyarakat. Simak hasil wawancaranya berikut ini:

Balai Monitor SFR Kelas I Kupang

Latuse, S.T., M.Si.

Kepala Balai Monitor SFR
Kelas I Kupang



Apakah program kerja tersebut sudah berjalan sebelum Anda menjabat?

Pada dasarnya tugas pokok dari Balai Monitoring adalah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio. Wujud kegiatannya berupa kegiatan pemantauan, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio dan penertiban. Balmon juga memberikan layanan publik berupa layanan konsultasi perizinan radio, UNAR, penanganan gangguan. Sasaran akhir dari semua kegiatan tersebut adalah penggunaan frekuensi radio yang tertib, efisien dan optimal. Kegiatan – kegiatan ini telah berjalan dan terlaksana di Balmon Kupang, yang selanjutnya akan kami lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya sehingga dapat dilakukan pembenahan – pembenahan terhadap hal yang masih kurang.

Selamat atas promosi jabatan selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang

Terimakasih, mohon doanya semoga kami dapat melaksanakan amanah ini dengan baik.

Apa program kerja prioritas setelah mendapatkan amanah selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Kupang?

Mendapatkan amanah penugasan di tempat yang baru tentu saya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya dan tim yang baru. Prioritas pertama di Balmon Kupang adalah menggali informasi sebanyak mungkin dari para pegawai untuk memperoleh gambaran performa Balmon Kupang saat ini, serta membangun atau menetapkan persepsi yang sama terhadap pekerjaan dan target. Setelah persepsinya sama, selanjutnya kita menetapkan strategi pelaksanaannya yang cocok dengan kondisi internal dan eksternal kami di Balmon Kupang serta ketentuan regulasi yang baru. Tentunya dengan tetap menjaga fokus dan konsistensi pelaksanaannya.

Berapa jumlah ASN di lingkup unit kerja Anda? Bagaimana Anda sebagai pimpinan bersikap kepada mereka, terutama pegawai yang sudah senior?

Saat ini jumlah ASN di Balmon Kupang sebanyak 26 orang. Terdapat beberapa pegawai yang lebih senior dengan saya. Tentunya dalam berinteraksi dengan teman-teman sekantor baik yang junior maupun yang senior tetap memperhatikan adab dan adat serta batas kepantasan. Iya memang, interaksi atau berkomunikasi dengan junior dan senior agak berbeda. Kalau staf junior (kaum millennial) maunya langsung *to the point* ke pokok persoalan, tapi kalau pegawai senior biasanya harus didahului kata-kata pengantar informal kemudian masuk ke inti permasalahan. Saya harus bisa menyesuaikan dengan adab dan gaya komunikasi mereka.

Bagaimana pendapat Anda tentang peran Kementerian Kominfo saat ini?

Kementerian Kominfo saat ini memegang peran yang sangat strategis dan vital. Boleh dibilang, tidak ada lagi aspek kehidupan kita yang tidak bersentuhan dengan TIK. Internet dan sarana komunikasi sudah menjadi kebutuhan pokok. Apalagi di masa pandemi seperti saat

ini semua aktifitas kebanyakan dilakukan secara *online* yang menuntut penyediaan jaringan internet yang lebih luas dan dengan kualitas yang bagus dan stabil. Aktivitas kantor, pendidikan, ekonomi, hiburan dll mulai beralih dari *offline* ke *online*. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo tentunya terus melakukan pembangunan infrastruktur TIK untuk memperluas jangkauan dan menambah kapasitas jaringan yang sudah ada untuk meningkatkan layanan komunikasi dan internet.

Menurut Anda apa langkah nyata yang harus dilakukan insan Kominfo menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama di kalangan generasi milenial?

Salah satu ciri generasi milenial adalah tidak bisa jauh dari *gadget* dan tidak bisa putus dari media sosial (*medsos*). Masyarakat kita saat ini lebih banyak mengakses informasi melalui media digital. Jadi sebagai insan Kominfo kita bisa menjadi contoh dalam menggunakan *medsos* yang baik dengan tidak ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas validitasnya (*hoaks*). Kita bisa mengajak teman, kerabat, keluarga melalui *medsos* yang kita miliki untuk bijak dalam menggunakan *medsos*. Kita juga bisa mengajak teman, kerabat, keluarga dan komunitas kita untuk ikut dalam kelas – kelas literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Kominfo sehingga masyarakat kita dapat memperoleh manfaat positif dari internet dan dunia digital.

Mengapa menurut Anda hal itu harus dilakukan?

Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak dapat dipisahkan dari internet dan dunia digital. Sehingga masyarakat perlu dibekali pemahaman dalam berinteraksi di ruang digital, baik dari aspek etika, hukum, dan keamanannya, serta dapat memperoleh manfaat positif dari internet dan dunia digital.

Saat ini semakin banyak sivitas muda Kominfo yang menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Bagaimana tanggapan Anda?

Betul, saat ini banyak generasi muda Kominfo yang menunjukkan prestasi yang membanggakan. Ini tentunya menjadi aset yang luar biasa yang akan turut berperan memberikan warna baru Kominfo yang lebih cemerlang lagi ke depannya.

Menurut Anda, apakah kerja UPT seperti Balmon sudah cukup optimal bagi masyarakat?

Koneksi internet dan komunikasi *wireless* seperti pada *handphone* (HP) membutuhkan spektrum frekuensi radio yang *clear* dari gangguan. Nah, di sinilah peranan UPT Balai Monitor seluruh Indonesia bekerja untuk memastikan bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dalam kondisi *clear* terbebas dari gangguan yang merugikan sehingga dapat digunakan dengan baik dan aman oleh masyarakat. Bilamana terdapat gangguan frekuensi radio, maka masyarakat atau pemegang ISR dapat melaporkan ke UPT Balai Monitor terdekat, dan akan segera akan dilakukan penanganan gangguan sampai frekuensinya bersih kembali.

Apa harapan Anda ke depan bagi Kementerian Kominfo, khususnya bagi UPT?

Semoga masyarakat kita semakin sadar untuk menggunakan frekuensi radio dengan baik sesuai ketentuan sehingga dapat terwujud penggunaan frekuensi radio yang bersih dan aman.

“**Bangun komunikasi dan persepsi yang sama dengan tim dan tetapkan target tujuan yang akan dicapai.**”

Balai Monitor SFR Kelas II Palu

**Hermanto,
S.Kom., M.Sos.**

Kepala Balai Monitor SFR
Kelas II Palu



Apakah program kerja tersebut sudah berjalan sebelum Anda menjabat?

Ya, sudah berjalan dengan cukup baik dan semestinya. Tugas yang harus diemban selanjutnya bahwa saya harus dapat memberikan peningkatan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya baik dari sisi performa, kinerja maupun prestasi. Dengan demikian Balai Monitor SFR Kelas II Palu mampu meningkatkan perannya dalam memberikan layanan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan berdaya guna bagi masyarakat.

Bagaimana pendapat Anda tentang peran Kementerian Kominfo saat ini?

Peran besar Kementerian Kominfo saat ini adalah melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet dengan menjadikan Indonesia terkoneksi melalui Digitalisasi. Melalui motto Semakin Digital Semakin Maju, di tahun 2021 ini Kementerian Kominfo tengah melakukan Digitalisasi Penyiaran melalui program implementasi TV Digital yaitu Analog Switch Off (ASO) serta penyediaan akses yaitu mempersiapkan ketersediaan Alokasi spektrum frekuensi untuk mempercepat digelarnya jaringan 5G di Indonesia. Bahkan melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi), Kemkominfo saat ini masih terus melakukan penetrasi dengan program pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang masih berbasis 4G.

Selamat atas promosi jabatan selaku Kepala Balai Monitor (Kabalmom) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu

Saya menghaturkan terima kasih utamanya kepada Menteri Kominfo, juga kepada Dirjen SDPPI, Sesditjen SDPPI serta para Direktur di lingkungan Ditjen SDPPI atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanah & tanggung jawab sebagai Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Palu – Sulawesi Tengah.

Apa program kerja prioritas Anda setelah mendapatkan amanah selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Palu?

Semenjak menjalankan tugas sebagai Kabalmom Palu terhitung tanggal 25 Mei 2021, Prioritas Program Kerja utama yang harus saya jalankan di antaranya: Pengawasan dan Pengendalian Spektrum yang mencakup Monitoring, Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Spektrum Frekuensi Radio, ditambah beberapa tugas lain seperti Penanganan Tagihan & Piutang BHP Frekuensi, Ujian Negara Amatir Radio, Sosialisasi serta program MOTS (*Maritim On the Spot*).

Berapa jumlah ASN di lingkup unit kerja Anda? Bagaimana Anda sebagai pimpinan bersikap kepada mereka, terutama pegawai yang sudah senior?

Terdapat 43 Pegawai ASN (25 PNS + 18 PPNPN) di lingkungan Balai Monitor Palu, ada beberapa di antaranya yang memang sudah senior. Sebagai pimpinan unit kerja, saya sangat menghargai keberadaan mereka sebagai *Teamwork* yang ikut mendukung Unit Organisasi menuntaskan seluruh program kerja yang sudah disusun berdasarkan komitmen bersama. Saya berprinsip bahwa seluruh pegawai, siapapun dia, harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sama (proporsional sesuai kompetensi) dalam menjalankan roda organisasi.

Menurut Anda apa langkah nyata yang harus dilakukan insan Kominfo menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama di kalangan generasi milenial?

Generasi milenial harus dapat menangkap peluang di bidang teknologi Informasi dan komunikasi melalui ide, bakat, dan kreativitas, sehingga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kemampuan memanfaatkan hadirnya teknologi informasi menjadi kunci meraih sukses dan karir masa depan generasi milenial. Hal lainnya adalah kaum milenial harus ikut dalam menangkal dampak media sosial seperti ancaman pornografi, radikalisme dan disintegrasi bangsa.

Mengapa menurut Anda hal itu harus dilakukan?

Di masa pandemi Covid-19 yang berakibat keterpurukan ekonomi masyarakat sekarang ini, segala pergerakan secara fisik dibatasi, segala transaksi keuangan, logistik bahkan untuk berkomunikasi dilakukan dengan cara yang tidak lazim. Suka atau tidak suka, cara digital harus ditempuh agar dapat terus terhubung dengan yang lain. Keterbukaan informasi melalui berbagai platform media sosial juga mengakibatkan banyaknya informasi yang tidak tersaring dengan baik sehingga menimbulkan hoaks. Tugas generasi milenial sebagai user yang aktif dan dominan di media sosial untuk menangkalnya.

Saat ini semakin banyak sivitas muda Kominfo yang menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Bagaimana tanggapan Anda?

Ya, beberapa hal positif yang dimiliki kaum milenial tersebut patut ditiru menurut saya, di antaranya adalah cerdas, inovatif dan kreatif, serta menyukai tantangan.

Menurut Anda, apakah kerja UPT seperti Balmon sudah cukup optimal bagi masyarakat?

Apa yang dilakukan oleh UPT selama ini dalam hal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio secara tidak langsung kepada masyarakat mendapat sambutan yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang baik indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa UPT di lingkungan Ditjen SDPPI.

Apa harapan Anda ke depan bagi Kementerian Kominfo, khususnya bagi UPT?

Harapan saya ke depannya adalah agar UPT Balai Monitor maupun Loka Monitor yang merupakan ujung tombak Kementerian Kominfo Cq. Direktorat Jenderal SDPPI di wilayah, dapat diperkuat secara organisasi dan lebih banyak berperan lagi agar dapat mengakomodir kebutuhan layanan publik bidang spektrum frekuensi radio yang teknologinya saat ini semakin berkembang dan dinamis, sehingga penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi untuk Indonesia Terkoneksi Digital dapat terpenuhi.

“

Bekerjalah dengan semangat dan penuh tanggung jawab, teruslah berkarya, tingkatkan Inovasi, jaga integritas. Bangunlah teamwork yang mampu saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dalam interaksi kerja tetap hormati pimpinan, rekan sejawat maupun bawahan. Kementerian Kominfo tempat kita bernaung adalah institusi yang terus bergerak dinamis sehingga butuh sentuhan inovasi dan kreativitas kaum muda demi kemajuan bersama untuk bangsa.

Loka Monitor SFR Ternate

**Manuelson Jaka Jusuf,
S.T., M.Telnet. Eng.**

Kepala Loka Monitor SFR Ternate



Apakah program kerja tersebut sudah berjalan sebelum Anda menjabat?

Saya melihat bahwa Ka.UPT sebelumnya tidak secara spesifik memprioritaskan pengembangan SDM dan sarana-prasarana. Akan tetapi dari yang saya rasakan, beliau dapat membentuk jalinan kekeluargaan yang erat dan hangat serta solidaritas yang kuat antara sesama personel Loka Monitor SFR Ternate. Hal ini menjadi modal berharga bagi saya dalam memimpin Loka Monitor SFR Ternate ke depannya.

Bagaimana pendapat Anda selaku generasi milenial tentang peran Kementerian Kominfo saat ini?

Sebagai generasi milenial yang akrab dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang selalu berkembang dengan sangat cepat, peran Kominfo sangat penting untuk mendorong agar perkembangan teknologi informasi dan infrastruktur telekomunikasi di negara kita agar terus bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kominfo juga sangat berperan untuk menunjang perkembangan industri digital yang motor penggeraknya merupakan generasi milenial dengan ide-ide cemerlang mereka, di mana perkembangan industri digital ini sangat tergantung dengan perkembangan teknologi telekomunikasi.

Pertama-tama, kami ucapkan selamat atas promosi jabatan selaku Kepala Loka Monitor SFR Ternate. Setelah mendapatkan amanah selaku Kepala Loka, apa yang menjadi program kerja yang menjadi prioritas Anda

Setelah mendapatkan amanah sebagai Kepala Loka Monitor SFR Ternate, prioritas saya adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dan sarana prasarana Loka Monitor SFR Ternate menjadi lebih baik, mumpuni serta adaptif dalam menghadapi perubahan teknologi telekomunikasi yang terus berkembang. Hal ini menjadi prioritas sebagai upaya untuk menciptakan Loka Monitor SFR Ternate yang menjalankan Tugas dan Fungsi Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Maluku Utara yang lebih cepat, tepat, dan efisien, serta mampu menghadapi berbagai tantangan.

Berapa jumlah ASN di lingkup unit kerja Anda? Bagaimana Anda sebagai pimpinan bersikap kepada mereka, terutama pegawai yang sudah senior?

Loka Monitor SFR Ternate memiliki 13 ASN dan banyak di antara ASN tersebut merupakan senior saya. Hal pertama yang saya lakukan kepada mereka adalah merangkul mereka sebagai rekan kerja untuk menumbuhkan rasa motivasi mereka dalam bekerja selaras dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya membangun komunikasi karena dengan komunikasi yang baik saya rasa dapat mengurangi perbedaan cara pandang antara generasi. Yang tidak kalah penting adalah menghargai mereka. Sebagai atasan saya tetap menjalankan amanah secara profesional, tapi sebagai orang Timur, kita tidak bisa lepas dari sikap menghargai orang yang lebih tua. Saya sebagai orang yang muda pun sadar pengalaman merupakan guru terbaik, dan belajar dari para senior bisa menjadi hal yang bermanfaat buat saya.

Menurut Anda apa langkah nyata yang harus dilakukan insan Kominfo menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama di kalangan generasi milenial?

Sebagai insan Kominfo seperti saya yang bekerja di UPT terutama di wilayah Timur Indonesia, yang mesti dilakukan secara nyata adalah pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sampai ke daerah-daerah pelosok.

Mengapa menurut Anda hal itu harus dilakukan?

Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum, termasuk meningkatkan keterlibatan generasi milenial di daerah pelosok dalam mengembangkan potensi ekonomi di daerah mereka masing-masing. Pemerataan infrastruktur telekomunikasi ini juga dapat semakin menumbuhkan industri digital di daerah-daerah tersebut.

Saat ini semakin banyak sivitas muda Kominfo yang menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Bagaimana tanggapan Anda?

Mereka merupakan inspirasi saya dalam mengembangkan karir dan berprestasi serta memberikan sumbangsi untuk Kementerian Kominfo.

Menurut Anda, apakah kerja UPT seperti Balmon sudah cukup optimal bagi masyarakat?

Secara umum UPT seperti Balmon dan Loka Monitor sudah berperan optimal bagi masyarakat sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kominfo dalam hal ini Direktorat Jenderal SDPPI di daerah. UPT terus berupaya menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing agar tidak menimbulkan gangguan satu sama lain yang dapat berakibat fatal. UPT juga terus berupaya meningkatkan standar pelayanan publik di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi lebih baik, mudah, dan cepat. Saat ini UPT-UPT bahkan berupaya memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sebagai standar pelayanan publik yang dimiliki.

Apa harapan Anda ke depan bagi Kementerian Kominfo, khususnya bagi UPT?

Harapan saya ke depan agar UPT Balmon/Loka Monitor dapat terus berkembang dengan meningkatkan kualitas SDM dan sarana-prasarana monitoring yang dimiliki, karena tantangan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berkembang makin cepat. UPT sebagai "Spectrum Guardian" harus bisa menghadapi tantangan tersebut untuk terus menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio yang aman dan bebas gangguan.

“

Saya percaya setiap sivitas muda Kominfo merupakan orang-orang terpilih dan memiliki potensi yang besar dalam diri mereka masing-masing. Saya yakin apabila setiap sivitas muda kominfo mau mengembangkan potensinya serta berkarya bagi Kominfo, Kementerian Kominfo dapat menjadi kementerian yang besar untuk mendorong kemajuan negara kita.

Loka Monitor SFR Gorontalo

Hamzah, S.H., M.H.

Kepala Loka Monitor SFR
Gorontalo



Sivitas terakhir yang berkesempatan diwawancara oleh tim KominfoNext terkait promosi jabatannya adalah Hamzah, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Bersama dengan tiga pejabat lainnya, ia dilantik oleh Direktur Jenderal SDPPI, Ismail, pada akhir Mei 2021 lalu. Simak wawancara singkat dengan Hamzah berikut ini.

Selamat atas promosi jabatan selaku Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang

Terima kasih, mohon doa dan dukungannya.

Apa program kerja prioritas setelah mendapatkan amanah selaku Kepala Loka Monitor SFR Gorontalo?

Prioritas pertama peningkatan standar tata kelola tim dalam bekerja, peningkatan kualitas layanan ke masyarakat, strong branding sebagai institusi strategis dalam mengawal konektivitas, mengawal sumber daya spektrum frekuensi radio yang terbatas dan bernilai tinggi. Branding atau look tentu harus sepaket dengan *delivery* layanan berkualitas. Dalam situasi penuh tantangan saat ini penekanan pada kultur bekerja strong, reliable, resilient; kuat, andal, tahan banting, kreatif menemukan cara-cara baru, lincah (*agile*) memfasilitasi perubahan; menginternalisasi pilar-pilar kepemimpinan milenial. Setiap team member harus *'engaged'*; berkomitmen tinggi secara intelektual dan emosional untuk meraih prestasi terbaik bagi organisasi.

Apakah program kerja tersebut sudah berjalan sebelum Anda menjabat?

Selaku institusi yang pakemnya sudah baku, pasti sudah berjalan, tentu tetap perlu *improvement*. Mengubah beberapa pendekatan agar lebih relevan, determinatif, presisi dan berkualitas.

Berapa jumlah ASN di lingkup unit kerja Anda? Bagaimana Anda sebagai pimpinan bersikap kepada mereka, terutama pegawai yang sudah senior?

Jumlah kami boleh dibilang terbatas, namun Insyallah dioptimalkan dan terus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Total ada tiga puluh orang, 11 ASN, 6 admin, lainnya *support*. Ada beberapa pegawai yang senior. Tata kelola yang saya terapkan konsepnya F2P, *Family, Friend, Profesional*. Interaksi sehari-hari berlandaskan pada tiga pilar ini. Keluarga, sahabat dan tim kerja profesional di tim. Sebagai keluarga saya menaruh *respect* tinggi terhadap pegawai yang senior, *friend for everyone but professional is a must*.

Bagaimana pendapat Anda tentang peran Kementerian Kominfo saat ini?

Peran Kementerian Kominfo sangat sentral dan strategis. Kementerian kita adalah fasilitator dan akselerator transformasi digital. Kominfo adalah *enabler* utama konektivitas. Dalam masa pandemi di mana interaksi fisik begitu dibatasi dan tumbuh 'ruang-ruang interaksi digital' di berbagai sektor, terasa sekali kita butuh dukungan infrastruktur telekomunikasi yang kuat. *So far* kita telah hadir dengan baik untuk itu meski tentu tantangan pemerataan aksesibilitas masih tinggi.

Menurut Anda apa langkah nyata yang harus dilakukan insan Kominfo menghadapi perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama di kalangan generasi milenial?

Generasi milenial harus menjadi pelopor, akselerator transformasi digital sesuai peran yang masing-masing diemban, membantu campaign 4 pilar literasi digital, digital *skill, culture, ethics and safety*. Termasuk juga memerangi disinformasi atau hoaks.

Mengapa menurut Anda hal itu harus dilakukan?

Guna membantu percepatan cita-cita besar kita bersama, Indonesia Digital. Generasi milenial memiliki energi, determinasi dan jejaring yang besar, perannya sangat diperlukan untuk memperluas cakupan, jangkauan ke masyarakat, lintas komunitas.

Saat ini semakin banyak sivitas muda Kominfo yang menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda ingin mengikuti jejak mereka?

Setiap capaian, keteladanan yang sifatnya positif, bernilai, tentu patut diikuti, dijadikan referensi ; ibroh kemudian dari sana sedapat mungkin melakukan *improvement*.

Menurut Anda, apakah kerja UPT seperti Balmon sudah cukup optimal bagi masyarakat?

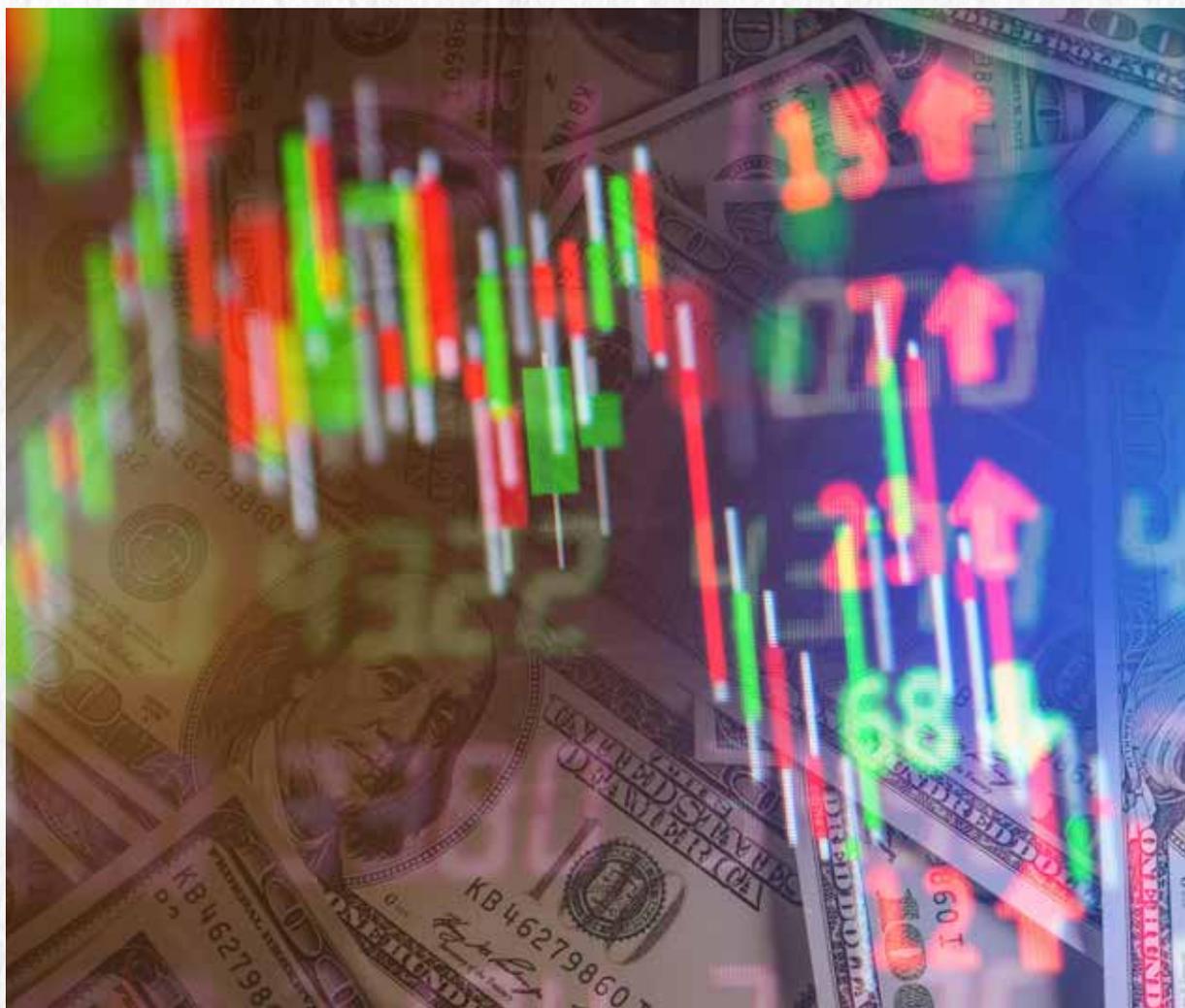
Inshaallah cukup optimal, semangat *continual improvement* harus terus dijaga.

Apa harapan Anda ke depan bagi Kementerian Kominfo, khususnya bagi UPT?

Terus meningkatkan kualitas kinerja, kualitas layanan, adjust dengan tantangan, dinamika-dinamika yang sangat cepat. UPT Mon SFR dengan tugas utama pengawasan dan pengendalian sumber daya spektrum frekuensi harus pandai menjaga keseimbangan, antara sahabat, mitra dan sekaligus melakukan fungsi *law enforcement*.

“

Jadilah sivitas muda yang selalu membawa warna cerah, memiliki determinasi tinggi, smart, kreatif, sekaligus wise. Anak muda punya tanggung jawab besar dalam transformasi digital, take your part... Do what you can do !!!



POMPOM

Istilah di komunitas-komunitas sering menggelitik. Bisa begitu karena kemunculannya biasanya juga menggelitik. Dan karena menggelitik lantas jadi kebiasaan bagi semua anggota komunitas, yang pada fitrahnya sebagai manusia, juga sudah suka tergelitik.

Di komunitas *trader* saham, contohnya, terutama gorengan (ini juga istilah umum mereka), apalagi yang berkolesterol tinggi (istilah mereka mulai sangat *niche*, artinya: gorengan banget) ada istilah "pompom". Konon asal katanya dari kata "*pump*" yang artinya memompa. Memompa agar sebuah saham bisa menggelembung, naik harga. Caranya: dengan membuat informasi yang membuat saham emiten tersebut diminati. Biasanya yang melakukan adalah (bandar lewat) *influencer* atau (bandar lewat) media.

Bagi pemain lama, mereka tak kan heran jika sebuah emiten saham tiba-tiba banyak disebut-sebut dan diberitakan media tanpa ada angin atau hujan. Itu bagian dari kegiatan pompom. Atau tiba-tiba ada *trader* yang berpengaruh mengumumkan akan memburu sebuah saham dengan analisa yang meyakinkan (meski bagi mereka yang ahli akan terlihat bahwa analisisnya dipaksakan). Alhasil banyak *trader* awam terjebak dalam sangkutan harga jeblok.

Beberapa waktu lalu, seiring dengan pandemi yang membuat orang ingin tetap mendapat *revenue* sambil rebahan, kegiatan pompom memanfaatkan *influencer* dari kalangan *public figure* yang bahkan selama ini tidak terlihat paham akan bursa saham (yang bisa kejam). Banyak yang terjebak karena pada momen

itu banyak *trader* dan investor baru yang sangat awam, hasil dari generasi pandemi. Mereka masuk saat mendengar bahwa saham-saham yang terpuruk di awal pandemi ternyata mulai berbangkitan dan memberi profit tak sedikit. Sementara pada saat yang sama menempatkan uang di tabungan sedang tidak menjadi pilihan brilian.

Baru-baru ini, dalam helatan Euro 2020, bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, memindahkan botol-botol minuman ringan yang menjadi sponsor acara tersebut dari posisi mejengnya di meja. Tentu saja botol-botol itu diletakkan dalam tujuan promosi, tidak asal begitu saja. Akibat ulah tersebut, konon bisnis sang minuman ringan (yang sudah menurun akibat kesadaran kesehatan umat manusia) makin merana. Dalam beberapa jam berikutnya, sahamnya turun, mengakibatkan kehilangan sampai 57 triliun rupiah. Kira-kira sebesar anggaran Kominfo selama 3,5 tahun (dengan patokan anggaran tahun 2021).

Nasib duit triliunan kok ditentukan oleh ulah (iseng) seorang pesohor atau *influencer* ya?

Memang begitu nasib dunia sejak zaman teknologi informasi. Begitu mudahnya persepsi orang bisa dikendalikan lewat tampilan di layar gawai yang berukuran secuil itu. Tindakan komunal yang dilakukan orang pun juga setali tiga uang, mudah diarahkan.

Berapa orang di antara kita yang beberapa waktu lalu nyangkut di pasar uang kripto karena "ulah" Elon Musk? Eh, agar adil, pertanyaannya juga bisa begini: Berapa orang di antara kita yang untung besar di pasar uang kripto karena "ulah" Elon Musk? Ya, meski kebanyakan sepertinya adalah orang yang merugi karena kebetulan masuk setelah tweet Elon Musk yang tidak

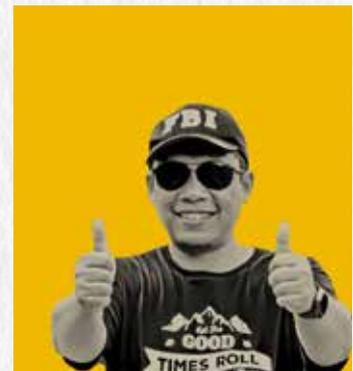
menguntungkan pasar. Kebanyakan mereka masuk telat, setelah bitcoin melambung akibat tweet Elon yang mengumumkan bahwa mobil Tesla bikinannya akan menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Dan mereka telat ambil untung atau potong kerugian ketika Elon membatalkan pengumuman penggunaan koin kripto tersebut.

Ada yang untung dari kegiatan pompom seperti ini. Dalam semua aspek kehidupan. Namun biasanya lebih banyak yang buntung. Karena memang sifat pompom yang dilakukan segelintir pihak dengan sasaran pihak lain yang kuantitasnya kudu lebih banyak untuk menghasilkan efek atau keuntungan berganda.

Kalau Anda menjadi *influencer* kelas domestik, misalnya berhasil mempengaruhi emak dan kakak-kakak untuk menggunakan *skin care* merek tertentu, sepertinya tak akan banyak menguntungkan secara finansial. Atau malah bisa jadi rugi karena kudu bertanggung jawab untuk *sharing* penggunaan sang produk. Namun jika Anda bisa memiliki jutaan pengikut di medsos, satu kali penyebutan merek "*skin care*" di postingan medsos saja sudah akan menghasilkan puluhan juta. Apalagi kalau bisa dapat iklan *built-in* di kanal Youtube-nya.

Maka berbahagialah di zaman ini jika Anda memiliki kapasitas untuk mem-pompom warga.

Tak heran jika semua berusaha untuk mencapai kapasitas tersebut melalui jalur media sosial yang terbuka lebar saat ini. Caranya ada yang dengan melalui pencapaian karir terlebih dahulu seperti Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Donald Trump. Ada pula yang memilih jalur untuk membuat kontroversi di dunia maya atau berjoget-joget seksi agar namanya cepat melambung.***



Oleh: FX Bambang Irawan
Redaktur KominfoNext

Dalam keseharian saat menggunakan alat/perangkat telekomunikasi, tentu kita berharap mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat penggunaan perkakas tersebut. Perlu dilakukan proses uji untuk memenuhi standar manajemen spektrum sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum peralatan dan perangkat telekomunikasi tersebut beredar luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan bahwa "perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan, dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

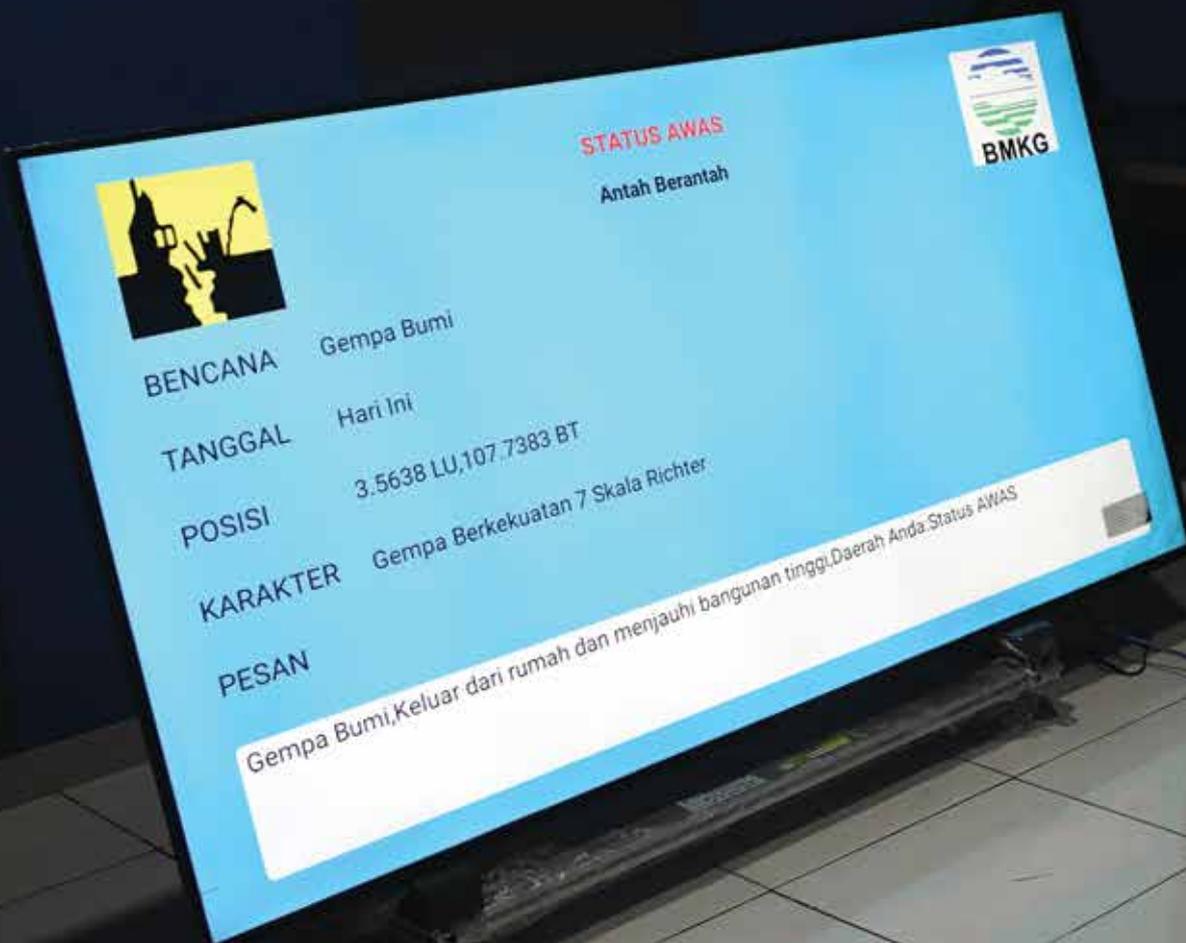




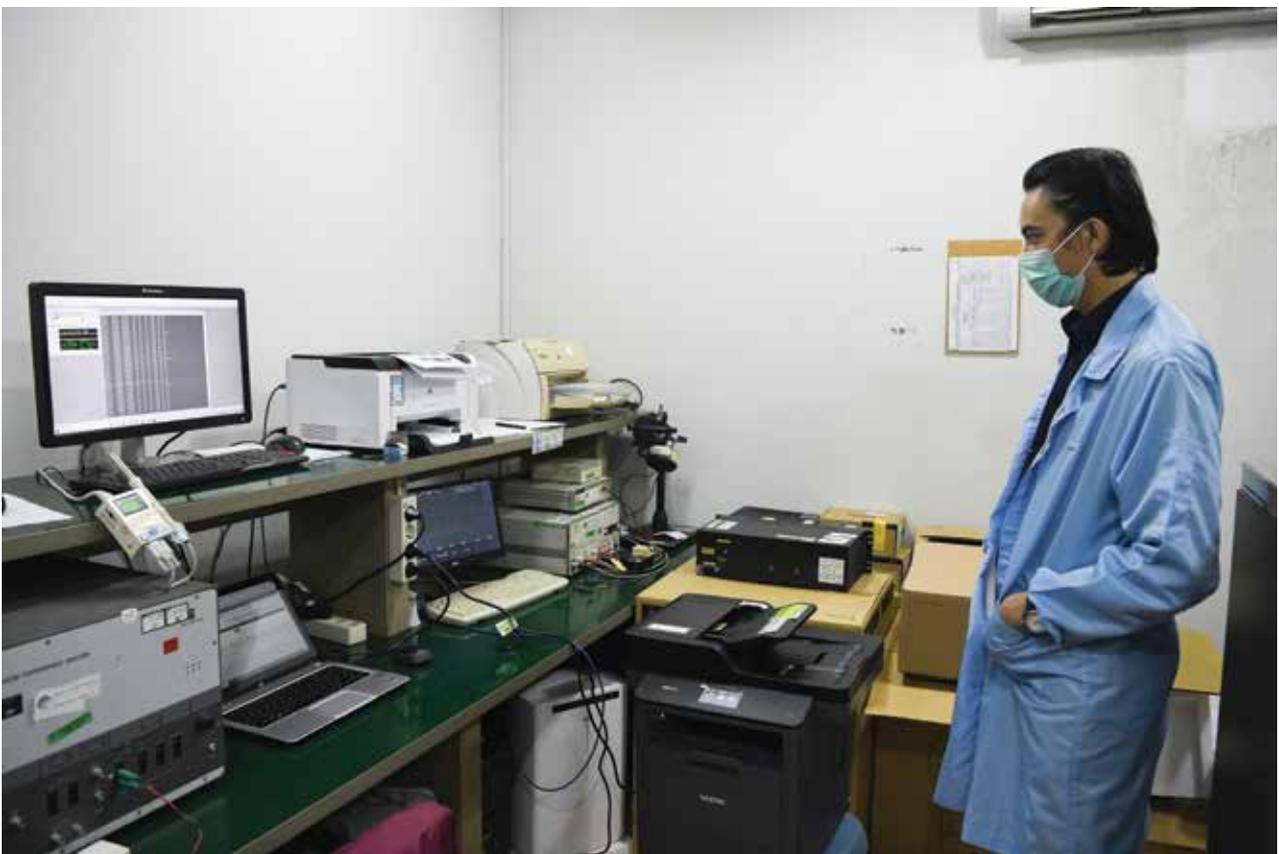
FOTO + TEXT : INDRA KUSUMA



Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang berdiri sejak tahun 1999, berperan dalam proses sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain: alat/perangkat telekomunikasi berbasis radio, alat/perangkat telekomunikasi berbasis non radio, electromagnetic compatibility alat/perangkat telekomunikasi, serta pelayanan kalibrasi perangkat telekomunikasi.







Perangkat-perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT di antaranya adalah antena BTS, antena satelit, bluetooth earphone, bluetooth headphone, electronic data capture (EDC), handy talky, head unit with bluetooth, laptop, NFC Reader, radio maritim, pesawat telepon analog, smart TV, smartphone, wireless access point, wireless CCTV, dan wireless microphone.



BBPPT merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Kominfo yang melakukan pengujian guna memastikan alat/perangkat telekomunikasi memenuhi standar nasional maupun internasional, sehingga alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis dan standar Undang-Undang tentang Telekomunikasi maupun aturan turunannya, sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta untuk perlindungan bagi konsumen.

QnA

Jeputar

Platform Media Sosial Wajib Daftar ke Kominfo?



Mariam F Barata

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aptika Kementerian Kominfo

NETIZEN



/ Apa benar **platform media sosial wajib mendaftar ke Kominfo?** Kenapa?/

Di dalam Peraturan Menteri Kominfo No 5 tahun 2020 ada peraturan terkait dengan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE). Itu merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh seluruh PSE baik lokal maupun asing. Nah terkait dengan media sosial, ia juga termasuk dalam PSE lingkup privat. Oleh karena itu, seluruh media sosial harus melakukan pendaftaran.



/ Apa tujuan diterbitkannya **aturan PSE Lingkup Privat** ini? /

Dengan adanya Permenkominfo No 5 Tahun 2020 tersebut, Kominfo mencoba untuk menjaga agar semua konten di Indonesia menjadi konten yang positif dan menghindari konten negatif.



BER- TANYA, KOMINFO MENJAWAB



/ Apa saja **kriteria** yang termasuk dalam PSE Lingkup Privat? /

PSE terdiri dari dua, yaitu: PSE lingkup publik dan PSE lingkup privat. PSE lingkup publik adalah PSE instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh negara, yang nantinya akan punya peraturan tersendiri. Sedangkan, **PSE lingkup privat terdiri 6 kriteria. Pertama**, ia termasuk lingkup privat jika PSE tersebut melakukan transaksi keuangan. **Kedua**, jika PSE melakukan penawaran atau pemasaran. **Ketiga**, jika PSE memiliki muatan digital yang berbayar. **Keempat**, media sosial yang melakukan adanya komunikasi seperti suara, gambar, tulisan, dan lain-lain. **Kelima**, mesin pencari seperti Google ataupun Yahoo. Keenam, adanya muatan data pribadi.





/ Mengapa masih banyak platform media sosial yang **belum terdaftar**? /

Saat ini beberapa PSE sudah melakukan pendaftaran. PSE asing seperti Twitter, Facebook, Google, juga sebenarnya wajib mendaftar, tapi fitur pendaftaran yang ada di dalam OSS (Online Single Submission) belum tersedia. Saat ini, OSS sedang melakukan perbaikan atau penyempurnaan menjadi OSS RBA, yang saat ini dikerjakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seharusnya launching (dirilis) pada bulan Juli, tetapi ditunda karena ingin mendapatkan sistem yang sempurna. Jika OSS RBA telah launching dan telah memiliki fitur untuk pendaftaran PSE asing, maka PSE asing wajib melakukan pendaftaran. Karena saat ini belum tersedia, akan disesuaikan waktu peralihannya 6 bulan setelah OSS RBA diluncurkan.



/ Apa yang dimaksud dengan **Equal Playing Field**? /

Kita (pemerintah, red.) mengharapkan adanya kesamaan antara PSE asing maupun PSE lokal. Jadi, tidak adanya pengecualian dalam memberikan suatu hal yang lebih antara PSE asing maupun PSE lokal. Semuanya diperlakukan sama, baik lokal maupun asing semuanya wajib melakukan pendaftaran.



/ Apa itu **sistem OSS-RBA**? /

Online Single Submission - Risk Based Approach, yaitu sistem perizinan terpadu yang dibuat oleh BKPM. Di dalamnya bukan hanya ada perizinan PSE, tetapi ada juga izin-izin lain seperti perdagangan dari kementerian-kementerian lainnya. Layanan pendaftaran PSE merupakan salah satu bagian dari OSS RBA tersebut.



/ Kapan **batas waktu** untuk mendaftar? /

Sebenarnya pendaftaran untuk PSE lokal telah dibuka sejak beberapa waktu lalu dengan sistem OSS yang sudah ada saat ini. Tetapi untuk PSE asing pada dasarnya belum tersedia fiturnya. Oleh karena itu, perlu menunggu OSS-RBA yang baru yang memiliki fitur pendaftaran untuk PSE asing. Jika, OSS RBA telah launching, maka pendaftaran langsung dimulai dan batas akhir pendaftaran 6 bulan sesudah OSS RBA launching.



/ Ada **sanksi** untuk PSE yang **tidak mendaftar**? /

Sesuai dengan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, jika PSE tidak melakukan pendaftaran maka akan dilakukan pemutusan akses.



/ Siapa saja **PSE yang sudah mendaftar**? /

Sejauh ini, PSE yang sudah mendaftar adalah PSE lokal, di antaranya beberapa perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain.



/ Di mana **masyarakat bisa melihat PSE** yang sudah terdaftar? /

Kelebihan dari pendaftaran PSE ini ialah masyarakat dapat lebih waspada dan aware untuk melakukan transaksi dengan PSE yang telah terdaftar di Kementerian Kominfo. Untuk melihat PSE yang sudah dan belum terdaftar dapat diakses melalui layanan. kominfo.go.id



/ Apa **manfaatnya** bagi PSE yang sudah mendaftar? /

Untuk PSE yang telah mendaftar maka lebih dipercaya oleh masyarakat, dan PSE juga dapat percaya diri bahwa dia dapat melakukan hal yang telah sesuai dengan aturan pemerintah.



/ Bagaimana jika terjadi **kebocoran data pada platform digital**? /

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, seluruh PSE harus menjaga keamanan data pribadinya. Apabila terjadi kebocoran data pribadi di dalam platformnya, maka Kemkominfo akan melakukan teguran terlebih dahulu. Kemudian, ada juga sanksi administratif. Tim dari Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika nantinya juga akan melakukan verifikasi ataupun penindakan, dan bisa diberikan sanksi administratif sampai dengan pemutusan akses. Tetapi, harus dilihat kebocoran datanya seperti apa, karena seluruh PSE memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang ia kumpulkan.





/ Apa benar dengan aturan ini, **data pribadi masyarakat jadi milik pemerintah?** /

Data pribadi kita adalah milik kita sendiri, tidak dapat dibagi-bagi. Pemerintah, contohnya Admin Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang mengumpulkan data pribadi, karena mempunyai kewenangan legal basic dan legal obligation untuk mengumpulkan data pribadi seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti data tersebut menjadi milik pemerintah, data pribadi tetap milik kita sendiri. Yang bisa memberikan data pribadi adalah si pemiliknya ke pihak yang memang dia inginkan, bukan orang lain.

Data yang disampaikan di atas adalah hasil wawancara per tanggal 8 Juni 2021.



/ Adakah **sanksi hukum** bagi platform yang lalai menjaga datanya? /

Aturan terkait data pribadi ini nantinya juga akan tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Data Pribadi. Di dalam RUU tersebut, semua PSE sebagai pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan terkait data pribadi yang dikumpulkannya. Jika, nantinya adanya kebocoran data pribadi dari PSE tersebut, di dalam RUU PDP akan adanya sanksi baik berbentuk perdata maupun pidana.

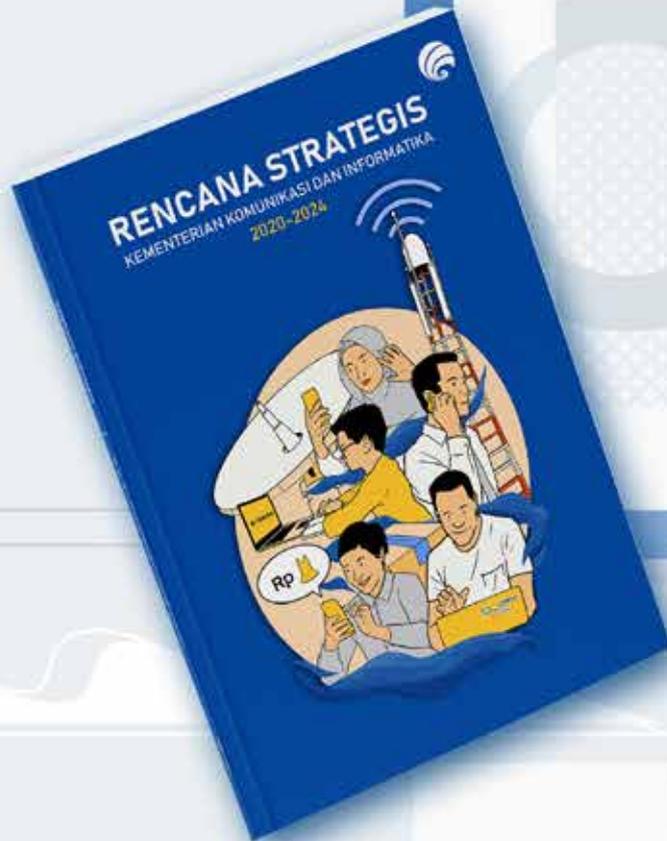


Saksikan Video wawancara **Netizen Bertanya Kominfo Menjawab** hanya di Youtube **Kemkominfo TV**



BACA SELENGKAPNYA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMINFO 2020-2024



Unduh di sini :
kominfo.go.id/renstra



Menkominfo: Jaringan 4G Tetap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan jaringan 4G dan 4G *Long Term Evolution* (LTE) tetap akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut Menkominfo keberadaan jaringan 4G tetap diperlukan, bahkan pembangunan infrastrukturnya tetap akan terus dilakukan untuk daerah yang belum terjangkau internet, terutama daerah 3T, yakni terdepan, terpencil dan tertinggal.

"Jaringan 4G akan tetap jadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama di wilayah 3T. Tugas operator seluler harus membangun infrastruktur di wilayah 3T supaya tersedia 4G di sana," ujar Menkominfo dalam Peluncuran Layanan 5G Telkomsel di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (03/06/2021).



Kurangi Gangguan Frekuensi Radio, Kominfo-Kemhub Bimtek Nelayan Indramayu

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Perhubungan menggelar Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio Nelayan Tingkat Short Range Certificate (SRC) untuk nelayan di Indramayu, Jawa Barat. Peningkatan kecakapan nelayan dalam penggunaan frekuensi radio ditargetkan dapat mengurangi gangguan frekuensi penerbangan yang disinyalir berasal dari kawasan itu.

Koordinator Sertifikasi Operator Radio Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Dodik Sudiyono menyatakan, berdasarkan laporan *International Telecommunication Union* (ITU) terdapat maskapai penerbangan asing yang mengalami interferensi frekuensi penerbangan saat melintas kawasan Indramayu. "Disasanya nelayan Indramayu, dilatarbelakangi kerap ada laporan gangguan frekuensi radio yang berasal dari wilayah pantai utara Pulau Jawa tersebut. Frekuensi resmi sejumlah dinas sering mengalami gangguan," jelasnya usai pembukaan Bimtek SRC untuk Nelayan di Indramayu, Rabu (16/06/2021).



Bekali Angkatan Kerja Muda di 4 Kota, Kominfo Gelar Sertifikasi SKKNI

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis dan Sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Angkatan Kerja Muda. Kegiatan yang ditujukan untuk membekali keterampilan teknis di bidang digital itu ditargetkan pula untuk membekali talenta digital dengan sertifikasi yang memadai untuk masuk ke dunia kerja.

"Penyelenggaraan di Makassar akan melibatkan 60 orang dengan dua skema pelatihan dan sertifikasi yakni *Graphic Designer* dan skema *Multimedia Designer*. Bimtek dan sertifikasi ini berlangsung selama 5 hari, yang terdiri dari 3 hari refreshment materi pembelajaran dan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo, dan dua hari asesmen peserta untuk menguji kelayakan mendapatkan sertifikasi kompetensi" jelas Koordinator Bidang Pengembangan Sertifikasi Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi (Pusbang Proserti) Badan Litbang SDM, Baso Saleh di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/06/2021).



Kunjungi Labuan Bajo, Menteri Johnny Ajak Pelaku UMKM Masuk Pasar Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate memulai kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kali ini, Menteri Johnny dijadwalkan menghadiri Puncak Acara "Kilau Digital Permata Flobamora", Jumat (18/06/2021) di Puncak Waringin, Nusa Tenggara Timur.

Kilau Digital Permata Flobamora digelar sebagai bagian dari tema besar kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dengan fokus untuk memajukan dan mempromosikan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khas NTT melalui media digital. "Saya mendorong artisan lokal dan pelaku UMKM untuk melakukan penjualan digital agar produk-produk lokal bisa menjangkau pasar yang tidak terbatas. Kami akan dorong UMKM ultramikro dan artisan Flobamora untuk onboarding digital," ujarnya di di Bandar Udara Internasional Komodo, Kamis (17/06/2021).



Latih Eks Pekerja Migran Kupang, Kominfo Dorong Pengembangan Inovasi Produk Ekonomi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha produktif eks pekerja migran. Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Balitkm SDM Kementerian Kominfo, Hedi M. Idris menyatakan pelatihan itu ditargetkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan eks pekerja migran.

“Kementerian Kominfo ingin mengambil peran dalam upaya memberdayakan pelaku UMKM dengan keterampilan digital melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Salah satunya *Thematic Academy* yang di desain khusus sesuai kebutuhan industri atau kalangan tertentu, yakni untuk pengembangan usaha eks-pekerja migran Indonesia,” ujarnya dalam Pembukaan Pelatihan dan Praktik Digitalisasi Proses Bisnis Kelompok Usaha Eks Pekerja Migran Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (21/06/2021).



Pemerintah Beri STB ke Masyarakat Kurang Mampu pada Juli 2021

Pemerintah akan memberikan *Set Top Box* (STB) kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu di tanah air mulai Juli 2021. Sehingga, masyarakat kategori di atas dapat segera bermigrasi dari televisi analog ke digital atau *Analog Switch Off* (ASO) dalam beberapa waktu ke depan. Dengan menambahkan alat STB, diharapkan masyarakat sudah dapat menikmati berbagai pilihan konten siaran televisi digital.

“Kita segera bagikan dengan teman-teman industri STB. Mudah-mudahan sebelum tahap pertama pada 17 Agustus yakni di Juli 2021 ini,” kata Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Geryantika Kurnia melalui siaran virtual pada Rabu (23/6/2021).

Tingkatkan Efisiensi Kiriman Pos dengan Teknologi Jejak Lacak



Pemerintah mendorong penggunaan sistem lacak jejak atau *tracking system* untuk setiap kiriman pos. Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikhsan Baidirus menyatakan pemanfaatan teknologi lacak jejak kiriman akan meningkatkan efisiensi dalam bisnis pos.

“Penggunaan teknologi jejak lacak akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman barang, selain itu, jejak lacak juga akan memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan kiriman,” ungkapnya dalam *keynote speech* Acara Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Tracking oleh Penyelenggara Pos: Transformasi Digital Industri Pos Nasional, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (03/06/2021).

Menkominfo Bahas Alternatif Posisi Badan Litbang SDM

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 45 menit itu, Menteri Johnny membahas posisi Badan Litbang SDM dengan menekankan pada tiga pilihan alternatif.

“Jadi tadi sudah dibahas antara Pak Menteri Kominfo dengan Kepala BRIN. Kepala BRIN sudah menjelaskan tentang BRIN, terus kemudian bagaimana posisi dari Badan Litbang SDM, dan itu juga sama yang ada di kementerian yang lain,” kata Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo Hary Budiarto usai mendampingi Menteri Johnny dalam pertemuan bersama Kepala BRIN, yang berlangsung di Rumah Dinas Menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (14/06/2021). Menurut Kepala Balitbang SDM Kominfo, alternatif pertama yang dibahas adalah mengenai tugas, pokok dan fungsi dari penelitian atau yang dikenal dengan istilah *bedol desa*.



Wujudkan Arsip Andal, Sekjen Kominfo Serahkan Hasil Audit Internal

Guna mewujudkan pengelolaan kearsipan yang andal, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerahkan laporan hasil audit internal atas capaian kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut dilakukan untuk menjamin pencipta arsip di satuan kerja Kominfo menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

“Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya dalam Penyerahan Laporan Hasil Audit Internal di Jakarta, Senin (07/06/2021).



Tiga Langkah Pemerintah Jamin Ruang Digital Aman

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba menyatakan Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan agar penggunaan teknologi internet aman dan produktif bagi masyarakat. Menurutnya, beragam kebijakan untuk menjamin ruang digital aman itu diambil berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

“Kami telah mengambil pendekatan holistik dari mekanisme hulu serta hilir untuk menangani hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital,” ujarnya dalam Webinar bertajuk *“Social Media for Peace: Countering Online Disinformation and Hate Speech to Foster Peace”*, dari Jakarta, Rabu (23/06/2021).



10 HOAKS COVID-19 Terpopuler Juni 2021

1 [HOAKS] WHO Deklarasikan Indonesia Negara A1 High Risk COVID-19

Beredar informasi di media sosial WhatsApp terkait deklarasi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Indonesia sebagai negara A1 high risk COVID-19. Selain itu, disebutkan pula bahwa negara lain berhak menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari Indonesia dan negara-negara lain yang terdaftar di A1 memasuki wilayahnya.

Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., menjelaskan bahwa pesan tersebut masuk dalam kategori informasi tidak benar atau hoaks. Melalui pesan singkat dr. Siti Nadia mengatakan bahwa Kemenkes sudah memverifikasi informasi tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa WHO tidak pernah membuat klasifikasi negara dengan predikat A1 dan kode lainnya. Situasi per negara dilaporkan di situational report yang diterbitkan per minggu. Terkait aturan tentang travel ban, penumpang asal negara tertentu biasanya dipraktekkan Health Quarantine atau Kantor Kesehatan Pelabuhan atau pemerintah negara tujuan. Dan ini sudah merupakan praktek umum dalam *International Health Regulations* sejak 2005. Jadi, keputusan ini adalah hak masing-masing negara, sama seperti Indonesia saat ini tidak menerima WNA dari India, Pakistan bahkan kemarin sempat juga dari Inggris, ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

➔ Diteruskan

Secara resmi, hari ini WHO telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara A1 High Risk. Kami sekarang termasuk dalam kategori yang sama dengan India, Pakistan, Brasil, Filipina, dan sejumlah negara Afrika.

Artinya, negara lain berhak menolak dan melarang siapa pun yang berasal dari Indonesia (dan negara-negara lain yang terdaftar di A1) memasuki wilayahnya.

Jumlah kasus varian Covid meningkat drastis dalam sebulan terakhir, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Sangat disarankan bagi semua orang untuk tetap terkurung dan menahan diri dari berkumpul dengan publik untuk menghindari penyebaran virus lebih lanjut.

19.23

2

[HOAKS] Nigella Oil Menghilangkan Pendarahan di Tenggorokan Penderita COVID-19

Beredar sebuah narasi pada media sosial Facebook yang mengatakan bahwa terdapat sebuah obat herbal yang menyembuhkan pendarahan pada tenggorokan orang yang terdampak COVID-19. Unggahan tersebut juga mencantumkan sebuah foto yang menunjukkan sebuah obat, yakni Nigella Oil yang diklaim dapat menghilangkan pendarahan tenggorokan dalam dua jam.

Berdasarkan penelusuran, hal tersebut tidak benar. Faktanya, COVID-19 tidak memiliki gejala yang menunjukkan adanya pendarahan pada tenggorokan. Selain itu, WHO hingga saat ini mengatakan belum ada bahan herbal yang dapat menyembuhkan COVID-19. Nigella oil merupakan obat herbal yang berasal dari ekstrak jintan hitam yang memiliki beberapa khasiat, seperti meredakan alergi dan asma.

4

[HOAKS] Infografis Manfaatkan Vaksin COVID-19 Gratis dari Kemenkes

Beredar sebuah infografis yang mencantumkan logo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia disertai narasi "Ketika Vaksin COVID-19 masih gratis, manfaatkan kesempatan tersebut. Ketika anda diundang dan anda tidak datang, kami tidak masalah. Namun ketika nanti semua persyaratan administrasi menyertakan anda wajib menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19. Mohon maaf dan kesempatan itu sudah lewat. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 3A."

Faktanya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengklarifikasi secara langsung bahwa infografis tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Kemenkes RI.

3

[HOAKS] Tidak Mengalami Efek Samping setelah Vaksin COVID-19 Pertanda Tidak Sehat

Beredar sebuah postingan berbahasa Thailand yang mengklaim bahwa gejala seperti demam setelah vaksinasi COVID-19 adalah bentuk respon imun yang normal. Jika seseorang tidak mengalami efek samping apapun setelah vaksinasi maka berarti tubuh sedang tidak sehat dan tidak memiliki respon imun.

Faktanya, klaim tersebut adalah keliru. Dilansir dari AFP, Dr. Kajornsak Kaewcharat, Wakil Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, mengatakan tingkat keparahan efek samping vaksin COVID-19 yang dialami seseorang belum tentu menunjukkan seberapa sehat mereka. Menurut WHO, jika seseorang yang menerima vaksin COVID-19 tidak mengalami efek samping, bukan berarti vaksin tersebut tidak efektif. Dijelaskan pula bahwa setiap tubuh memiliki respon berbeda-beda terhadap vaksin. Beberapa orang alergi terhadap makanan tertentu, sementara beberapa orang tidak. Hal yang sama juga berlaku untuk vaksin.

5

[HOAKS] Form Pendaftaran Vaksin COVID-19 Khusus KTP Tangerang Selatan

Beredar pesan berantai WhatsApp yang berisi tautan form pendaftaran vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun ke atas di Tangerang Selatan. Dalam form pendaftaran tertulis "DAFTAR VAKSIN 18TH KE ATAS (KHUSUS KTP TANGSEL)". Pada pesan menyebut bahwa pelaksanaan vaksin bertempat di Bintaro Xchange Mall Tangerang Selatan, pada Selasa, 29 Juni 2021, pukul 7.30 AM sampai dengan selesai.

Dilansir dari merdeka.com, Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Alin Hendarlin Mahdaniar memastikan sebaran form pendaftaran vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun di Tangerang Selatan adalah tidak benar. Hingga saat ini pihak Dinas Kesehatan Tangerang Selatan belum membuka pendaftaran vaksin untuk usia 18 tahun ke atas.

6

[HOAKS] Christian Eriksen Terkena Serangan Jantung Setelah Vaksin COVID-19

Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter berisi informasi yang mengklaim bahwa pesepakbola Denmark, Christian Eriksen mengalami serangan jantung pada saat pertandingan Piala Euro 2020 melawan Finlandia setelah disuntik vaksin Pfizer, 12 hari sebelumnya. Pada narasi unggahan itu juga disebutkan bahwa kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Kepala Tim Medis dan Dokter Spesialis Jantung Inter Milan dan disiarkan melalui media Italia, Radio Sportiva.

Faktanya, klaim Christian Eriksen mengalami serangan jantung setelah disuntik vaksin Pfizer tersebut tidak benar. Dokter Timnas Denmark Morten Bosen telah mengkonfirmasi bahwa Eriksen terjatuh di lapangan setelah mengalami serangan jantung, yang penyebabnya masih belum diketahui. Selain itu, Direktur Inter Milan, Giuseppe Marotta menegaskan bahwa Eriksen belum menerima vaksinasi COVID-19. Pihak Radio Sportiva melalui akun Twitter resminya juga telah menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menyiarkan berita apapun terkait kondisi Eriksen, termasuk pendapat dari tim medis Inter Milan.

7

[HOAKS] Klaim Ramuan Kratom Bisa Sembuhkan Virus COVID-19

Beredar sebuah unggahan berbahasa Thailand yang mengklaim tumbuhan kratom atau yang biasa disebut daun purik, diklaim mampu mengobati dan mencegah COVID-19. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa industri medis tidak akan mengkonfirmasi hal ini, dikarenakan jika mereka mengumumkannya, maka vaksin yang mereka pesan tidak akan laku.

Dilansir dari kumparan.com yang juga mengutip dari AFP, dr Kajornsak Kaewjaras, Wakil Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Penyakit Thailand mengatakan tidak ada bukti ilmiah bahwa mengonsumsi daun kratom dapat mencegah COVID-19. Bahkan mengonsumsi daun kratom sangat tidak disarankan karena merupakan zat adiktif. Kratom atau daun purik sendiri adalah tumbuhan yang digunakan di sejumlah negara terutama di Asia Tenggara, termasuk di Thailand dan Indonesia sebagai obat herbal. Daun tersebut dipercaya dapat meredakan rasa cemas, nyeri hingga membantu kesulitan tidur. Namun, daun tersebut dinilai bisa berbahaya karena berisiko kecanduan.

8

[HOAKS] COVID-19 Tidak Menyebar Melalui Droplet dan Penggunaan Masker Menyebabkan Hasil Tes Positif

Beredar di media sosial informasi yang menyebut bahwa COVID-19 tidak menyebar melalui droplet dan penggunaan masker menyebabkan asidosis darah. Jika terjadi dehidrasi dan keluar keringat banyak akan membuat hasil swab PCR dan antigen positif.

Dilansir dari kompas.com, klaim COVID-19 tidak menyebar melalui droplet dan masker membuat hasil tes COVID-19 menjadi positif adalah hoaks. Sebab WHO telah menyatakan bahwa penyebab penularan COVID-19 adalah melalui tetesan air liur (droplet) atau keluarnya cairan dari hidung orang yang terinfeksi. Sementara itu, tidak ada bukti yang menunjukkan pemakaian masker dapat menyebabkan tes COVID-19 menunjukkan hasil positif.

9

[HOAKS] Teh Daun Pinus Hentikan Efek Bahaya Vaksin COVID-19

Telah beredar di media sosial sebuah unggahan yang mengatakan bahwa mengkonsumsi teh daun pinus putih dapat menghentikan efek berbahaya akibat vaksin COVID-19, atau menghentikan penularan virus Corona yang ada di vaksin.



Faktanya, klaim yang mengatakan bahwa mengkonsumsi teh daun pinus putih dapat menghentikan penularan virus dari vaksin COVID-19 adalah hoaks. Vaksin COVID-19 sendiri tidak berbahaya dan tidak memberikan efek samping yang menular.

10

[HOAKS] Rusia Menemukan bahwa COVID-19 Tidak Disebabkan oleh Virus

Beredar sebuah pesan berantai berupa narasi yang menyatakan dokter di Rusia telah melakukan otopsi terhadap jenazah COVID-19 dan menemukan bahwa penyakit COVID-19 tidak disebabkan oleh virus, melainkan bakteri yang telah terpapar radiasi dan menggumpal melalui darah hingga menyebabkan kematian. Dalam narasinya juga disebut untuk mengobati COVID-19, hanya membutuhkan aspirin 100 mg, apronic atau paracetamol 650mg.

Dilansir dari covid19.go.id, klaim dalam narasi yang beredar tersebut adalah keliru. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada pernyataan terkait penemuan tersebut di situs resmi pemerintah Rusia. WHO serta hasil penelitian para ahli juga telah menegaskan bahwa COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Belum ada obat yang dapat menyembuhkan maupun mencegah COVID-19, oleh karena itu WHO mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker ketika bepergian, serta menghindari kerumunan. Lebih lanjut, teknologi 5G telah terbukti tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Adapun narasi hoaks serupa juga pernah beredar dengan judul "COVID-19 BUKAN Virus, Sumber : Kementerian Kesehatan Italy" pada Februari 2021 lalu.

Peringatan
HARI LAHIR PANCASILA
1 JUNI 2021

**PANCASILA DALAM TINDAKAN
BERSATU UNTUK INDONESIA TANGGUH**



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110
(021)3452841
majalahkominfonext@kominfo.go.id